

KOMIK BPK



MENGENAL LEBIH DEKAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MELALUI CERGAM!



HALO SEMUANYA!
NAMAKU SONI, KOMIKUS LEPAS

KALI INI AKU AKAN MENGAJAK KALIAN
SEMUA UNTUK MENGENAL LEBIH DEKAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, ATAU
YANG LEBIH KITA KENAL SEBAGAI BPK

CERITA INI DIMULAI KETIKA
AKU MENDAPAT TUGAS
MEMBUAT KOMIK BPK

EH?

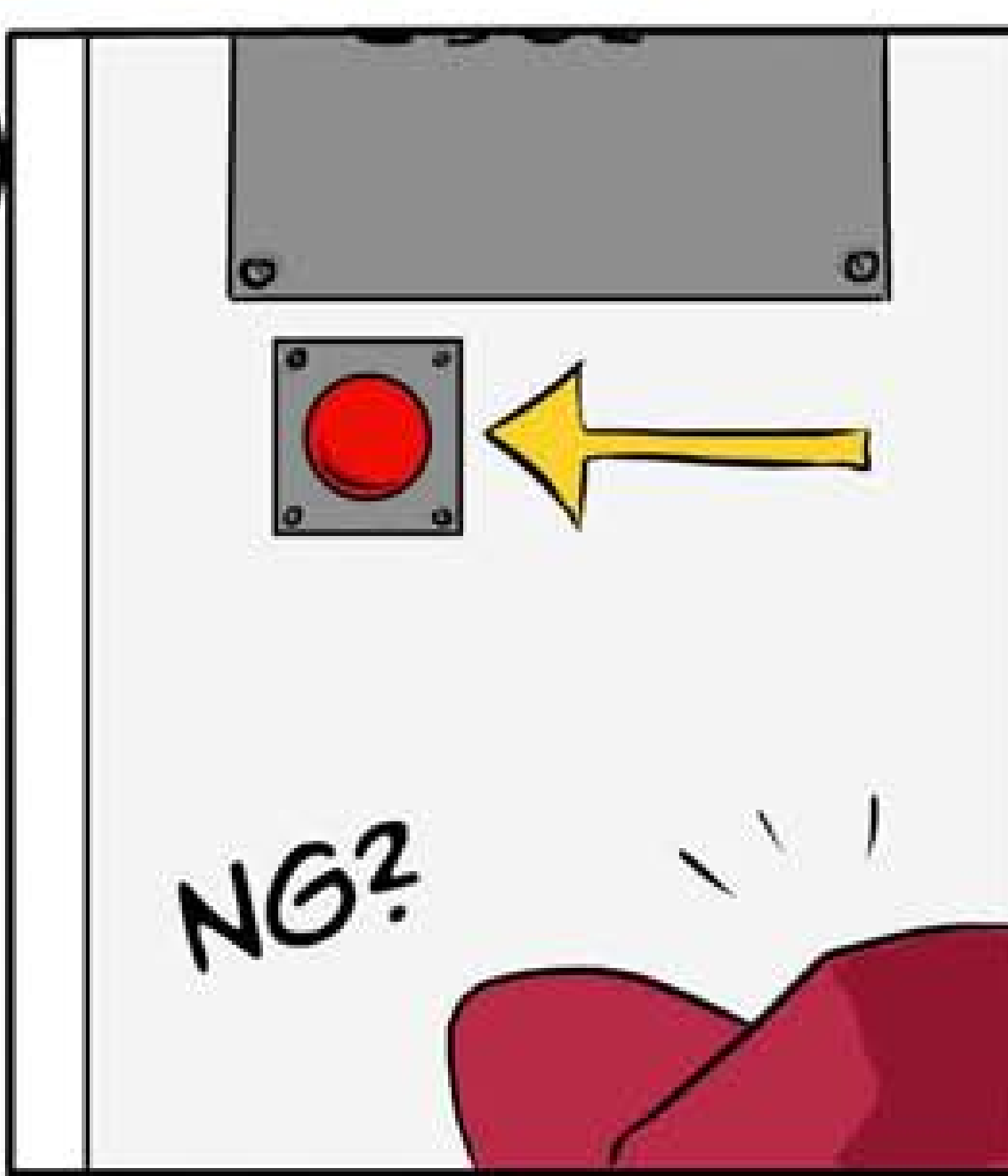
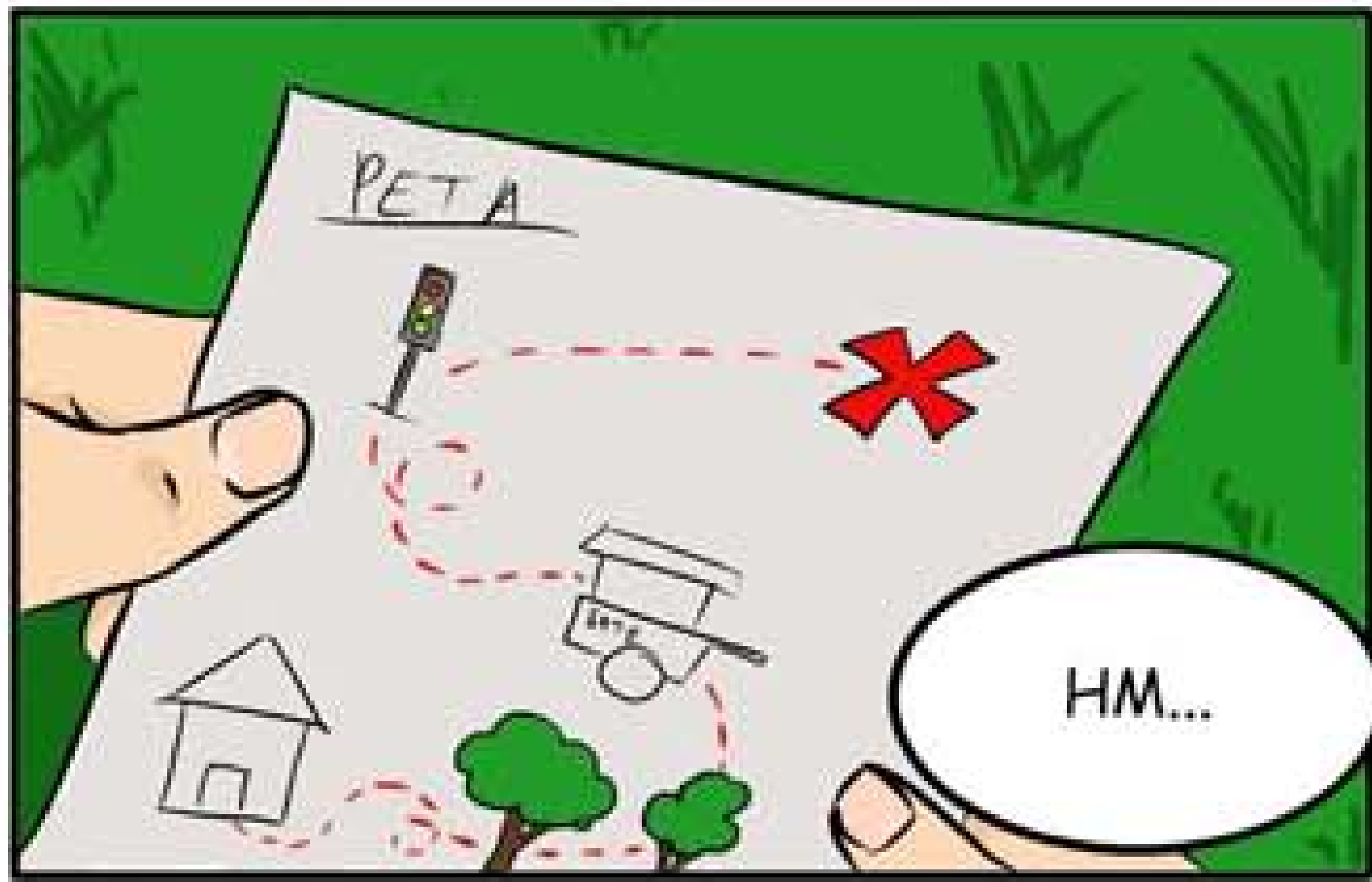
COBA KAMU
BUAT KOMIK
TENTANG
BPK

SEMALAMAN AKU MENCARI DATA
TENTANG BPK, TAPI BELUM CUKUP
JUGA UNTUK BAHAN KOMIK

AKHIRNYA SEORANG
TEMANKU BERUSAHA
MEMBANTU

DIA MEMBERIKAN SEBUAH PETA,
KATANYA SIH BISA MENCARI
DATA SEBANYAK-BANYAKNYA
TENTANG BPK DI TEMPAT ITU

ESOK PAGINYA AKU PUN
LANGSUNG BERANGKAT KESANA





SELAMAT DATANG
DI SARANG ILMU,
ANAK MUDA



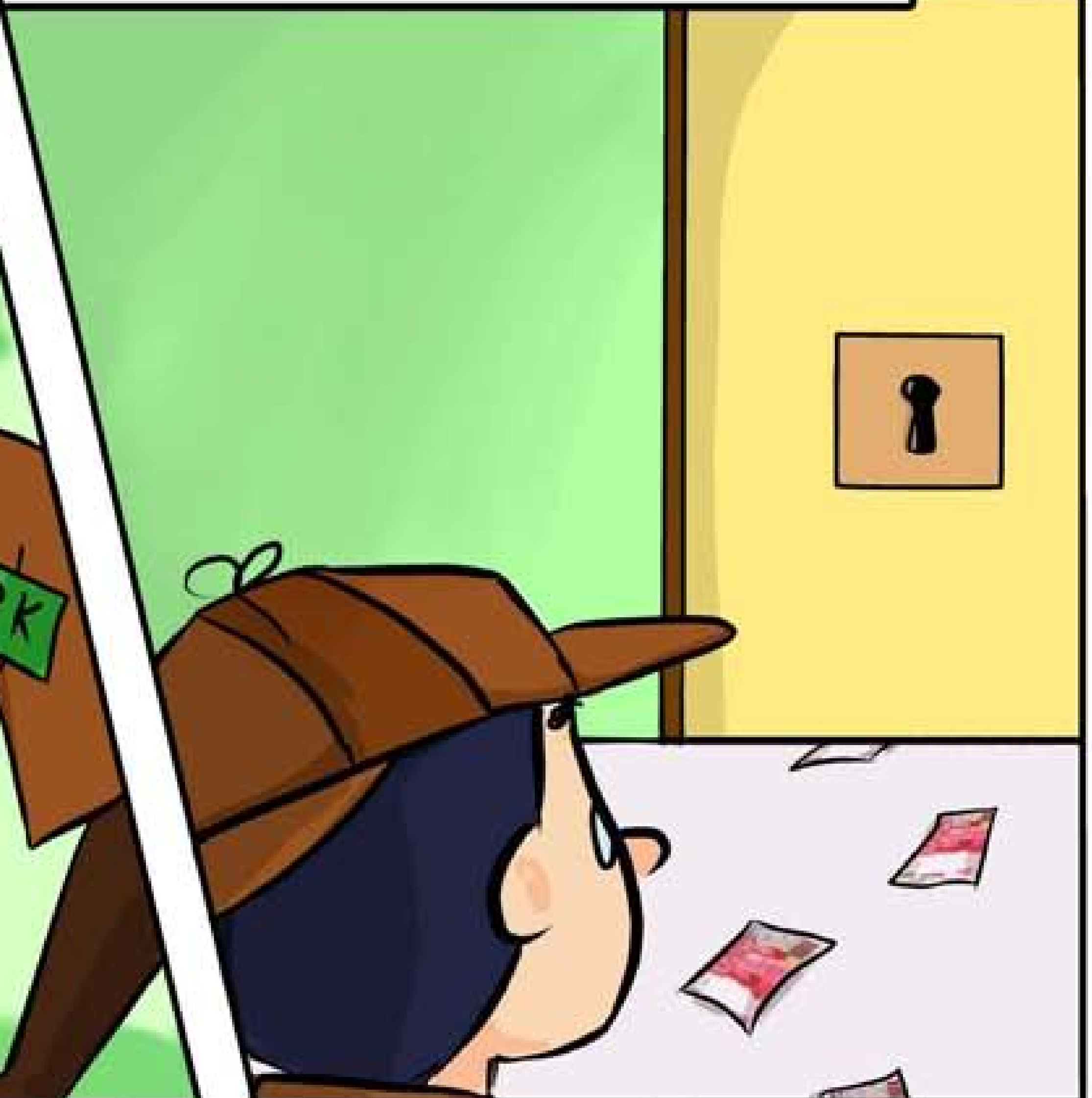
BPK ADALAH LEMBAGA NEGARA
YANG BERTUGAS MEMERIKSA
PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB
TENTANG KEUANGAN NEGARA



PERTAMA,
BPK ADALAH PEMERIKSA
SEMUA ASAL-USUL
DAN BESARNYA PENERIMAAN
NEGARA, DARI MANAPUN SUMBERNYA



KEDUA,
BPK HARUS MENGETAHUI TEMPAT
UANG NEGARA ITU DISIMPAN DAN
UNTUK APA UANG NEGARA DIGUNAKAN





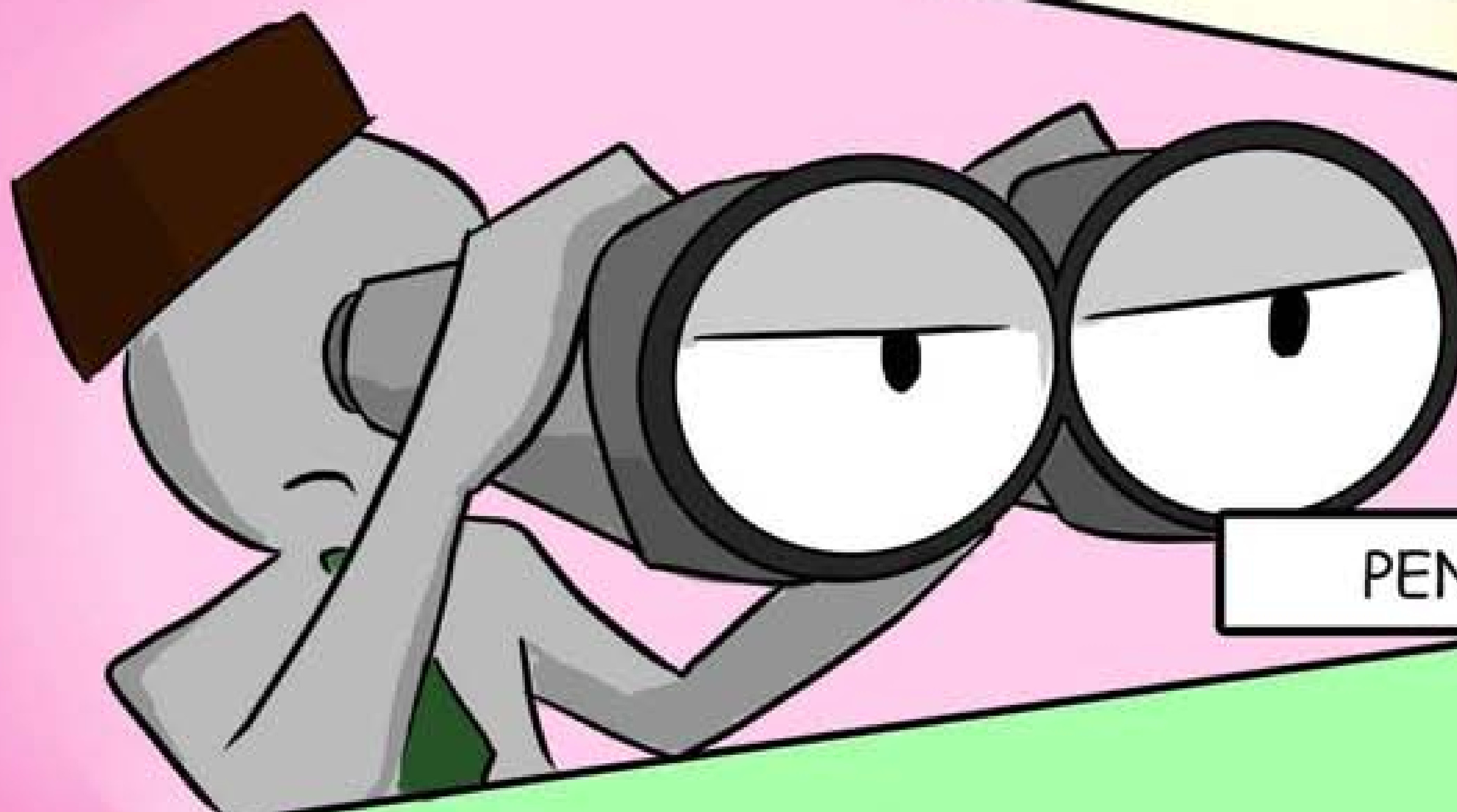


HAL INI MELIPUTI...



PERENCANAAN

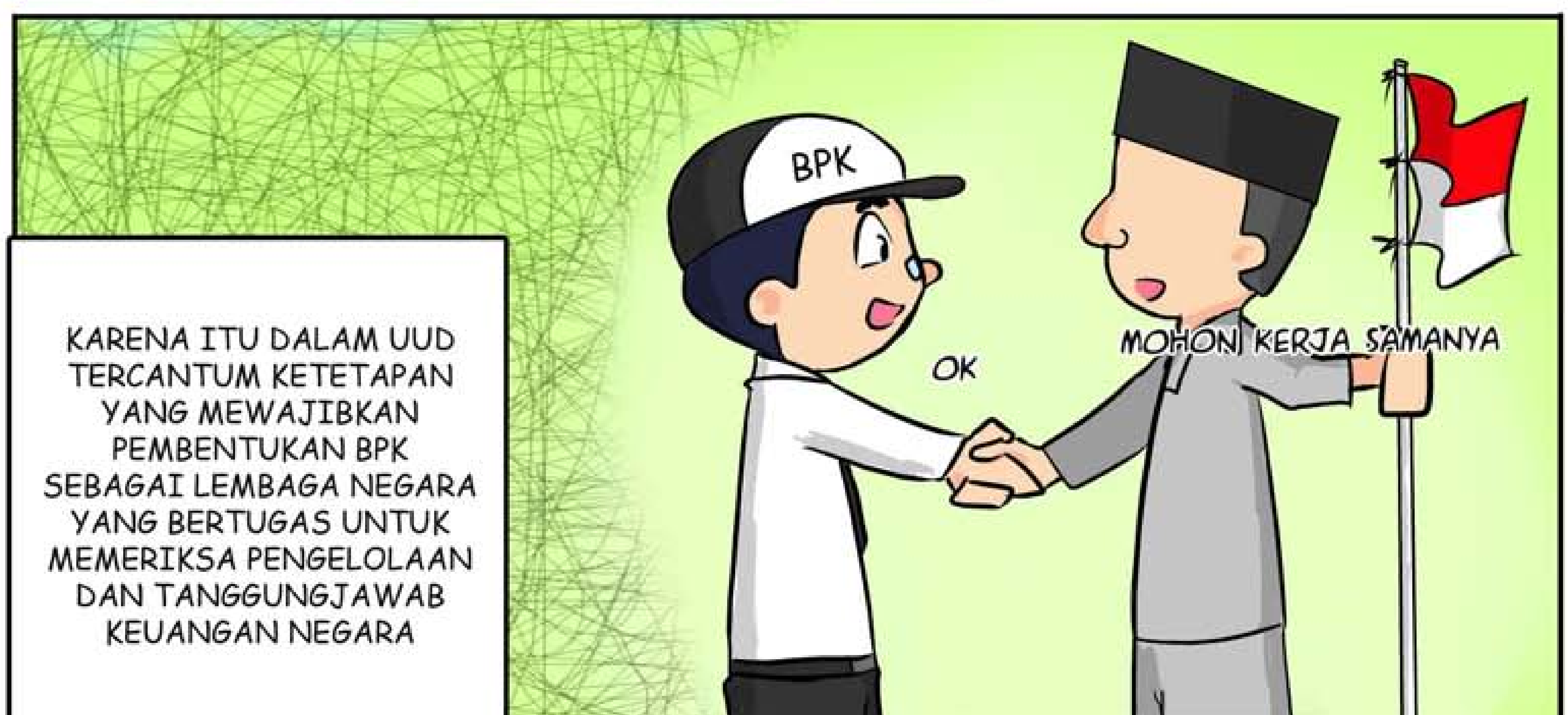
PELAKSANAAN

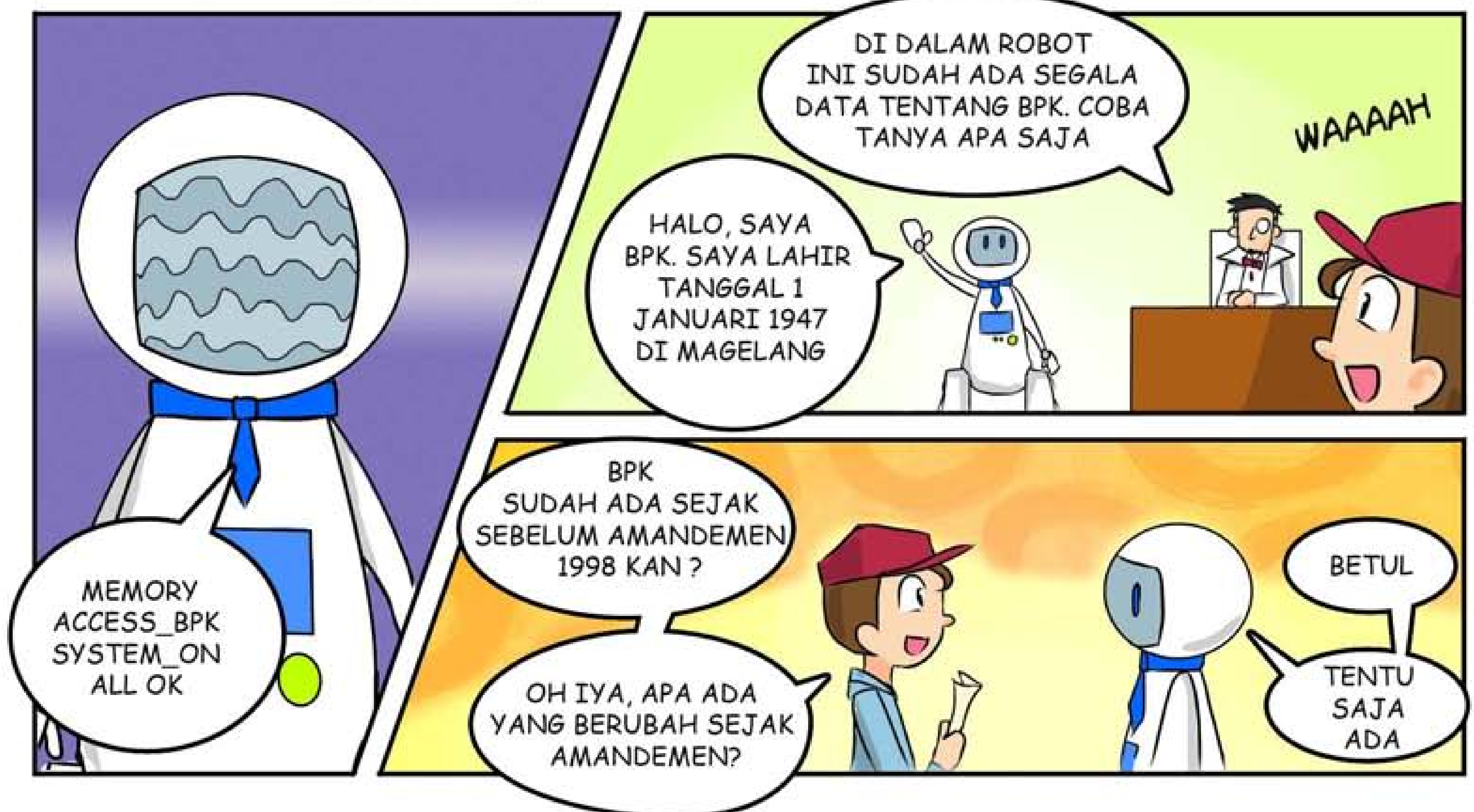
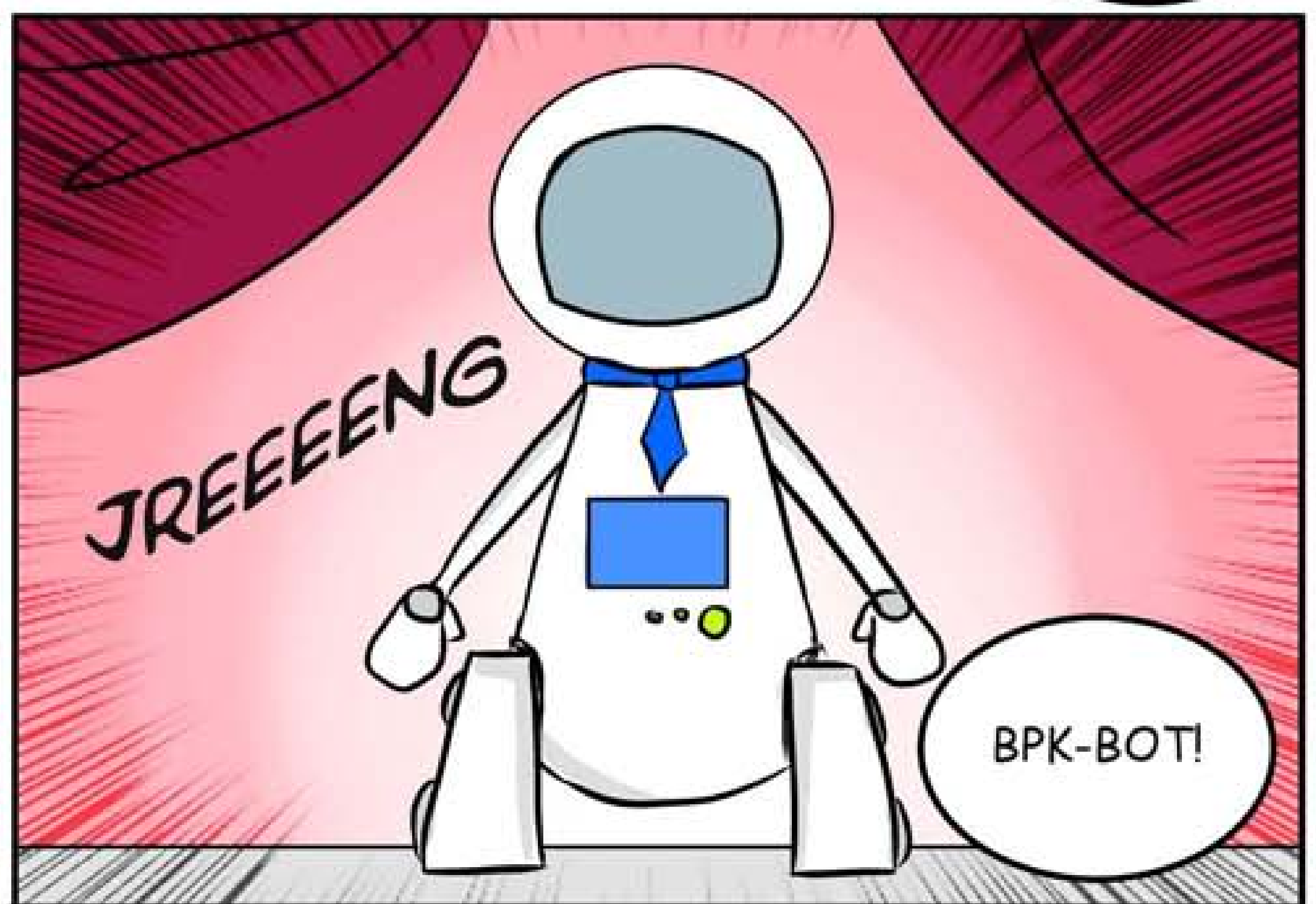


PENGAWASAN



DAN PERTANGGUNGJAWABAN





AMANDEMEN
UUD 1945 PASAL 23E PADA
10 NOVEMBER 2001 MENYATAKAN
BPK SEBAGAI BADAN YANG
"BEBAS DAN MANDIRI"

UWOOOOW

BPK

KRAK!!!

KRAK!!!



PERUBAHAN PENTING
LAINNYA ADALAH DITAMBAHKANNYA
KETETAPAN BAHWA BPK BUKAN HANYA MEMERIKSA
"TANGGUNGJAWAB TENTANG KEUANGAN NEGARA"
MELAINKAN JUGA
"PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA"

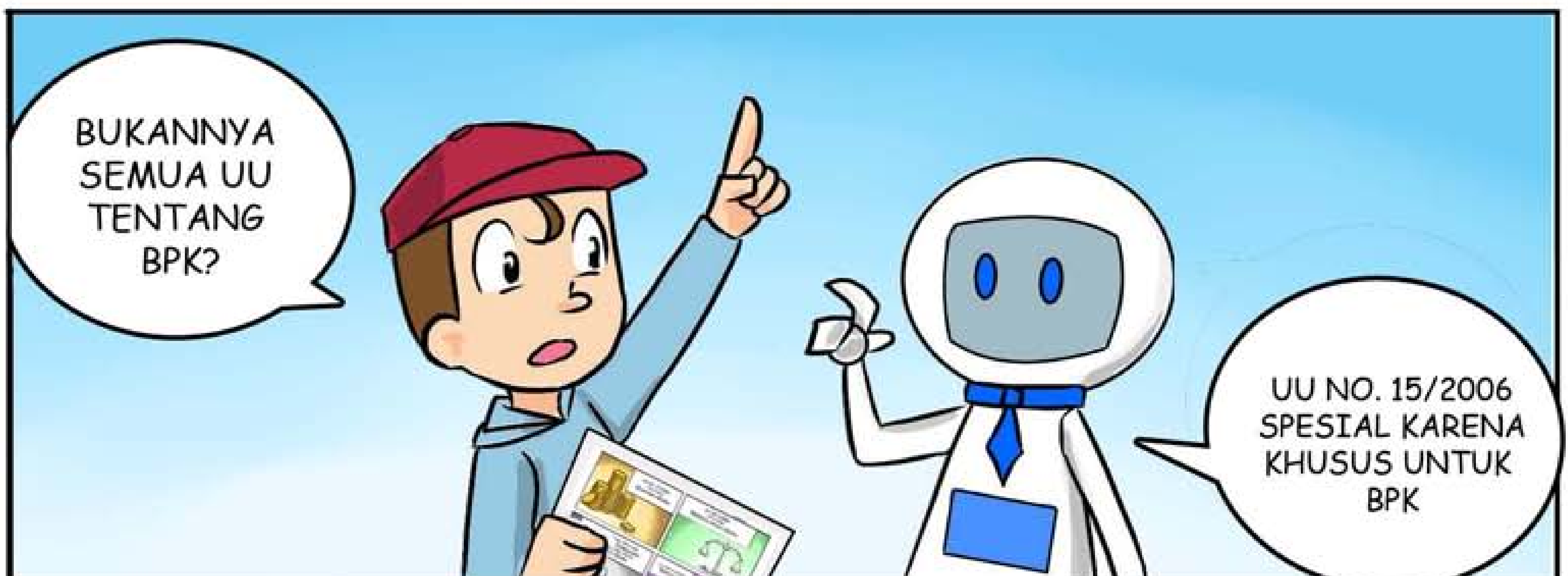
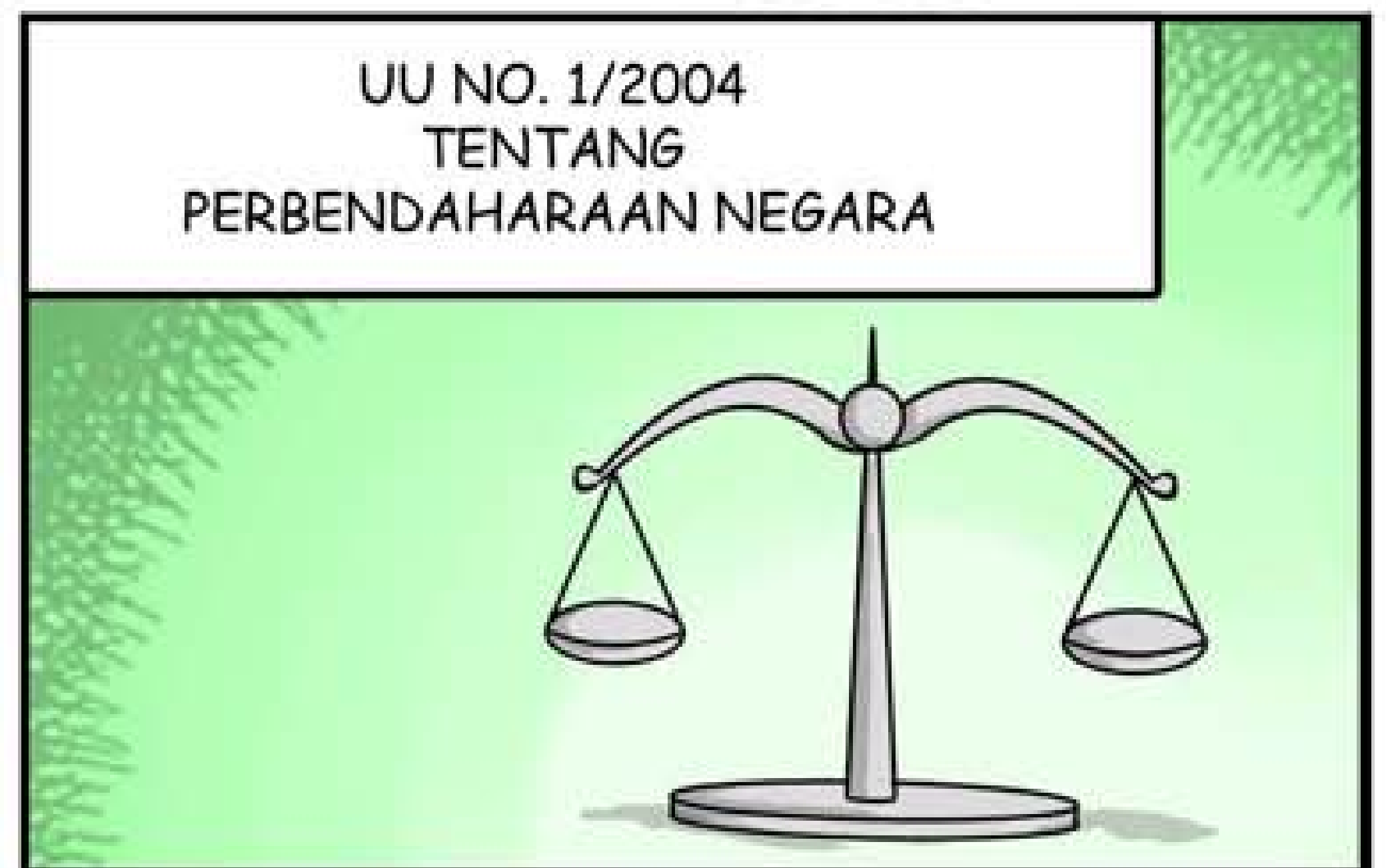
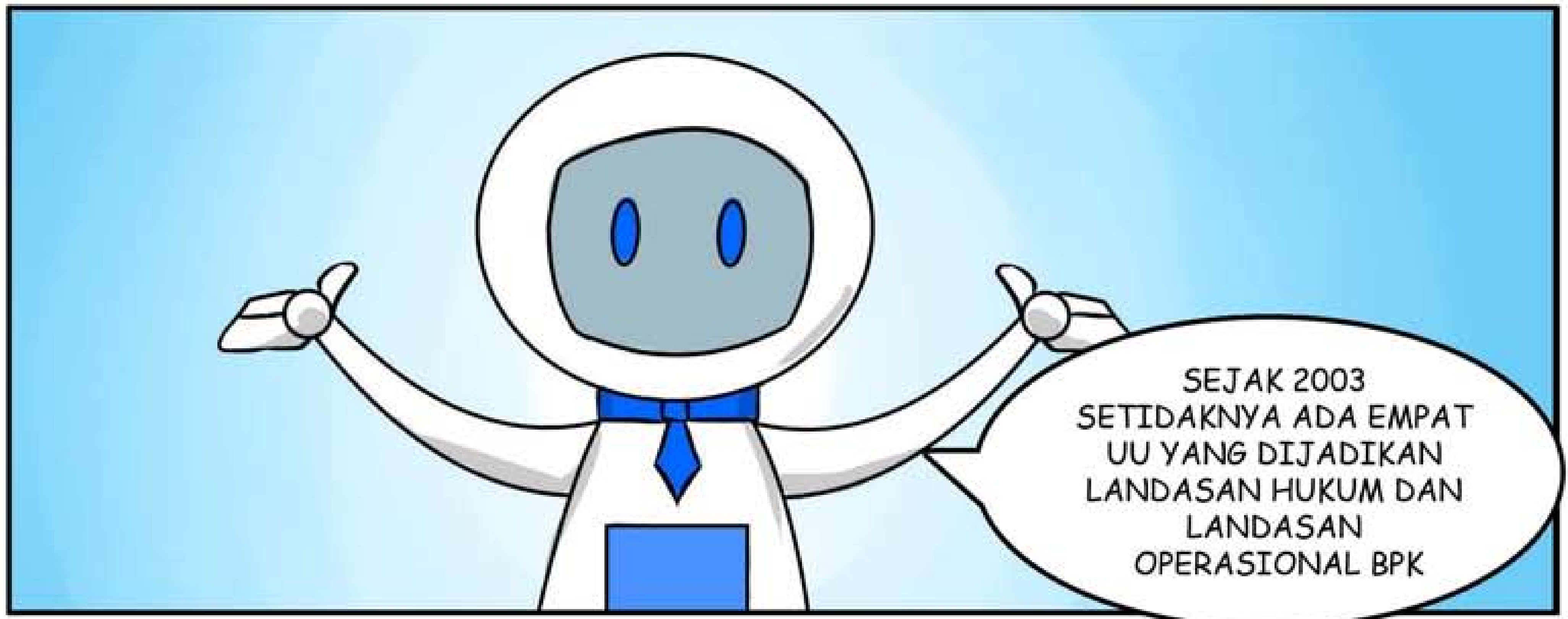
HMM, HMM

SELAMA DIBAWAH
PEJABAT A
AKU...

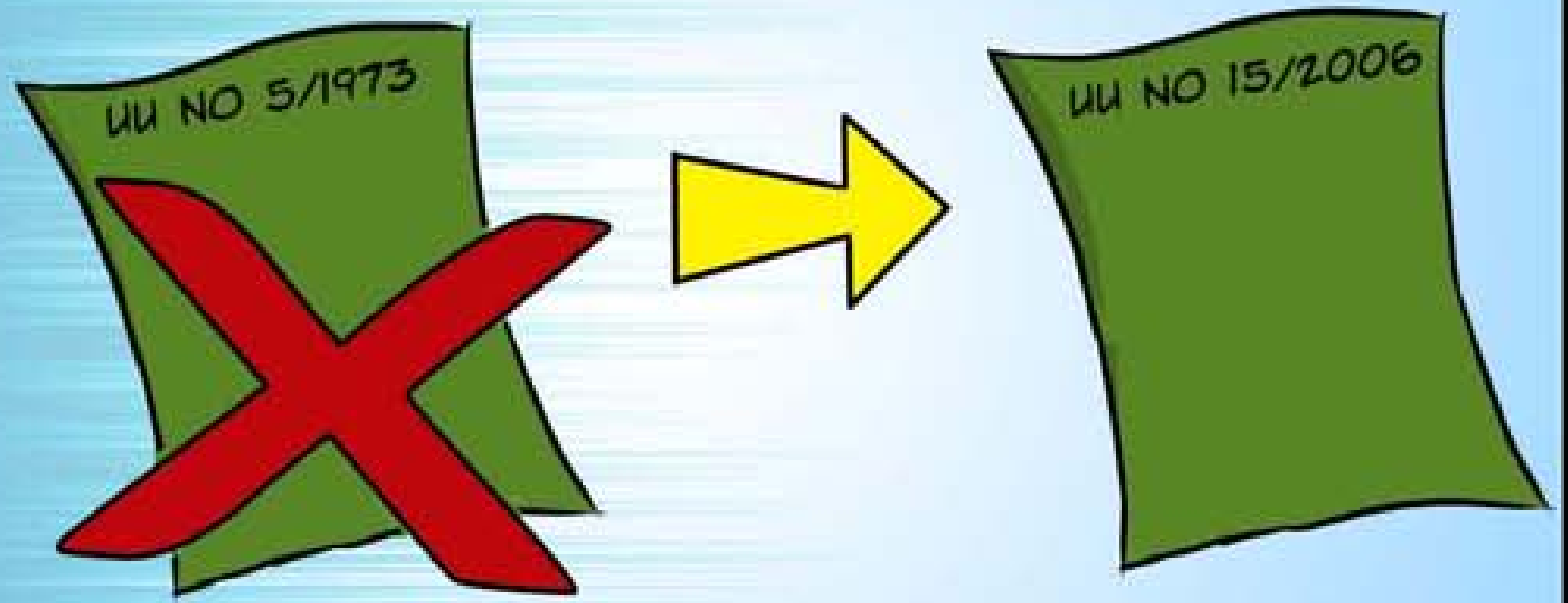
SEKARANG
FUNGSI BPK JADI
SEMAKIN PENTING DALAM
MEMERIKSA KEUANGAN
NEGARA ?

BENAR SEKALI.
KARENA BPK KINI JUGA
WAJIB MEMERIKSA BAGAIMANA
PEMERINTAH DAN LEMBAGA
NEGARA LAINNYA MENGELOLA
KEUANGAN YANG DIPERCAYAKAN
KEPADA MEREKA





UU NO.15/2006
MENYEMPURNAKAN
UU NO. 5/1973
YANG DIANGGAP
SUDAH TIDAK
SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN
SISTEM
KETATANEGARAAN



DALAM UU NO. 15/2006 SECARA JELAS DIKATAKAN BAHWA BPK HARUS
BERPOSISI SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA YANG BEBAS, MANDIRI
DAN PROFESIONAL

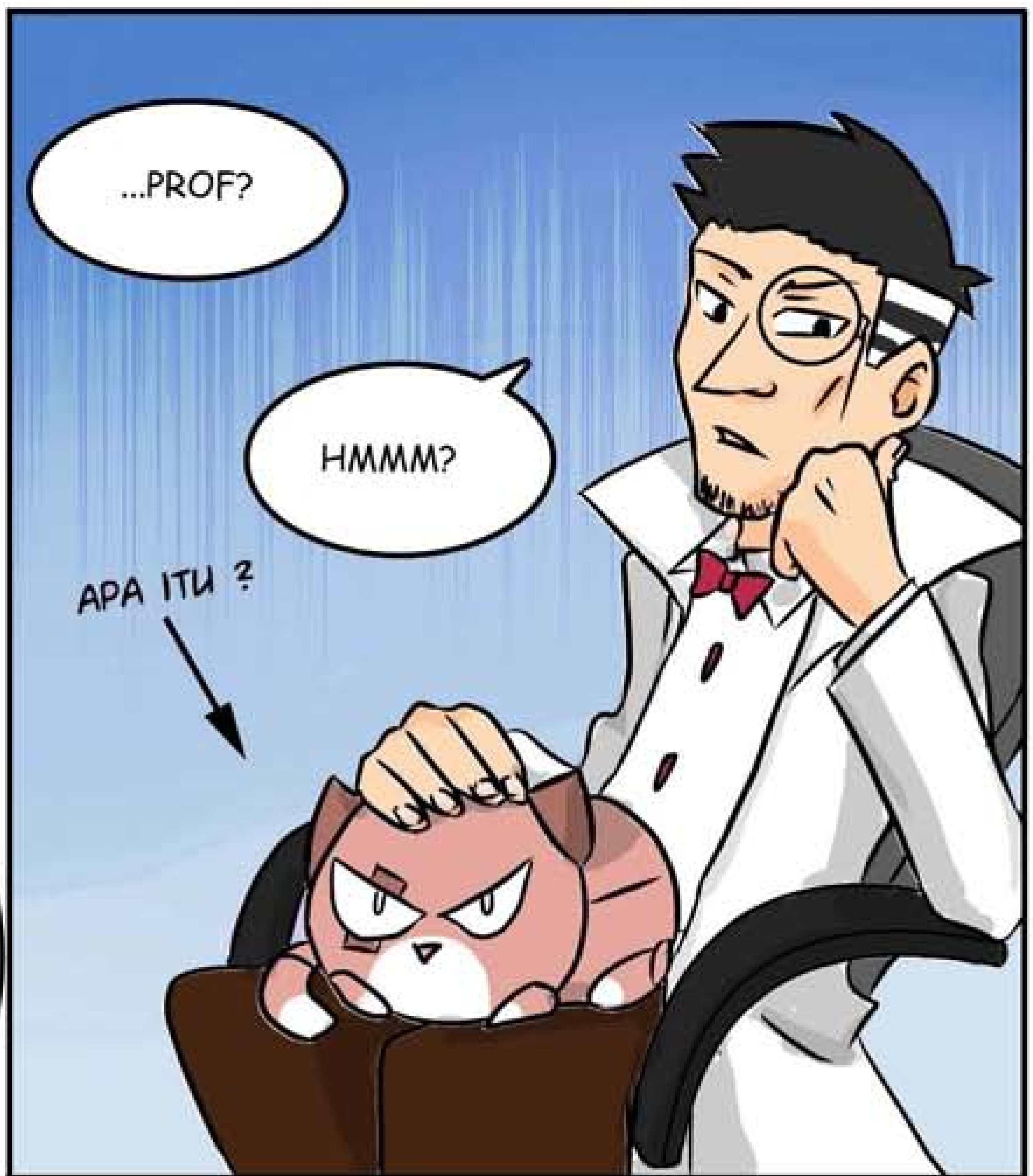
INI SANGAT DIPERLUKAN UNTUK MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME



JADI UANG
NEGARA
HARUS DIGUNAKAN
DENGAN BAIK YA?

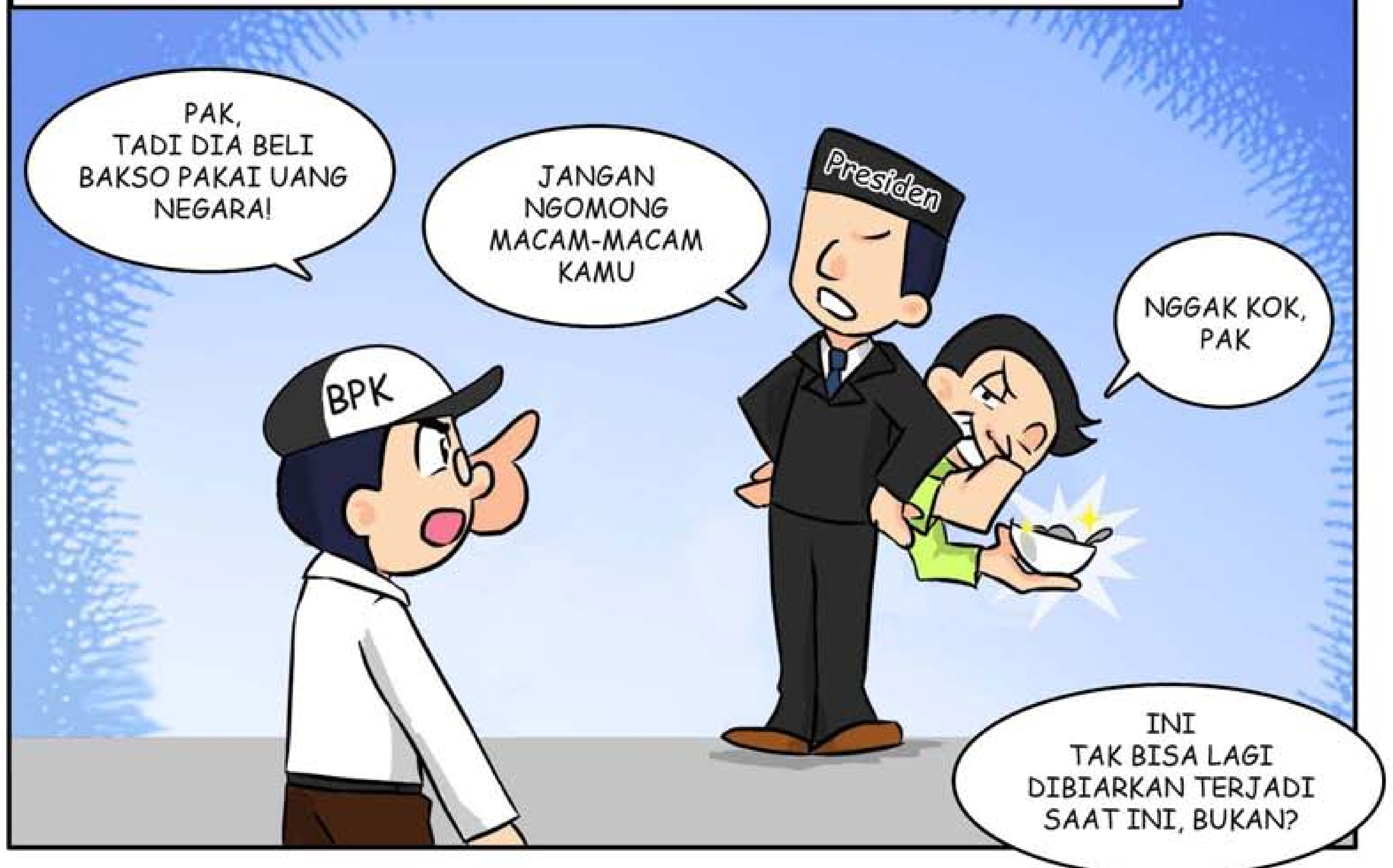
IYA.
SELAIN TIDAK
BOLEH DIKORUPSI
JUGA HARUS
BERMANFAAT

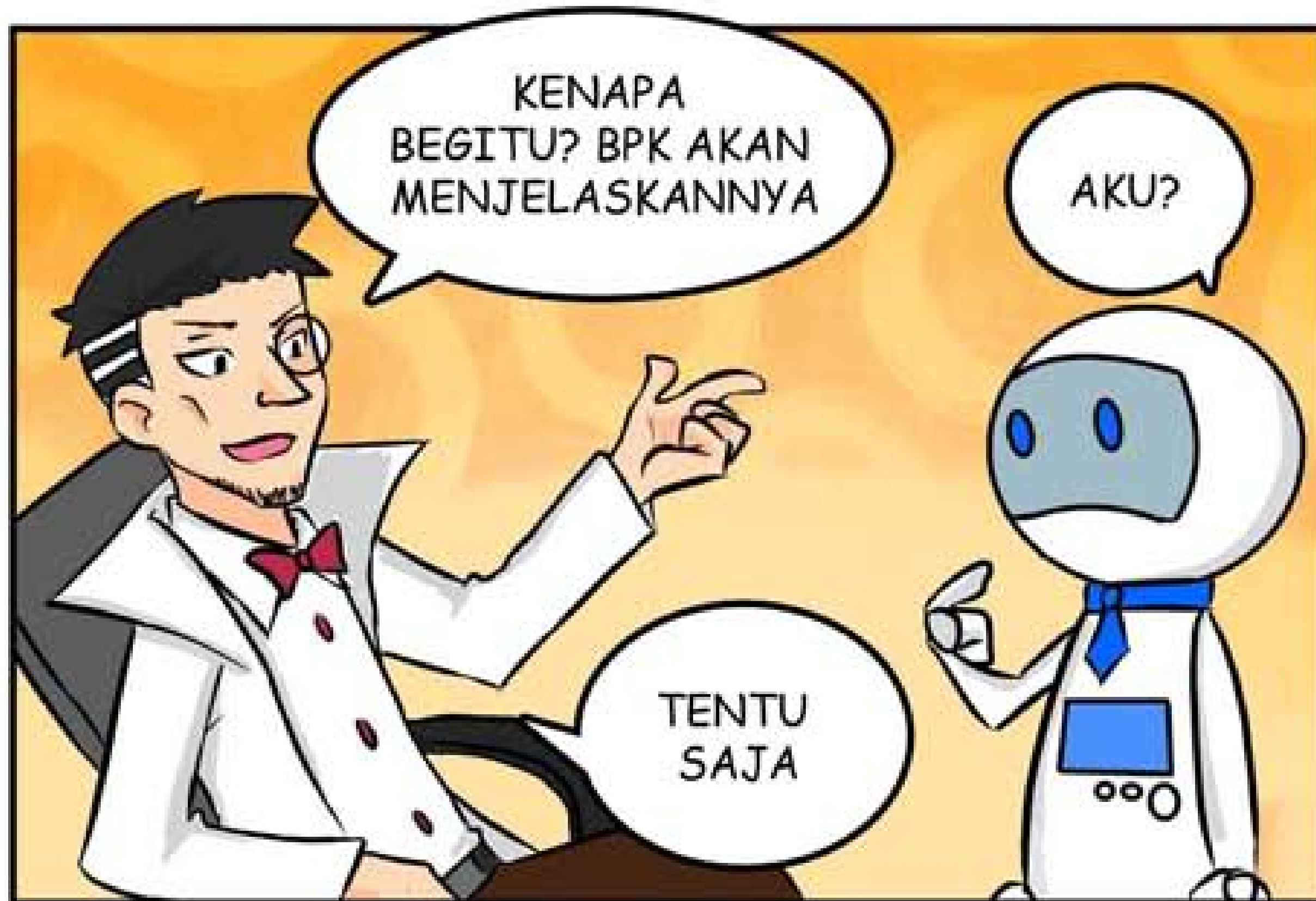






PRESIDEN BISA SAJA MEMERINTAHKAN ATAU MELARANG BPK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN AGAR CITRA PEMERINTAH TERANGKAT ATAU MENCEGAH TERUNGKAPNYA BERAGAM BENTUK KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT NEGARA



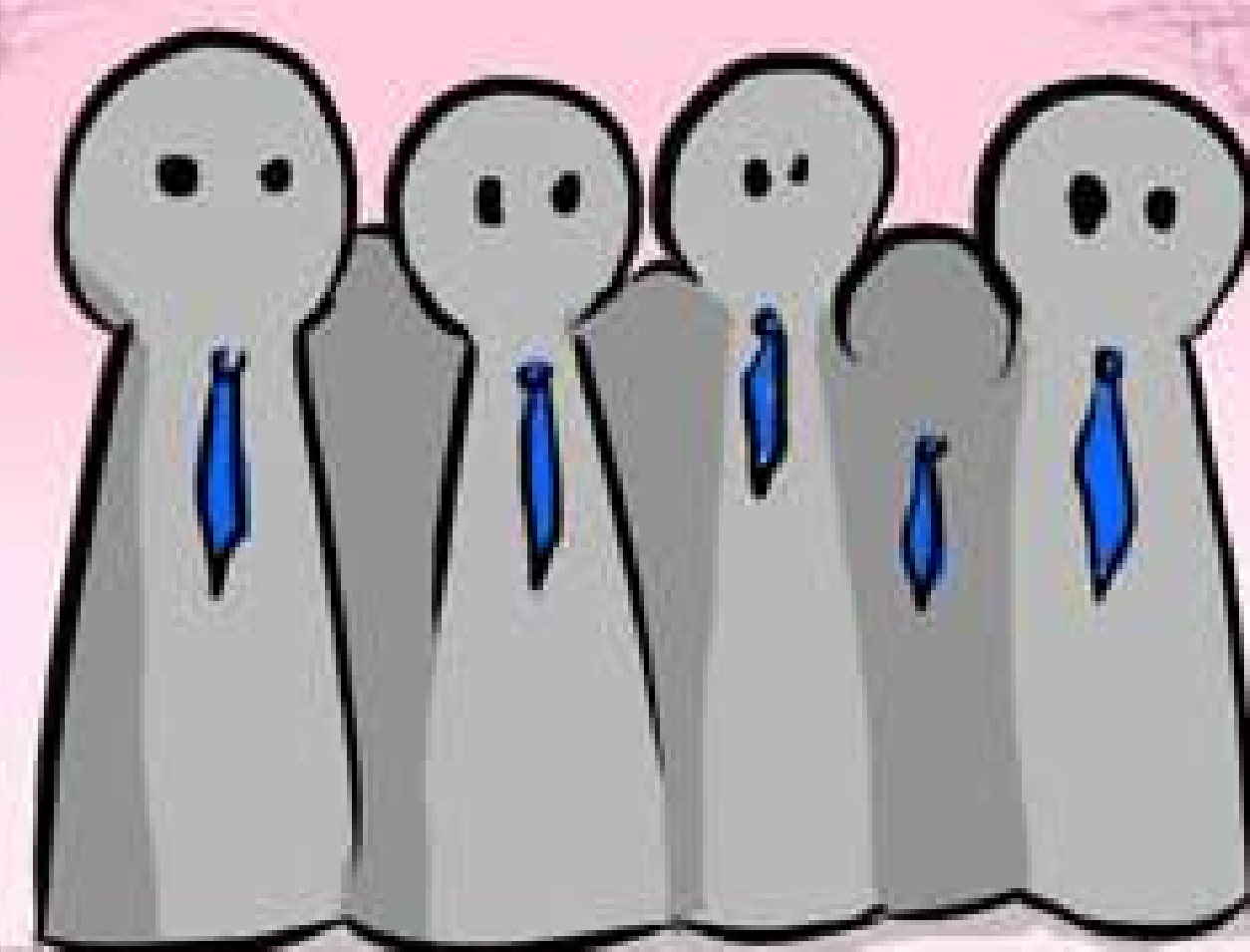


BILA BPK BERADA DI BAWAH KENDALI PRESIDEN, RUANG GERAK BPK UNTUK MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA AKAN TERBATAS



DI SISI LAIN, LEMBAGA INI JUGA BUKANLAH LEMBAGA YANG BERDIRI DI ATAS PEMERINTAH

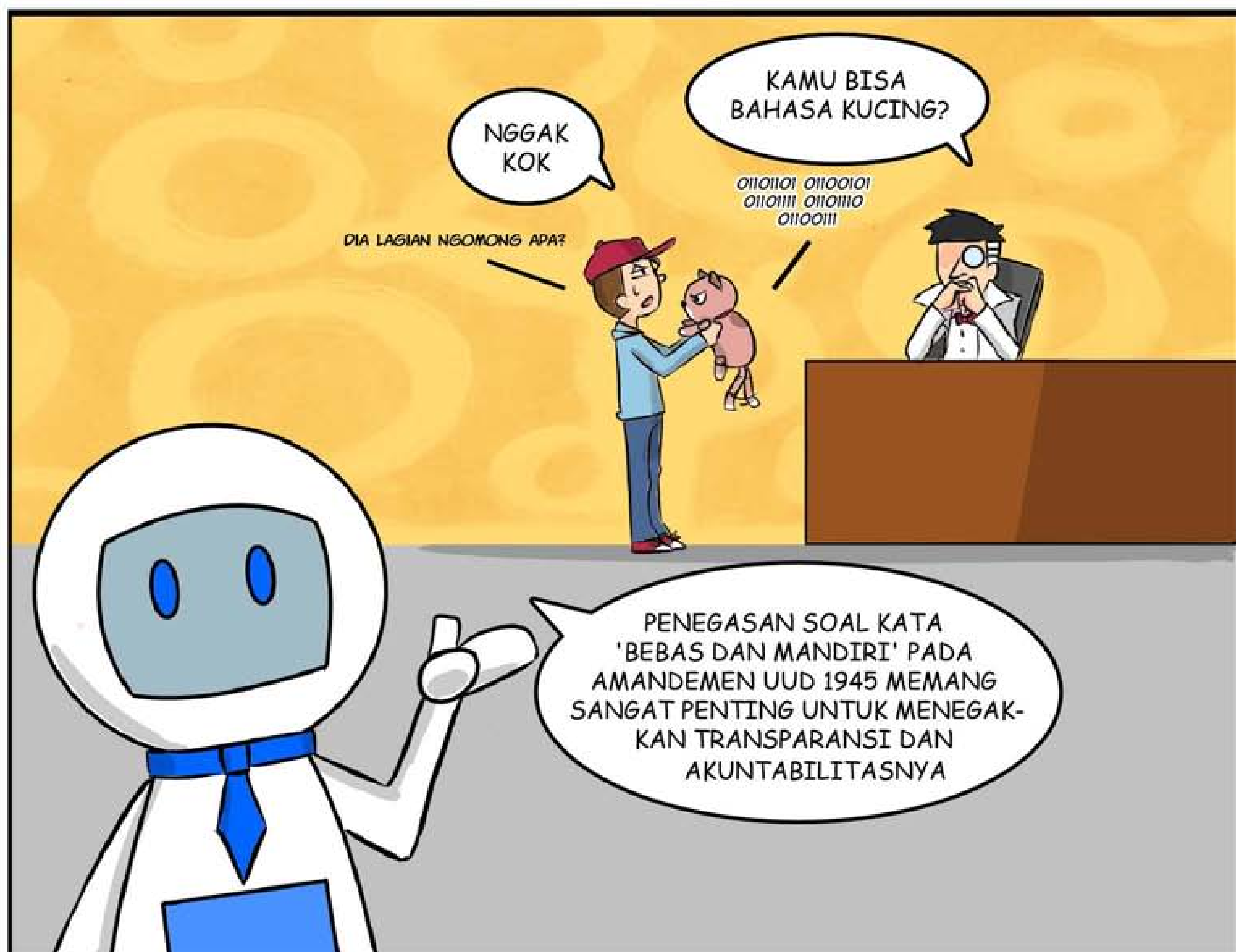
BPK ADALAH LEMBAGA YANG BERDIRI TERPISAH DARI PEMERINTAH. TIDAK ADA HUBUNGAN ATASAN-BAWAHAN DI ANTARA KEDUANYA



PEMERINTAH



BPK



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA ADALAH PRASYARAT PENTING UNTUK MENEGAKKAN GOOD GOVERNANCE YANG MERUPAKAN LANDASAN UTAMA DEMOKRASI YANG BEBAS KKN

TRANSPARANSI

YAITU MEMBERIKAN INFORMASI KEUANGAN YANG TERBUKA DAN JUJUR KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERTIMBANGAN BAHWA MASYARAKAT MEMILIKI HAK UNTUK MENGETAHUI SECARA TERBUKA DAN MENYELURUH ATAS PERTANGGUNG-JAWABAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA YANG DIPERCAYAKAN KEPADANYA DAN KETAATANNYA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

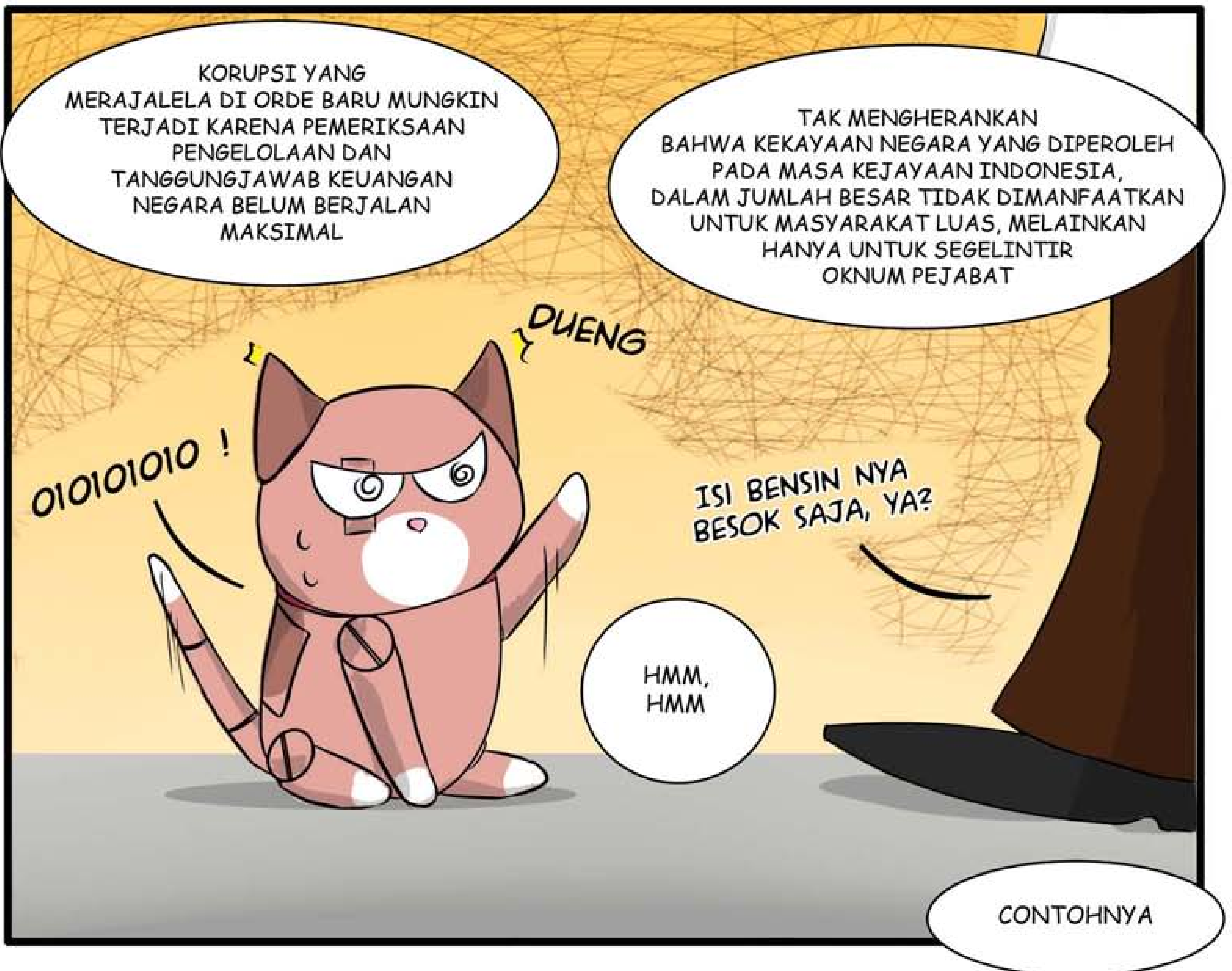


AKUNTABILITAS

YAITU MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA SERTA PELAKSANAAN KEBIJAKAN YANG DIPERCAYAKAN KEPADA ENTITAS PELAPORAN DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN SECARA PERIODIK

KARENA ITU BPK HARUS BERADA DALAM KONDISI YANG SEOPTIMAL MUNGKIN DALAM MENJALANKAN UUD 1945





PADA MASA ITU BANYAK PROYEK
PEMBANGUNAN YANG
DILAKUKAN SECARA FIKTIF

DARI ANGGARAN PEMBANGUNAN
YANG SUDAH DISEPAKATI, SEKIAN PULUH
PERSEN DIANTARANYA
DIKATEGORIKAN SEBAGAI
'BOCOR' DAN 'DIKORUPSI' UNTUK
MEMPERKAYA DIRI

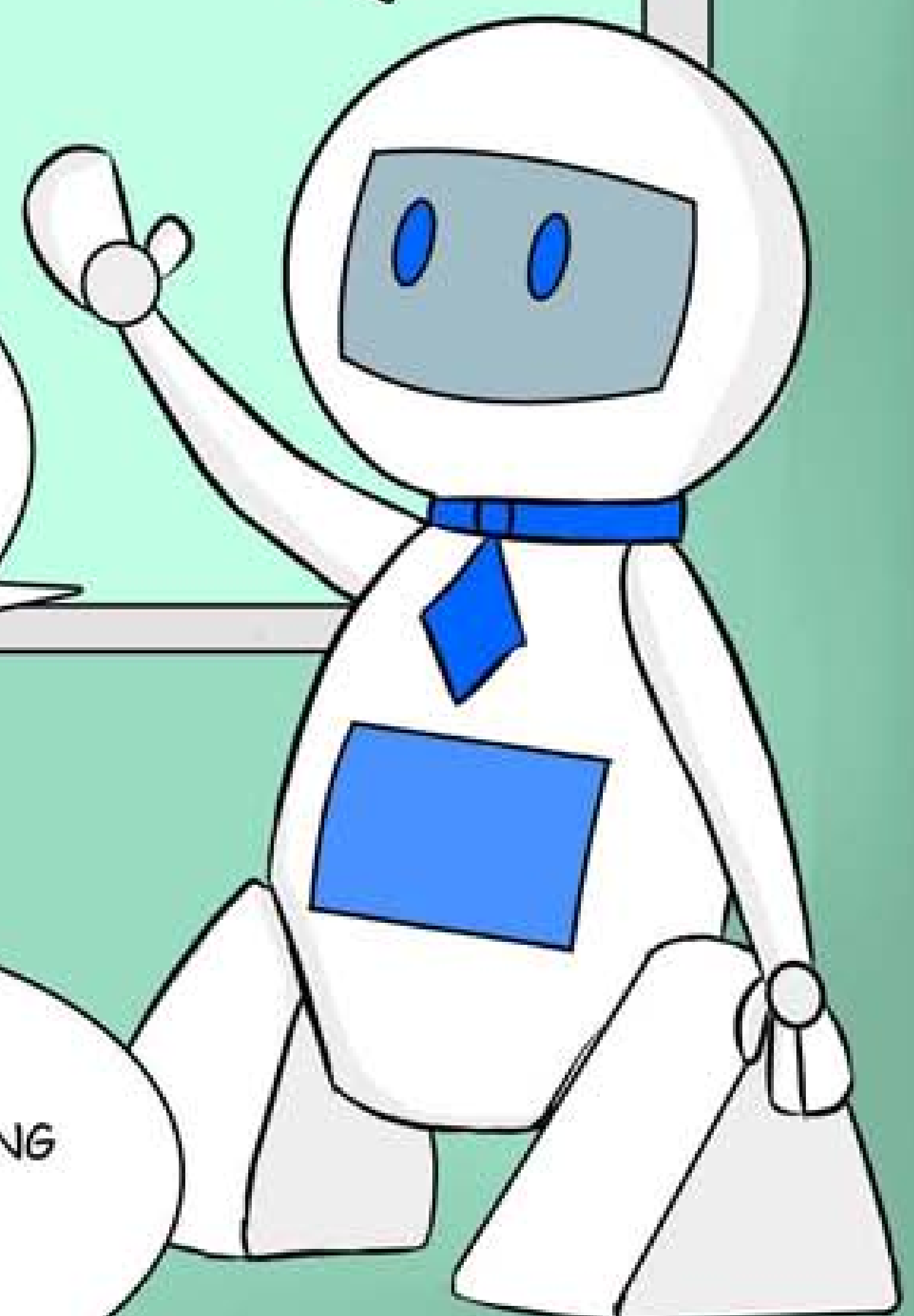
DANA PEMBANGUNAN JUGA LAZIM
MENGALIR KE PIHAK-PIHAK YANG
TIDAK SEMESTINYA. PROSES
PEMILIHAN REKANAN JUGA
DIKETAHUI SERING
DIJALANKAN SECARA TIDAK
BERTANGGUNGJAWAB, SEHINGGA
YANG TERPILIH JUSTRU BUKAN
PIHAK YANG BERKUALITAS,
NAMUN PIHAK-PIHAK YANG PALING
BANYAK MEMBERIKAN KOMISI

- APAKAH KEGIATAN TERSEBUT MEMANG DILAKSANAKAN?
- APAKAH REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN KONTRAK?
- APAKAH ADA PENGGELEMBUNGAN BIAYA?
- APAKAH BIAYA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BERADA DALAM BATAS KEWAJARAN?
 - APAKAH ADA PENYIMPANGAN?
- APAKAH KEGIATANNYA BENAR-BENAR DIJALANKAN SECARA EFEKTIF ATAU TIDAK?
- PELAPORANNYA DILAKUKAN DENGAN BENAR ATAU TIDAK?

DALAM HAL INI,
BPK BERKEWAJIBAN AGAR
KEUANGAN NEGARA
DIKELOLA SECARA
BERTANGGUNGJAWAB

PEMERIKSAAN BISA
DILAKUKAN SETELAH PROJEK
SELESAI NAMUN BISA JUGA
SAAT PROJEK MASIH
BERJALAN

DENGAN BEGITU
NGGAK ADA LAGI UANG
NEGARA YANG
TERCECER, DEH



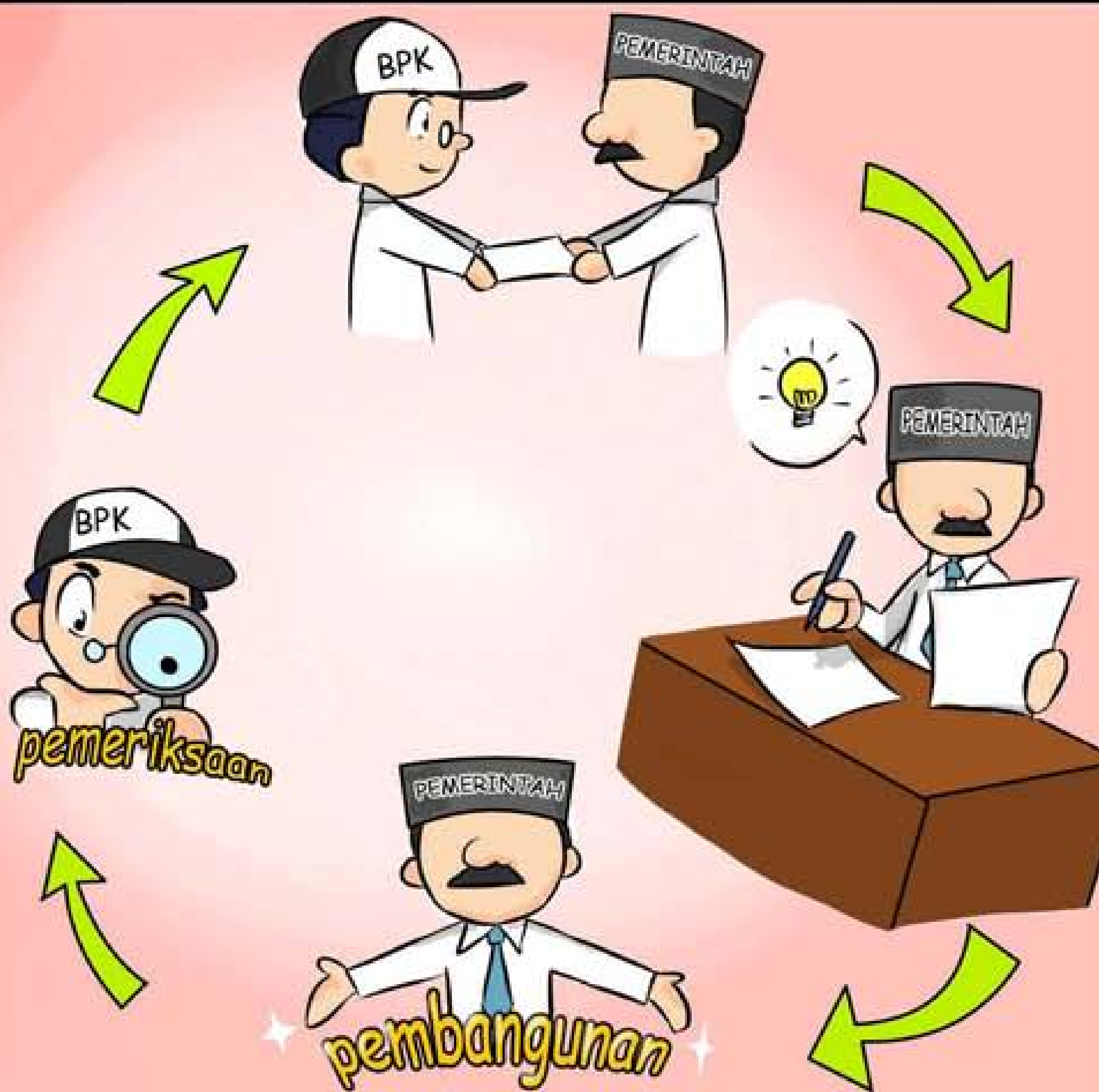
JADI SUDAH
JELASKAN?
PERAN BPK SANGAT
PENTING

haha
jadi malu

IYA BETUL.
TENTU TIDAK MUDAH
MENJALANKAN
TUGAS ITU YA

YANG TERPENTING,
KEHADIRAN BPK
DIHARAPKAN
DAPAT MENDORONG
TERWUJUDNYA
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA

DENGAN BEGITU
PEMERINTAH BISA
MELAKUKAN
PERENCANAAN DAN
MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN
DENGAN BAIK DAN
MEMPERTANGGUNG-
JAWABKANNYA
DENGAN BAIK PULA



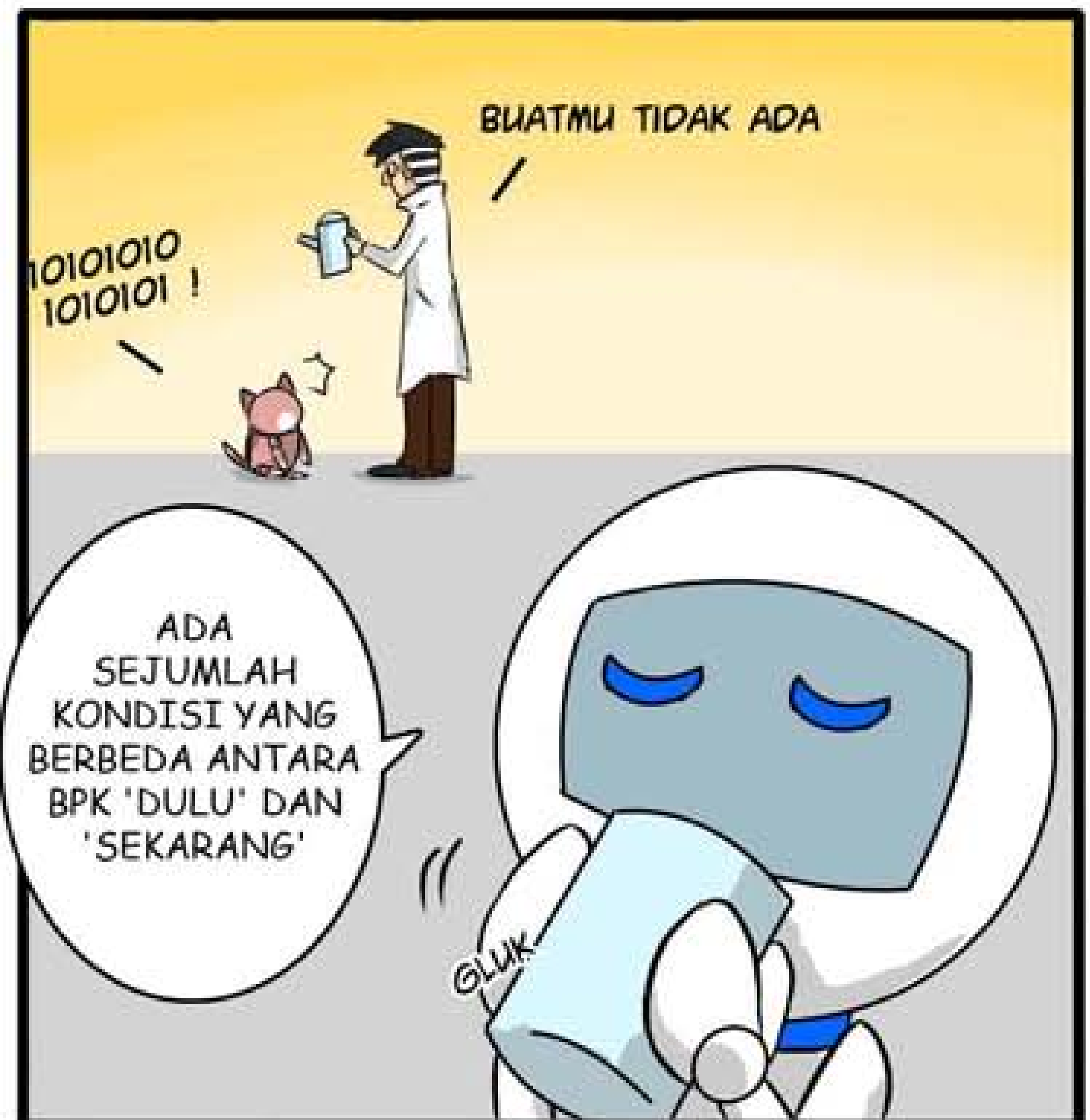
KRISIS TAHUN
1997-1998 TERJADI ANTARA
LAIN KARENA KURANGNYA
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS, LOH

WAH...

Global Market

BUMN

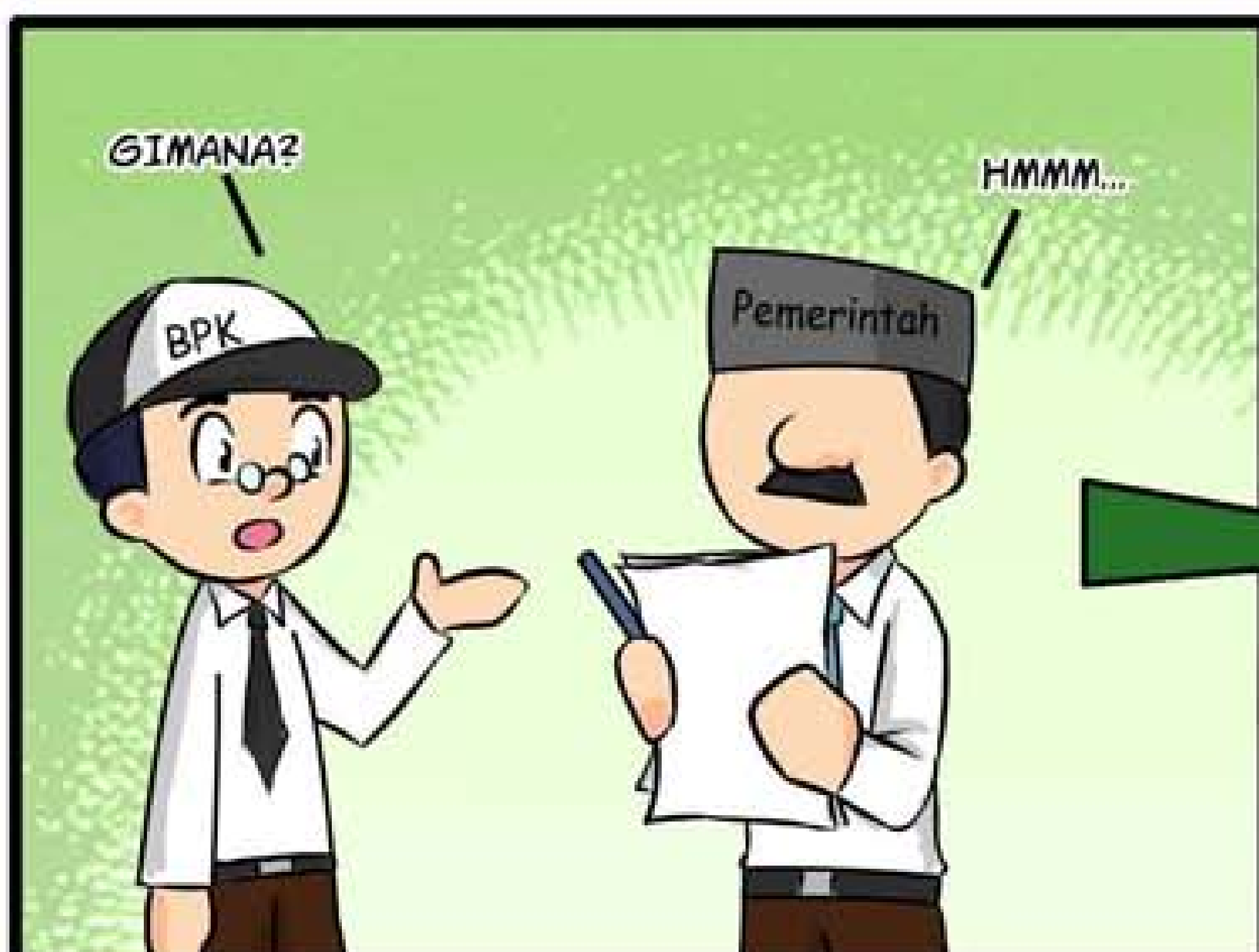
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS INI JUGA AKAN
MENDORONG PENINGKATAN KINERJA BUMN DAN BUMD
SEHINGGA MAMPU BERSAING DI PASAR GLOBAL



DULU:
BPK DIANGKAT OLEH PRESIDEN ATAS USUL
DPR, TERMASUK PENUNJUKAN PIMPINANNYA



SEKARANG:
ANGGOTA BPK DIPILIH OLEH DPR
DAN DISAHKAN OLEH PRESIDEN



DULU:
LAPORAN PEMERIKSAAN BPK
DIKONSULTASIKAN DENGAN PEMERINTAH
SEBELUM DISERAHKAN KE DPR



SEKARANG:
LAPORAN PEMERIKSAAN DISAMPAIKAN
LANGSUNG KE DPR

DULU:

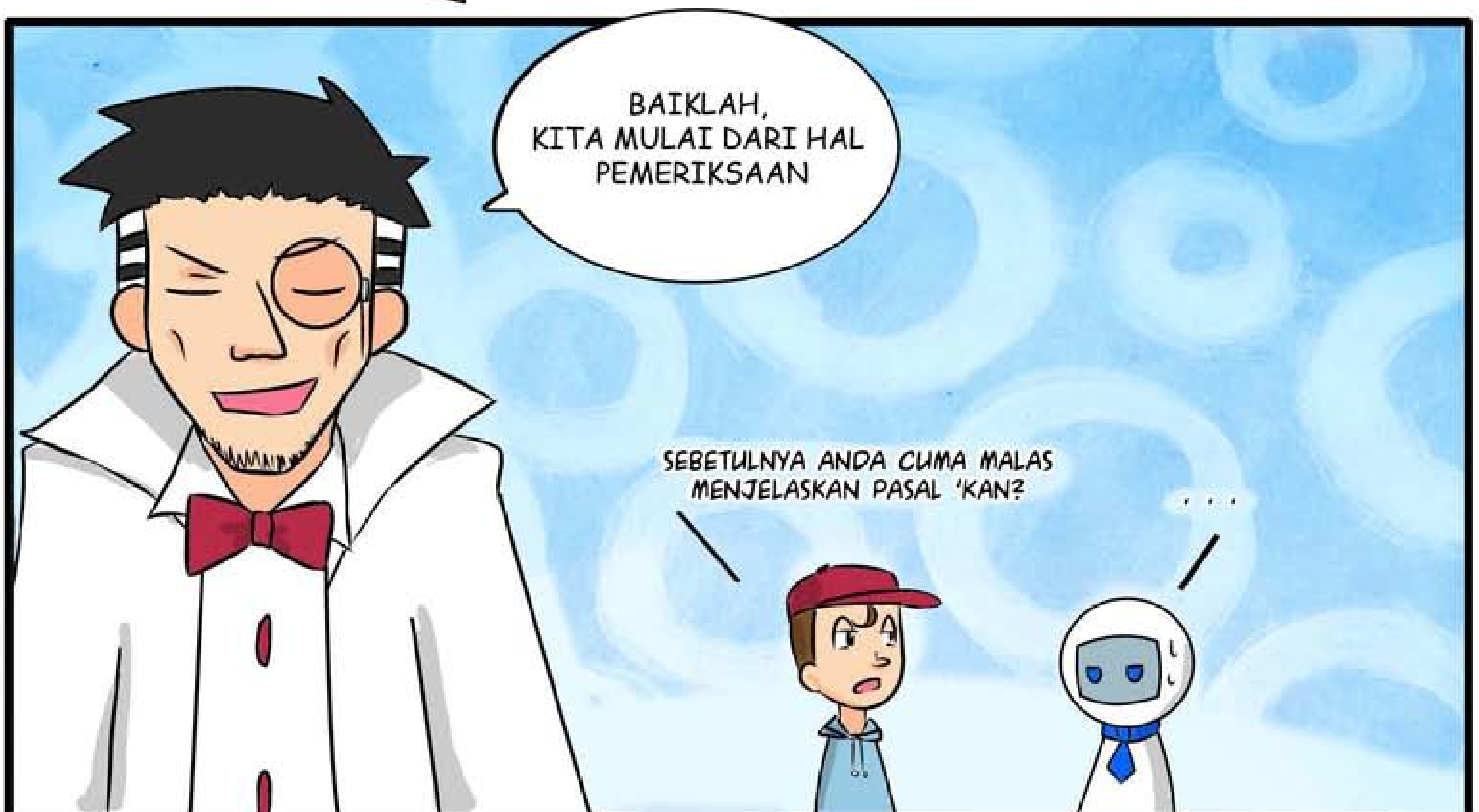
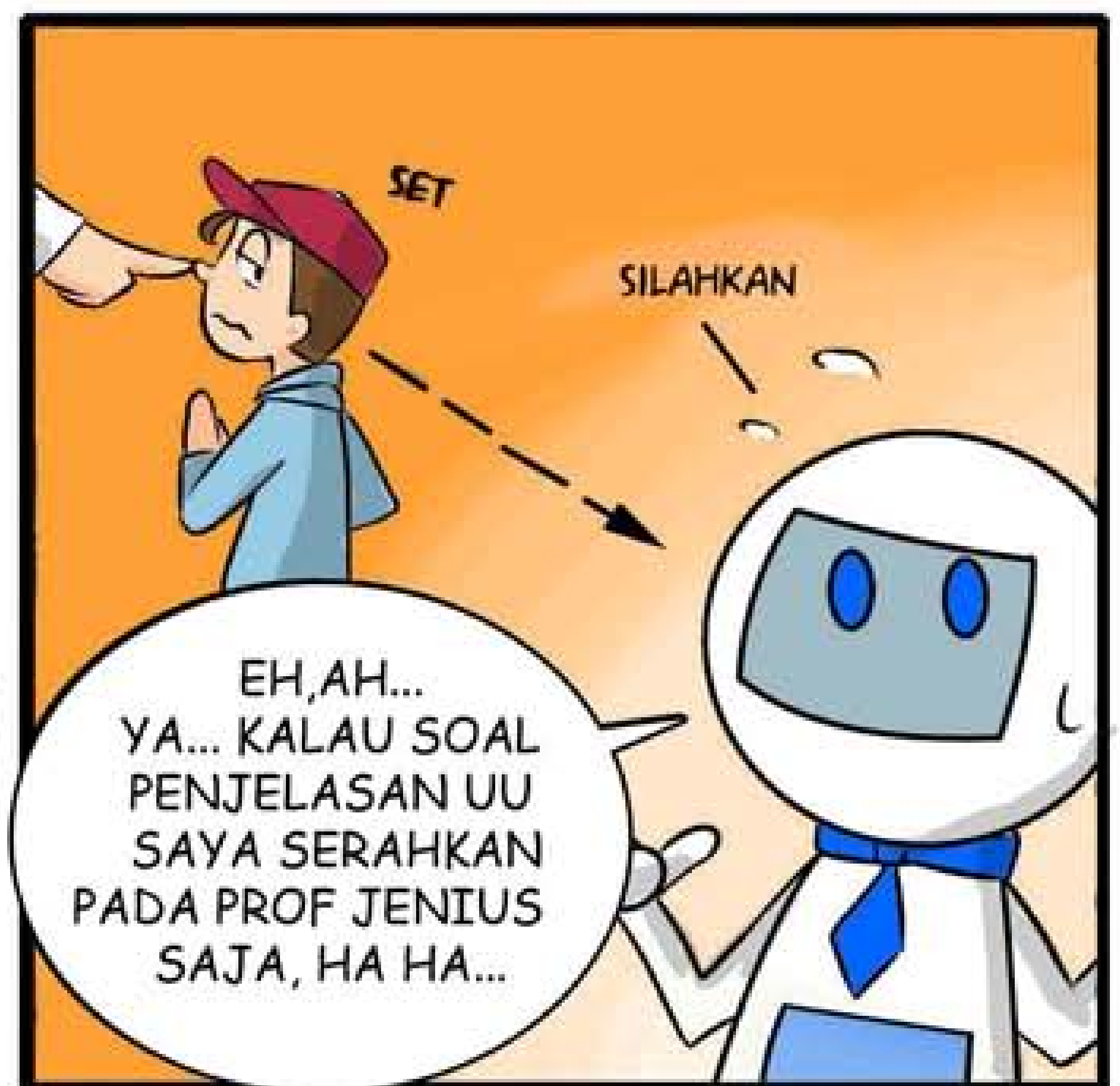
BILA DITEMUKAN
TINDAK KRIMINAL,
DILAPORKAN DULU
KE PEMERINTAH



SEKARANG:

LANGSUNG
DILAPORKAN KE
POLISI, KEJAKSAAN
DARI KPE





UU NO.15/2004 DAN UU NO. 15/2006 SECARA TEGAS MENETAPKAN INDEPENDENSI BPK DALAM HAL PEMERIKSAAN YANG DIWUJUDKAN DALAM TAHAP-TAHAP PEMERIKSAAN BPK

"PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PENENTUAN WAKTU DAN METODE PEMERIKSAAN, SERTA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN PEMERIKSAAN DILAKUKAN SECARA BEBAS DAN MANDIRI OLEH BPK"

TAHAP PERENCANAAN, MENCAKUP KEBEBASAN MERUMUSKAN STRATEGI, PRIORITAS DAN OBJEK PEMERIKSAAN



TAHAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, MENCAKUP KEBEBASAN MELAKUKAN PROSEDUR PEMERIKSAAN, MEMPEROLEH AKSES INFORMASI DAN MENGUMPULKAN BUKTI PEMERIKSAAN

SAYA HANYA PERLU DENGAN YANG SAYA INGINKAN

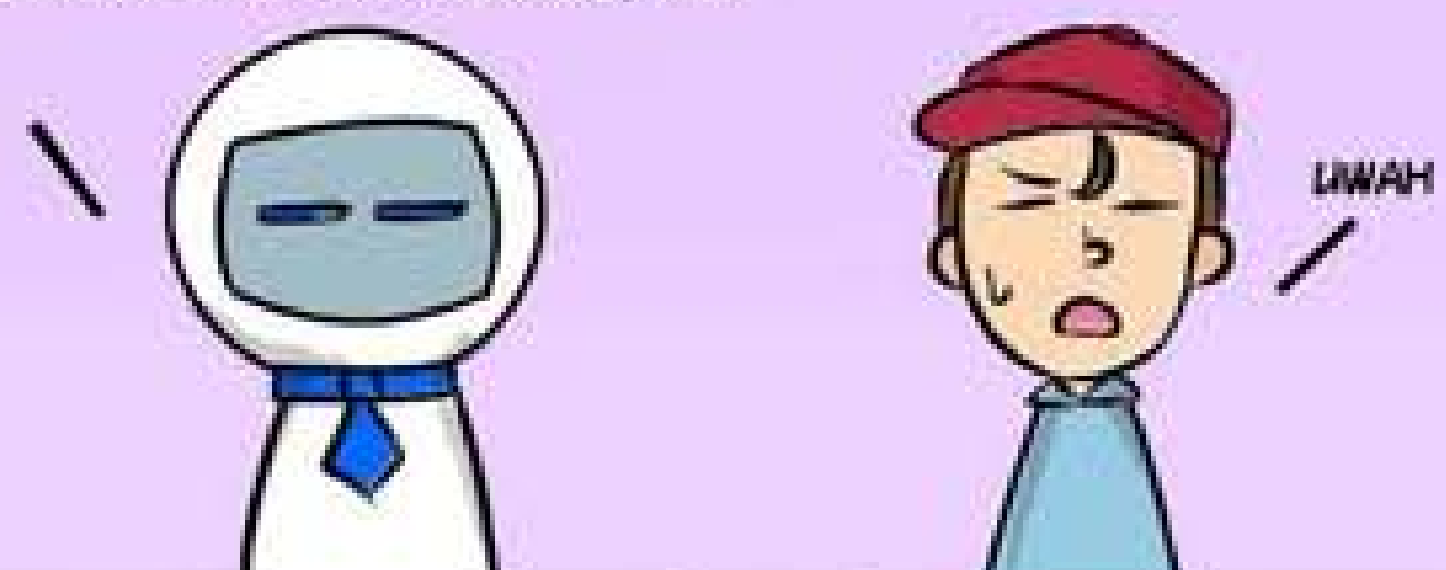


TAHAP PELAPORAN, MENCAKUP KEBEBASAN MENENTUKAN ISI DAN WAKTU PENYERAHAN LAPORAN PEMERIKSAAN, SERTA UNTUK MEMPUBLIKASIKANNYA



DARI TADI SAYA SUDAH MENJELASKAN BAHWA BPK 'MEMERIKSA' KEUANGAN NEGARA, TAPI SEBETULNYA APA YANG DIPERIKSA BPK? MARI KITA LIHAT!

ORANGNYA JUGA KELIHATANNYA SENANG, KOK BIARIN AJA

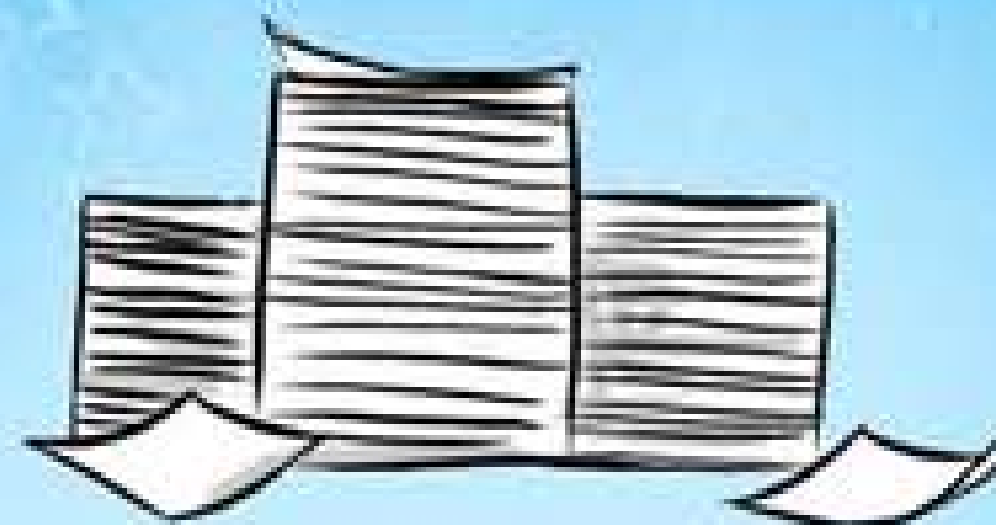




TEMUAN YANG DIHASILKAN
DITUANGKAN DALAM LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK, TIDAK BOLEH
DIDIAMKAN SAJA



DI MASA LALU UU MEMANG TIDAK
MENGATUR TINDAK LANJUT TEMUAN,
TAPI SEKARANG UU MENYATAKAN
BAHWA TEMUAN TERSEBUT HARUS
DITINDAK LANJUTI OLEH PEJABAT
NEGARA DAN PELAKSANAANNYA
DIPANTAU DAN DILAPORKAN KEPADA BPK



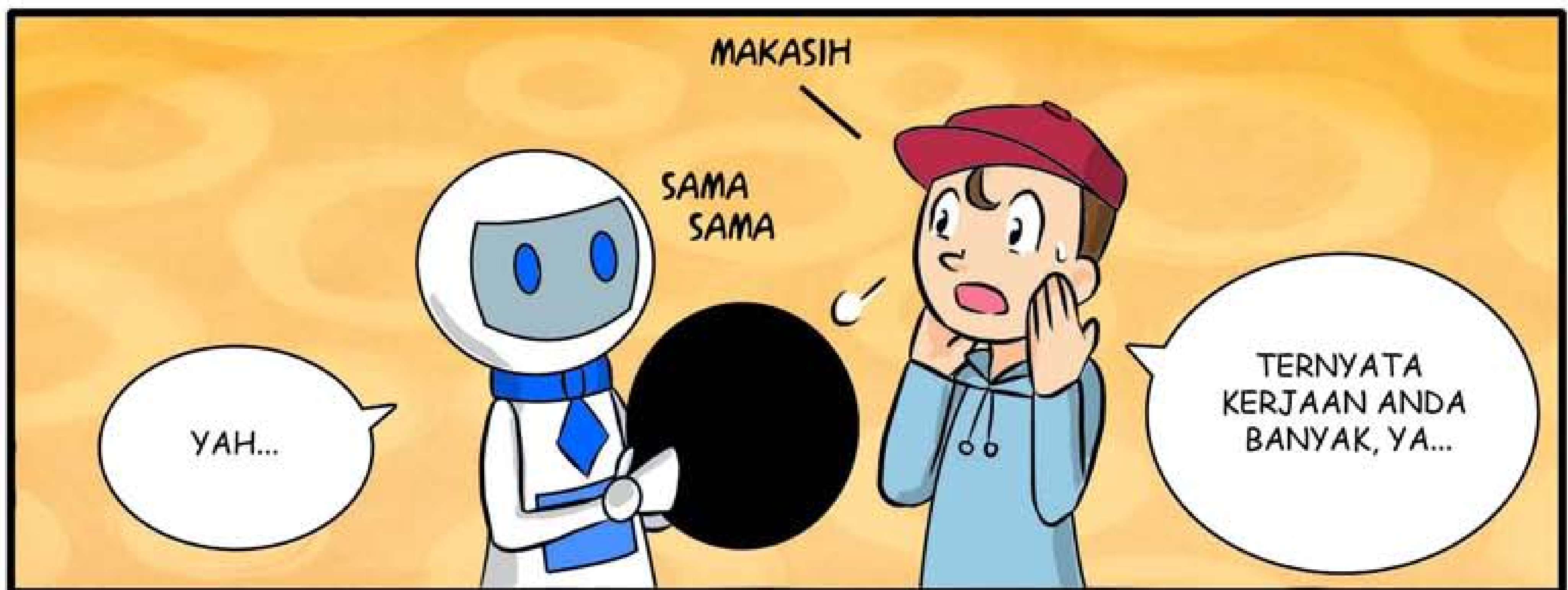
SAYA LAPORKAN KE POLISI LOH

MEREKA YANG TIDAK
MELAKSANAKAN TINDAK
LANJUT DIANCAM DENGAN
SANKSI PIDANA MAKSIMUM
1,5 TAHUN PENJARA DAN
ATAU DENDA RP. 500 JUTA

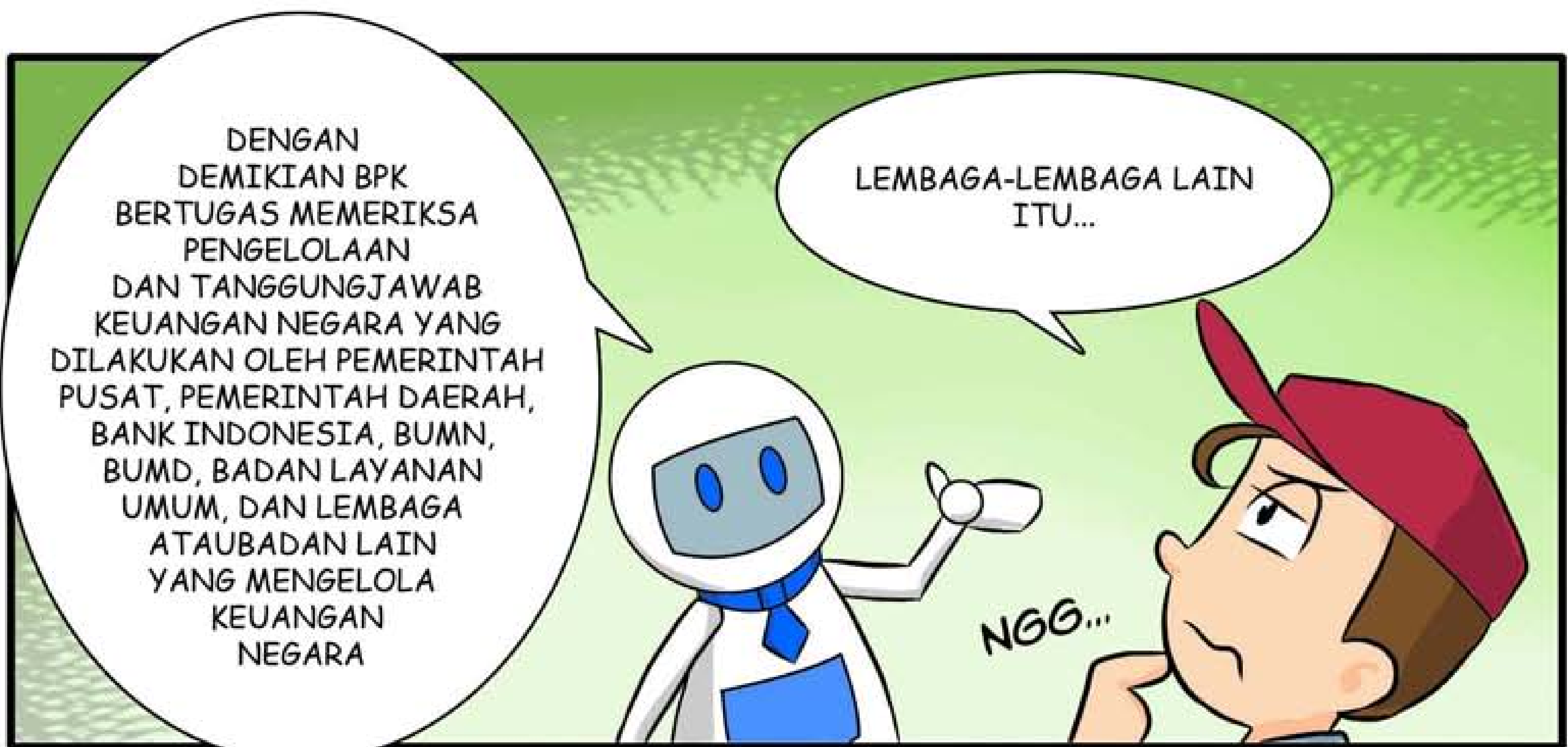


WUGH

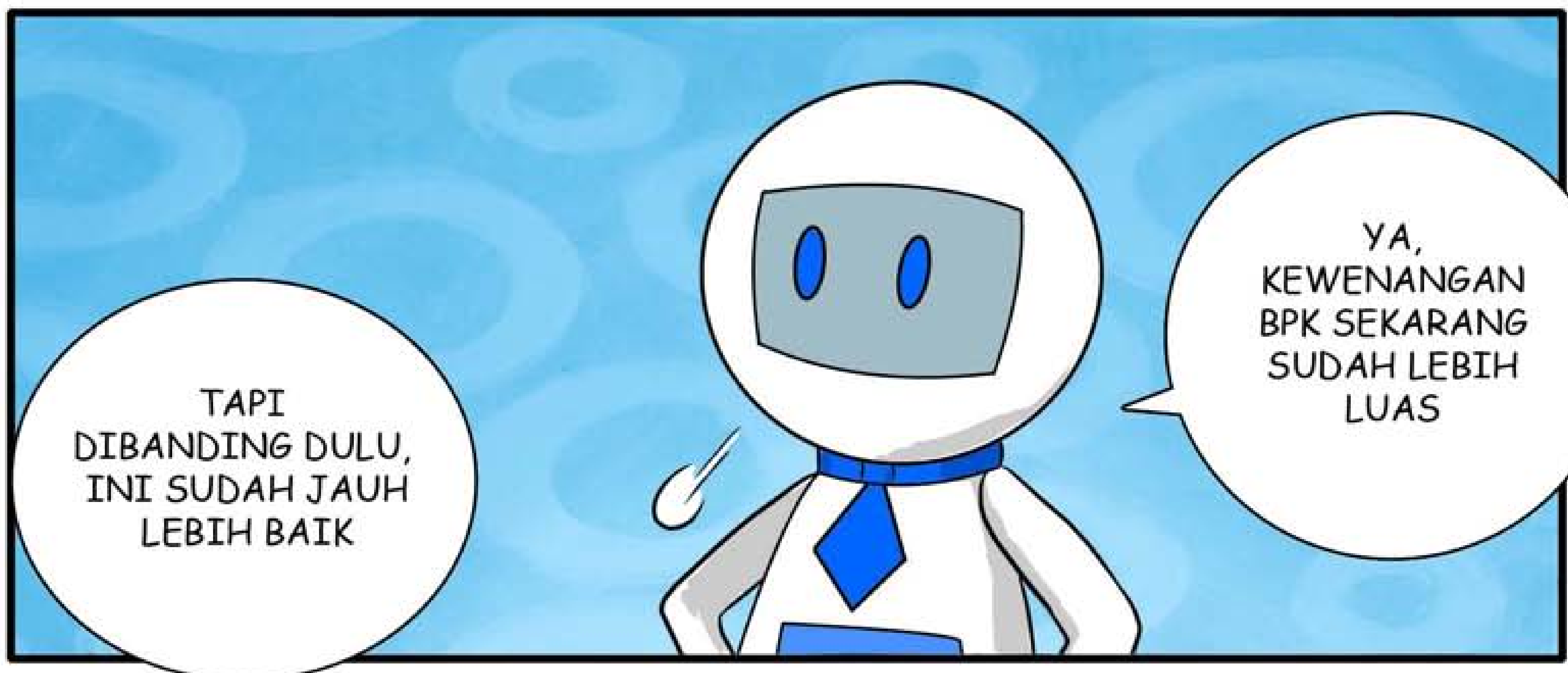




BPK MEMERIKSA SELURUH KEUANGAN NEGARA, TERMASUK PENERIMAAN PAJAK DAN NON-PAJAK, SELURUH ASET DAN UTANG-PIUTANG NEGARA, DAN JUGA PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA







DULU:

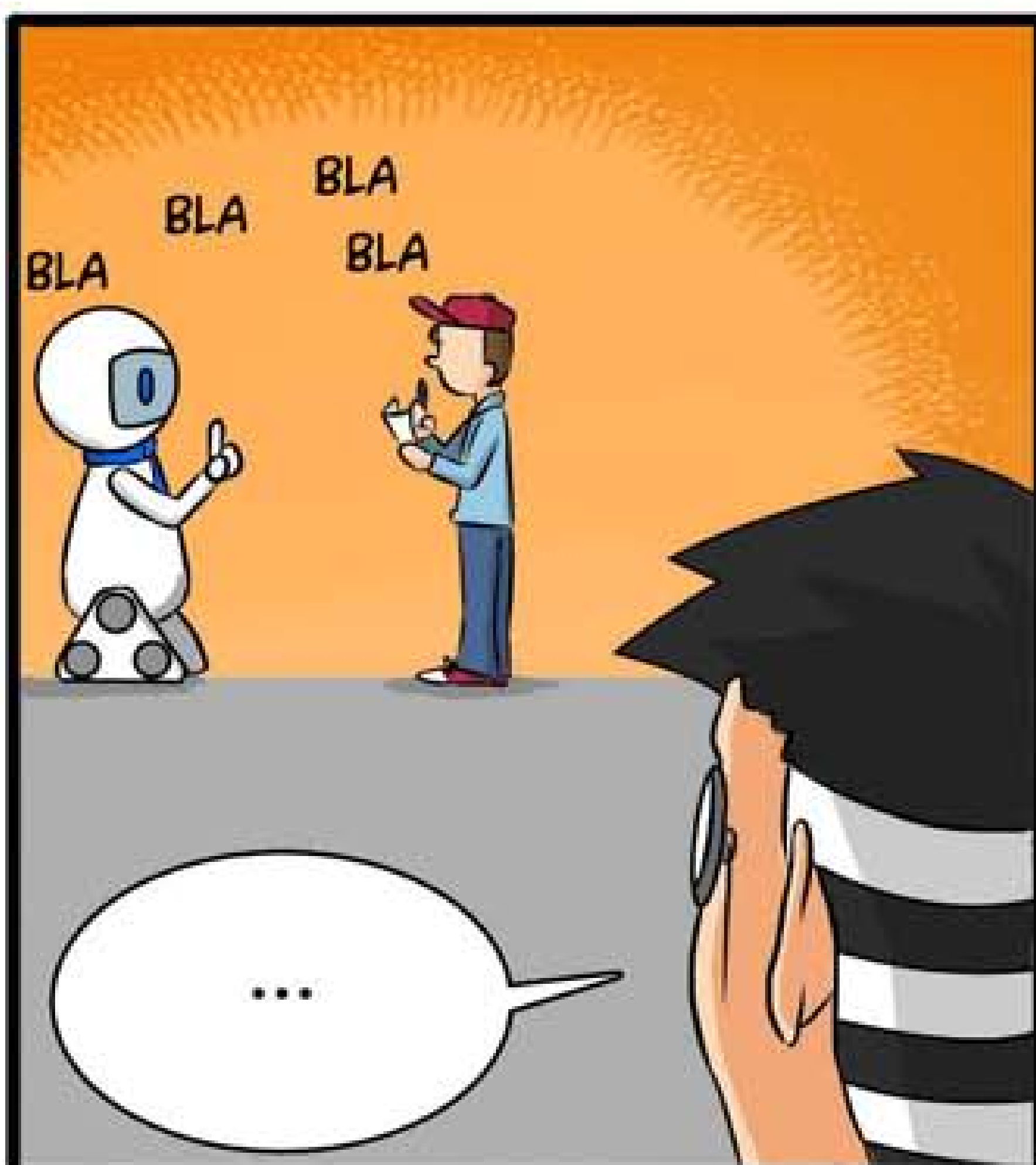
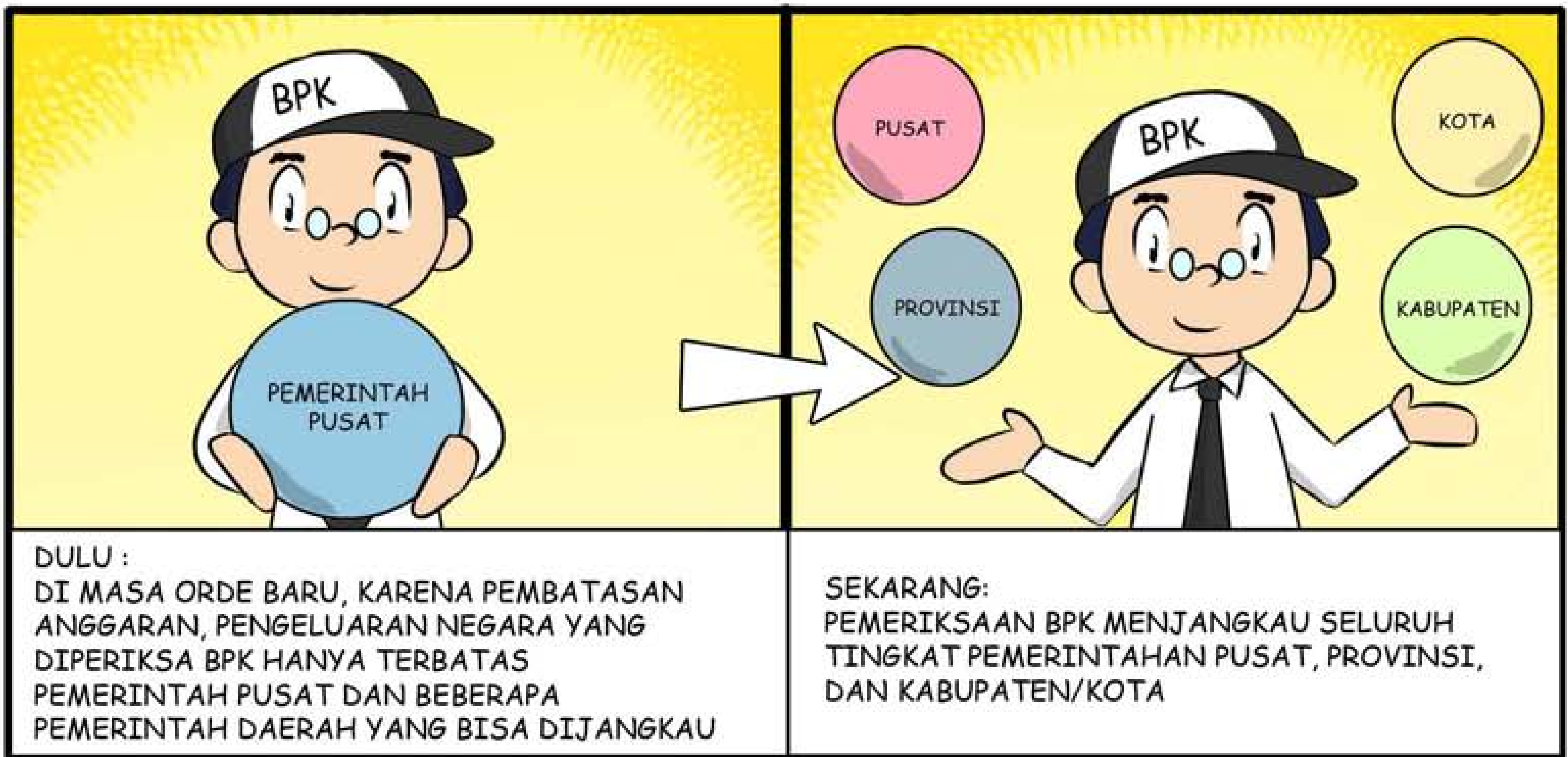
DI MASA ORDE BARU,
BPK TIDAK SEPENUHNYA
MEMERIKSA
PENERIMAAN NEGARA



SEKARANG:

BPK JUGA MELAKUKAN
PEMERIKSAAN
PENERIMAAN NEGARA
SEPERTI MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KONTRAK
PERTAMBANGAN,
TERMASUK MIGAS
DAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK









PERTAMA, PEMERIKSAAN KEUANGAN ADALAH PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN. PEMERIKSAAN KEUANGAN BERTUJUAN MEMBERIKAN KEYAKINAN YANG MEMADAI (REASONABLE ASSURANCE) APAKAH LAPORAN KEUANGAN TELAH DISAJIKAN SECARA WAJAR, DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL SESUAI DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA ATAU BASIS AKUNTANSI KOMPREHENSIF SELAIN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA



KEDUA, PEMERIKSAAN KINERJA ADALAH PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG TERDIRI DARI PEMERIKSAAN ASPEK EKONOMI DAN EFISIENSI SERTA PEMERIKSAAN EFEKTIVITAS.



EKONOMIS:
MINIMALISASI BIAYA SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN DALAM SUATU KEGIATAN DENGAN TETAP MENGINDAHKAN MUTU

EFISIEN:
OPTIMALISASI SUMBER DAYA UNTUK MEMENUHI TUJUAN ORGANISASI

EFEKTIF:
MERUJUK PADA PENILAIAN TENTANG AKIBAT ATAU DAMPAK KINERJA PADA TUJUAN DAN SASARAN YANG DITETAPKAN

KRITERIA EKONOMIS, EFISIEN DAN EFEKTIF ADALAH...



KETIGA, PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN KESIMPULAN
ATAS SUATU HAL YANG DIPERIKSA

KELIHATANNYA ADA YANG ANEH...
PERIKSA LEBIH LANJUT, DEH

OHO



LUMAYAN
JUGA
PENJELA-
SANMU...



UNTUK
SESEORANG YANG
NYONTEK

*PAPAN
CONTEKAN

KETAHULAN?

DEG

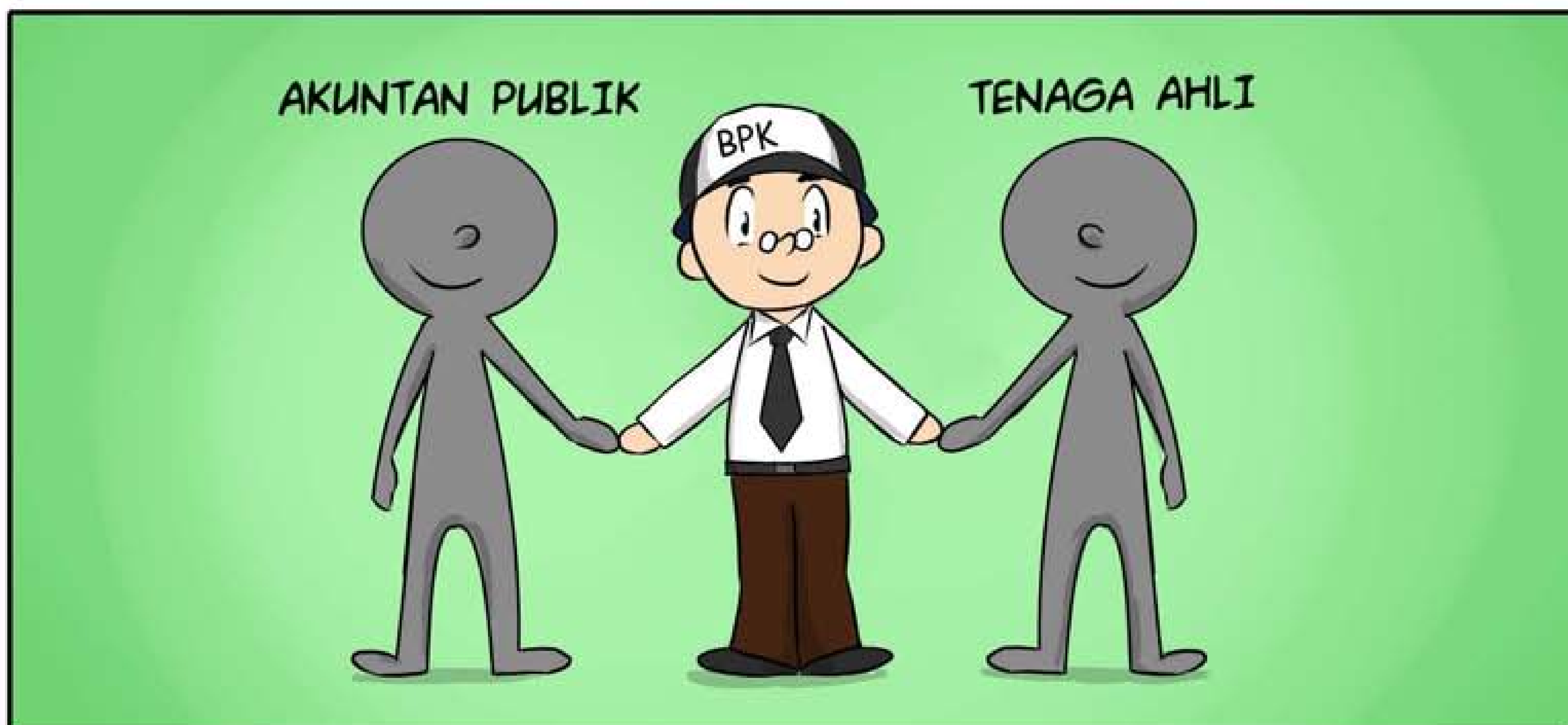
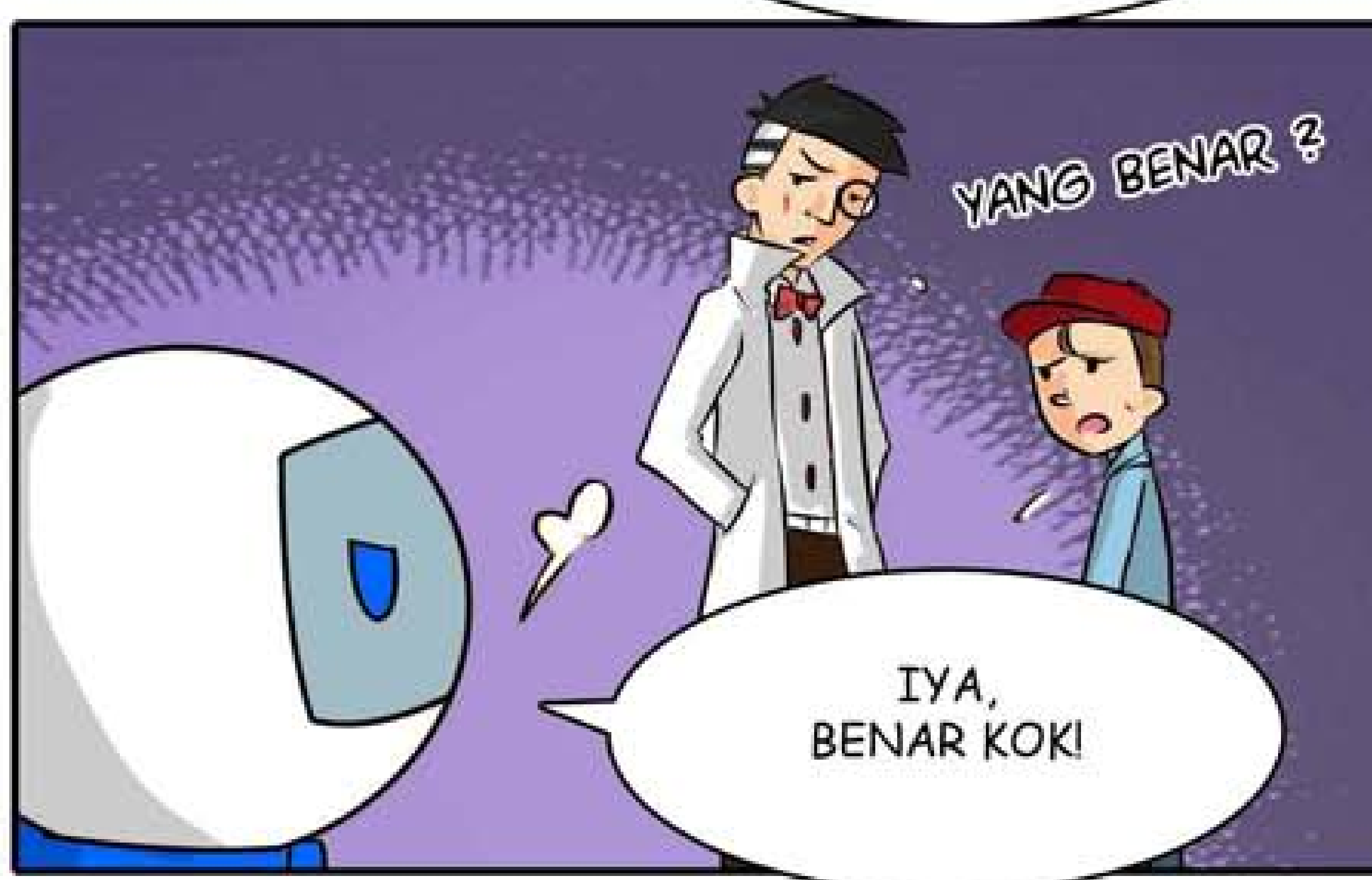
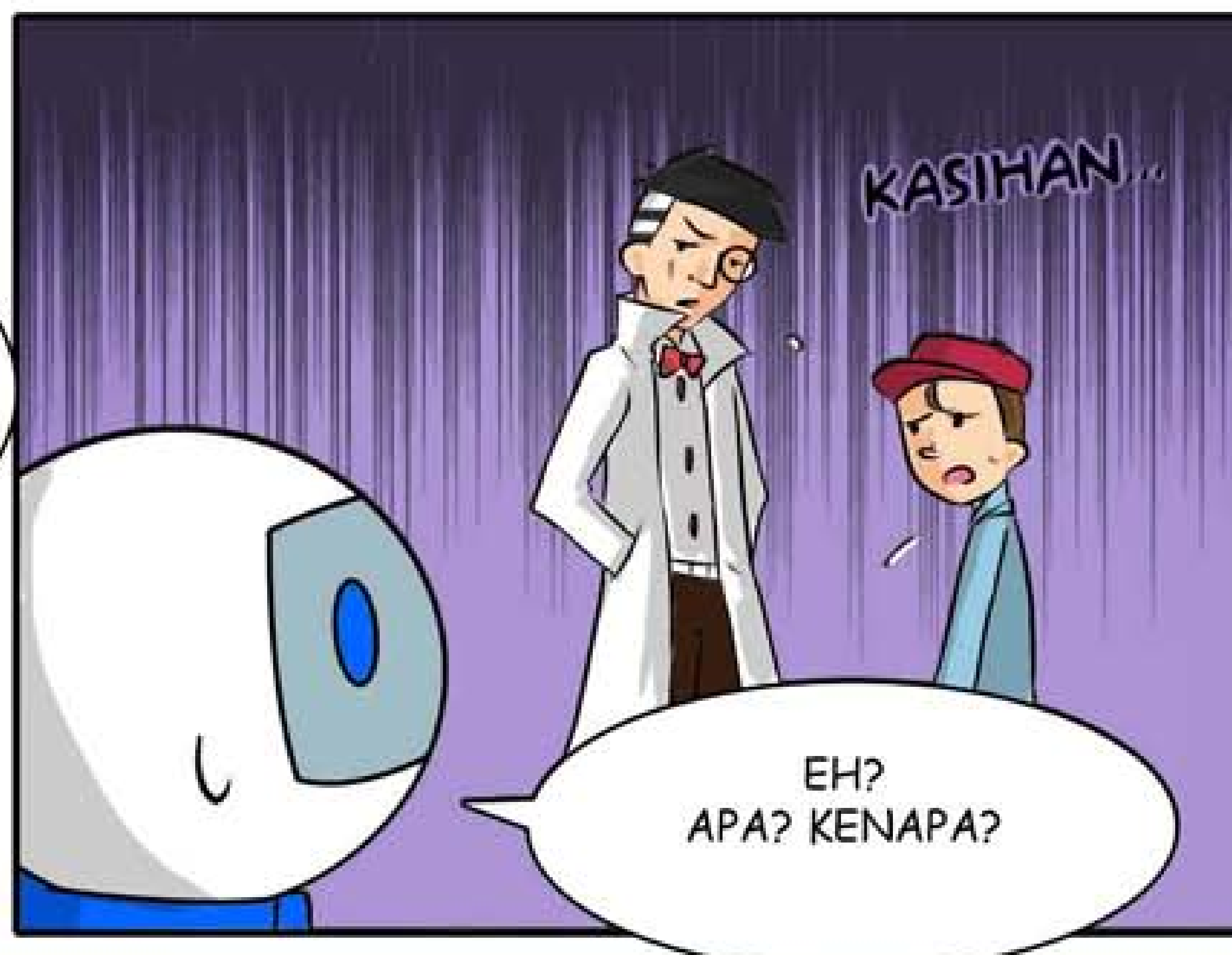
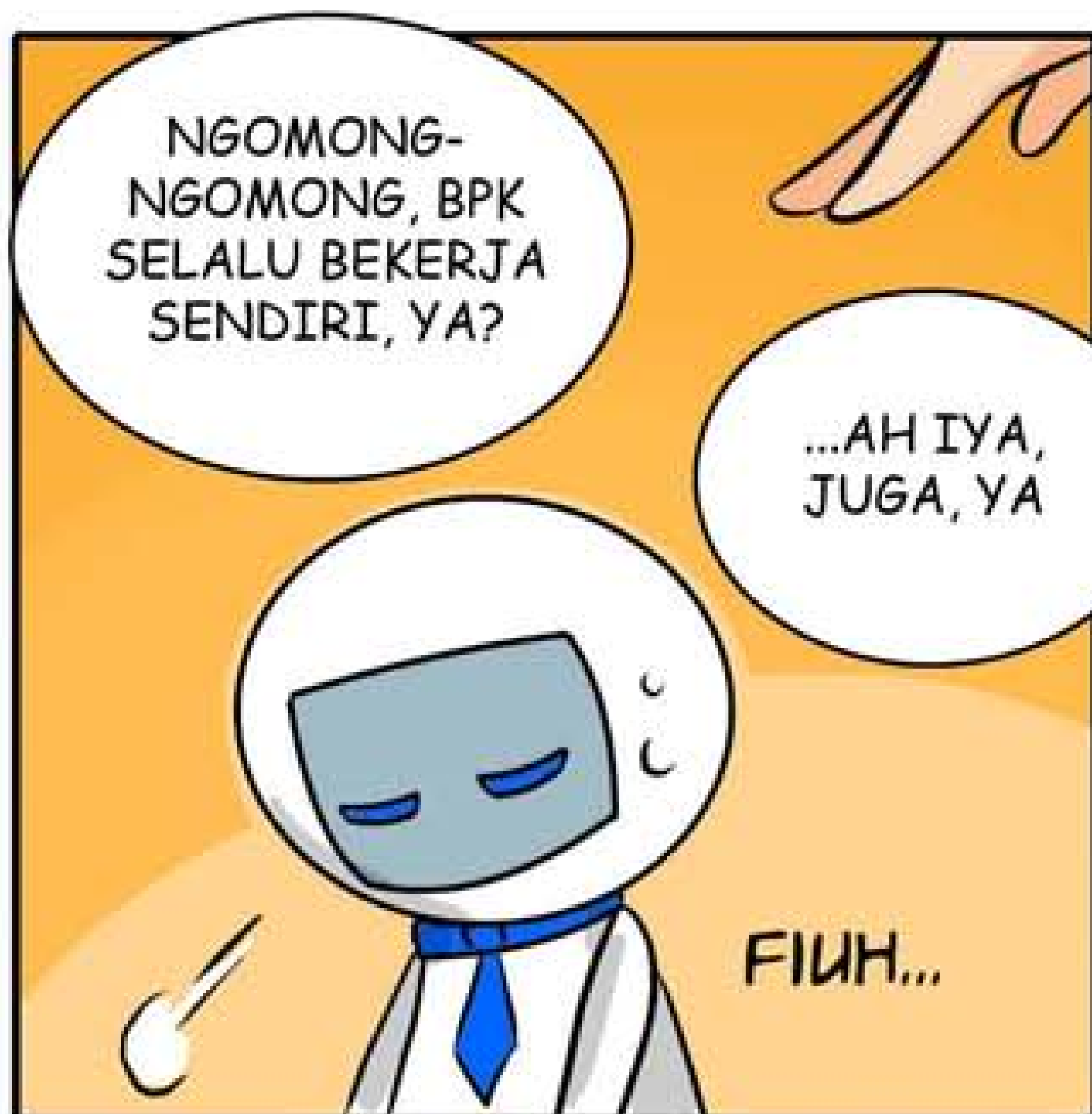


NG?

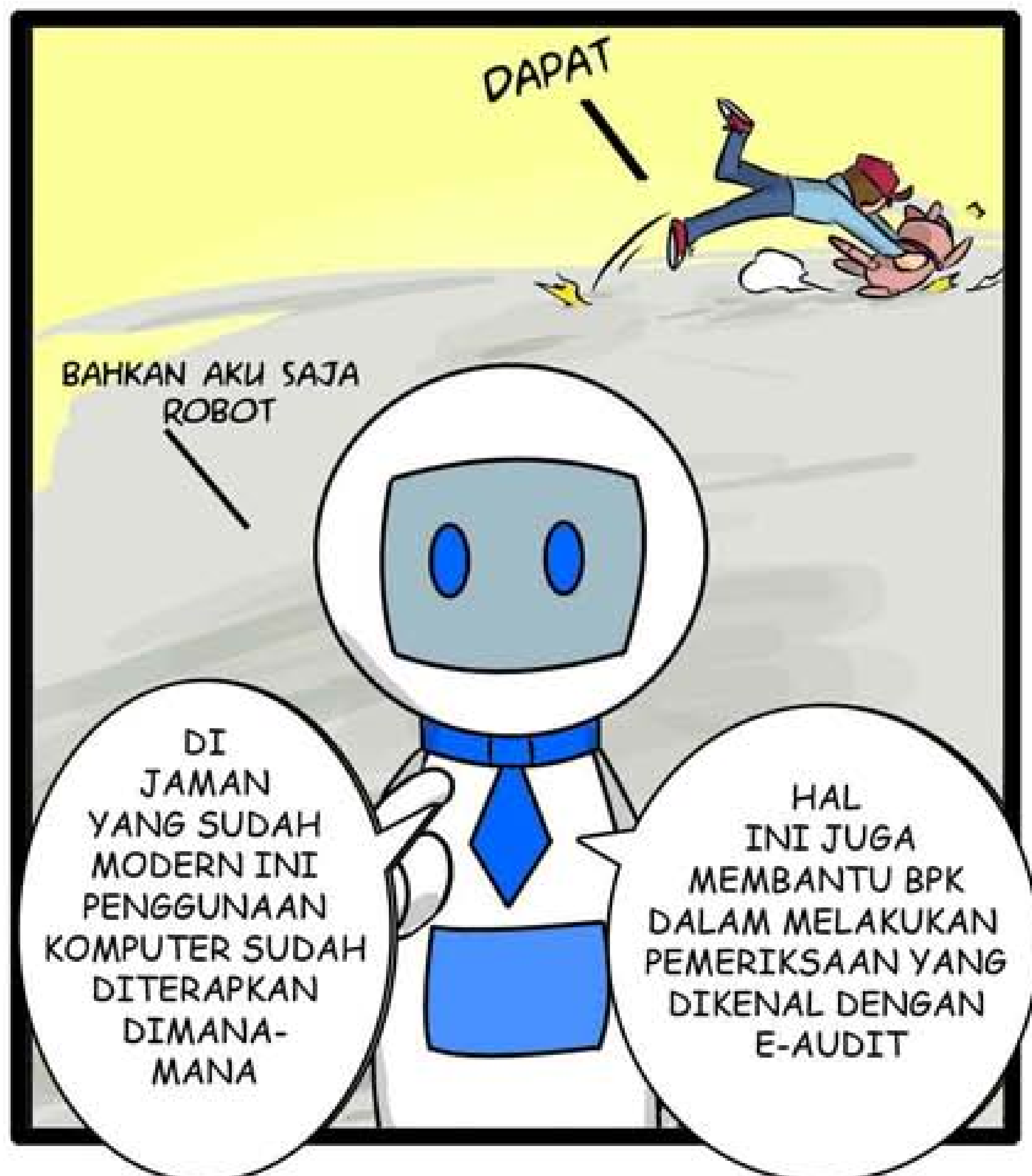
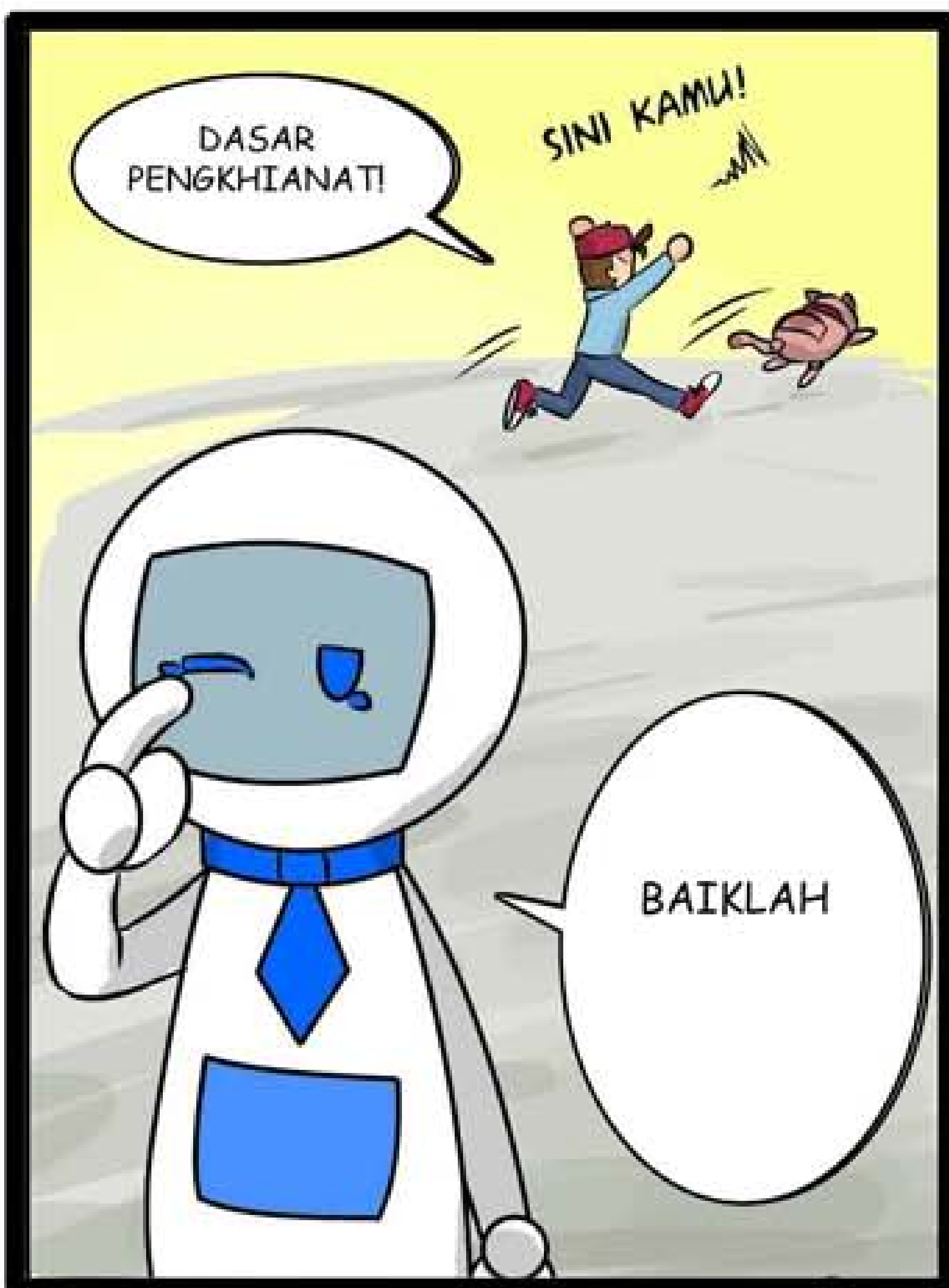
HA HA
HA HA

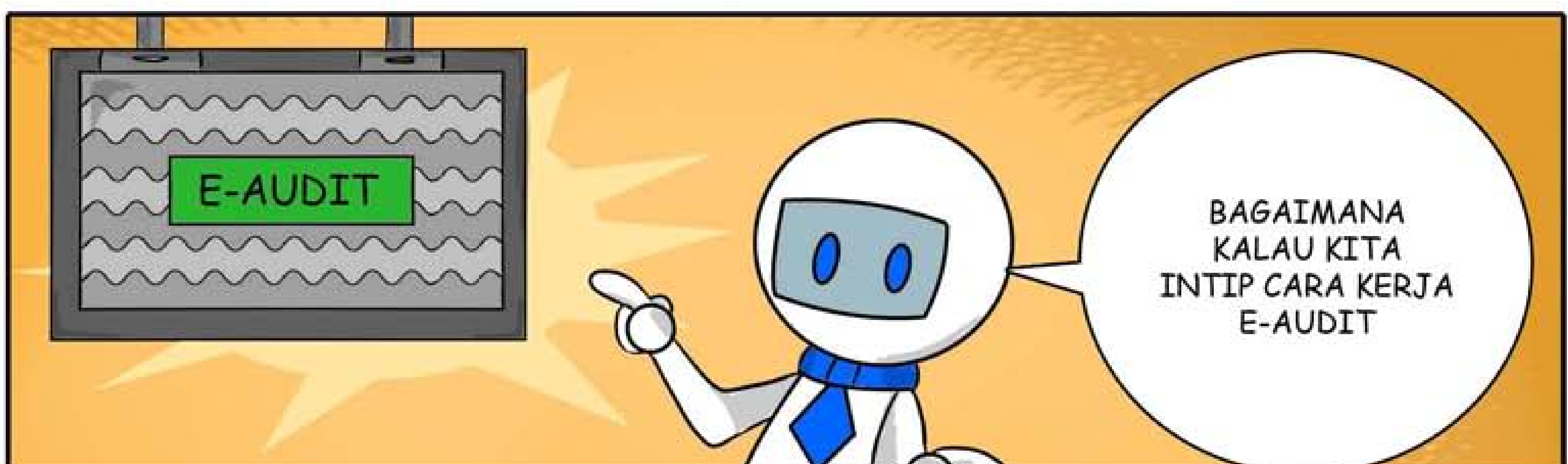
Y-YA 'KAN,
PROF YANG
AHLINYA...
JADI
SELANJUTNYA
PROF SAJA YANG
MENJELASKAN





DALAM KASUS-KASUS TERTENTU BPK DAPAT MEMINTA BANTUAN AKUNTAN PUBLIK DAN ATAU TENAGA AHLI UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN



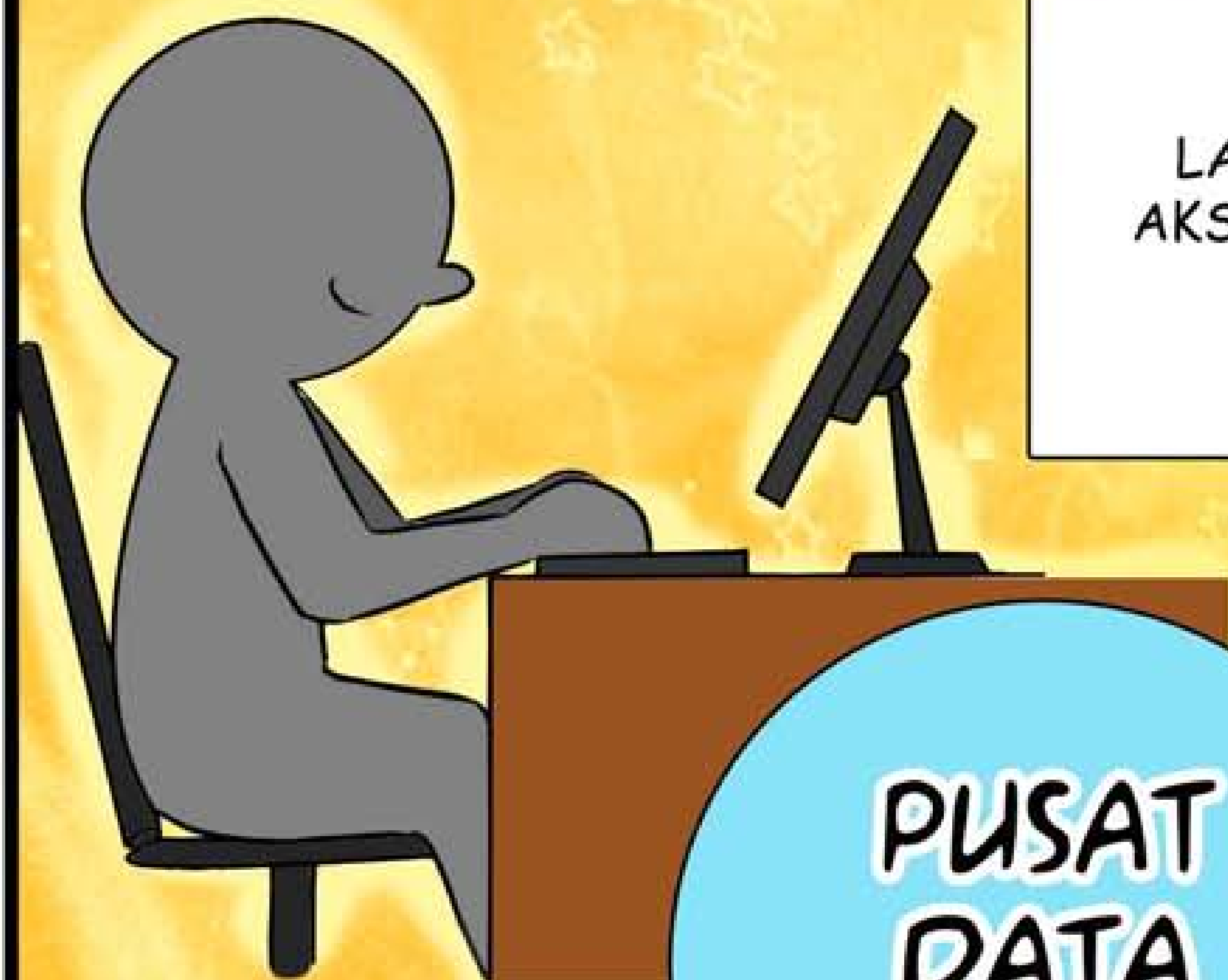




PERTAMA, BPK
MEMBUAT KESEPAKATAN
DENGAN AUDITEE



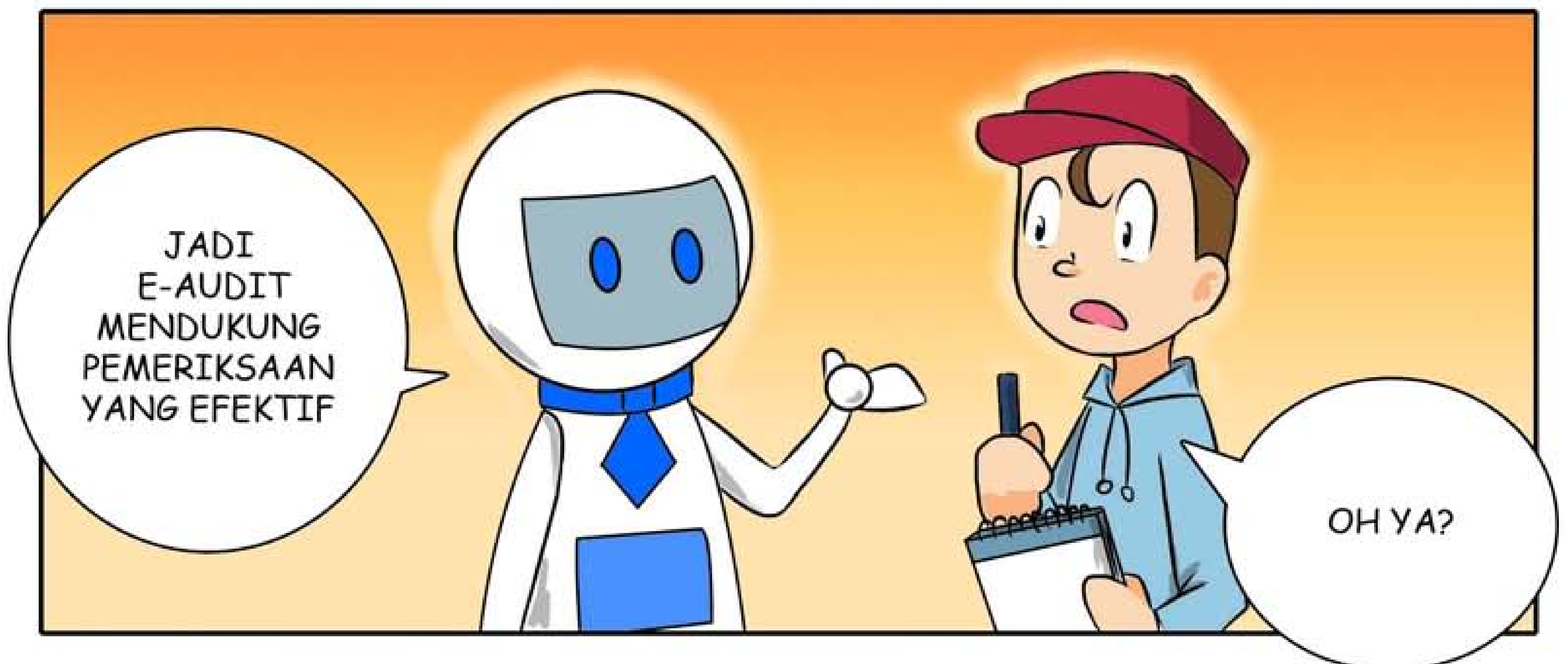
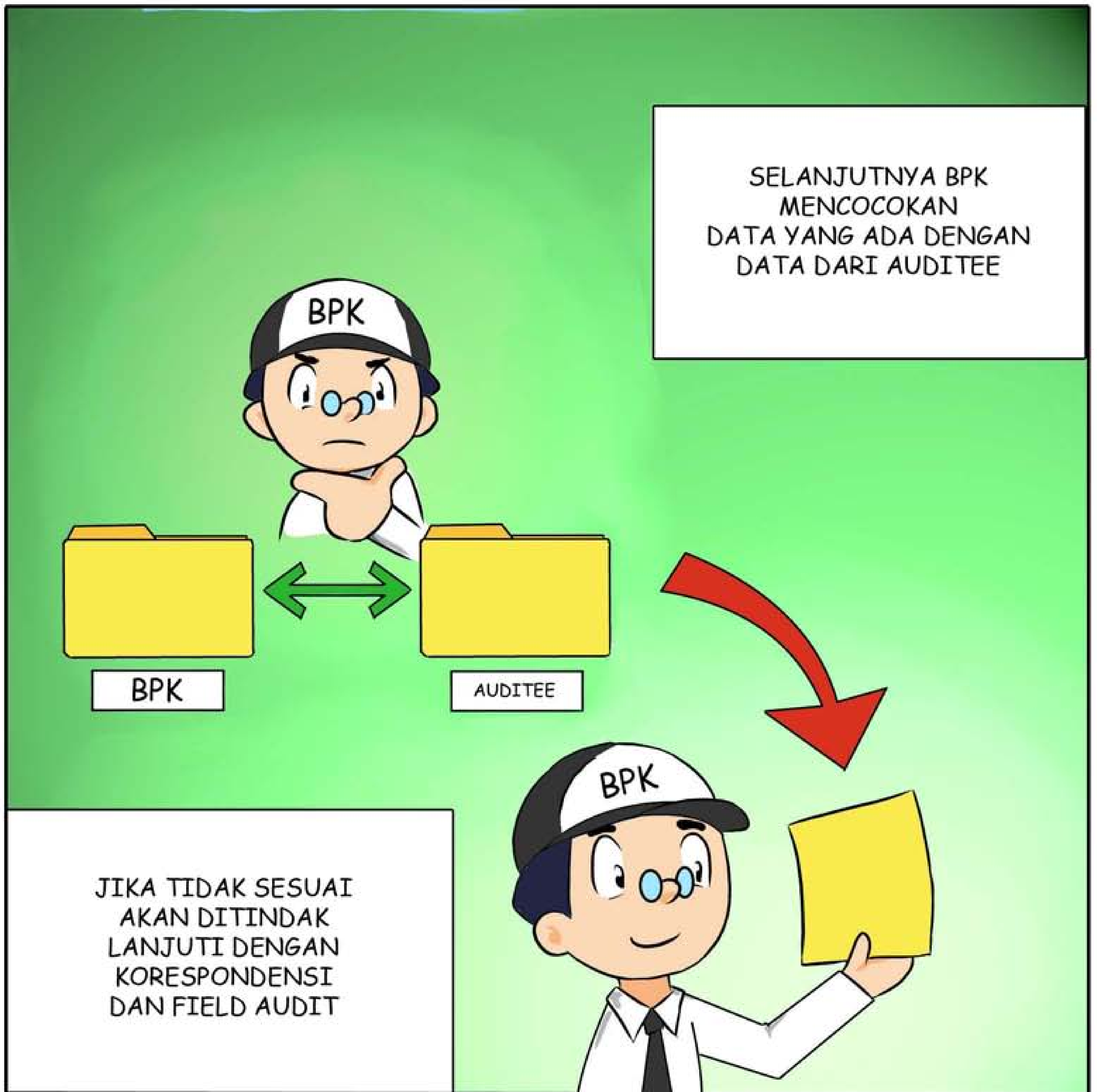
LALU AUDITEE MEMBERIKAN
AKSES DATA YANG DIPERLUKAN
KE PUSAT DATA BPK



PUSAT
DATA
BPK

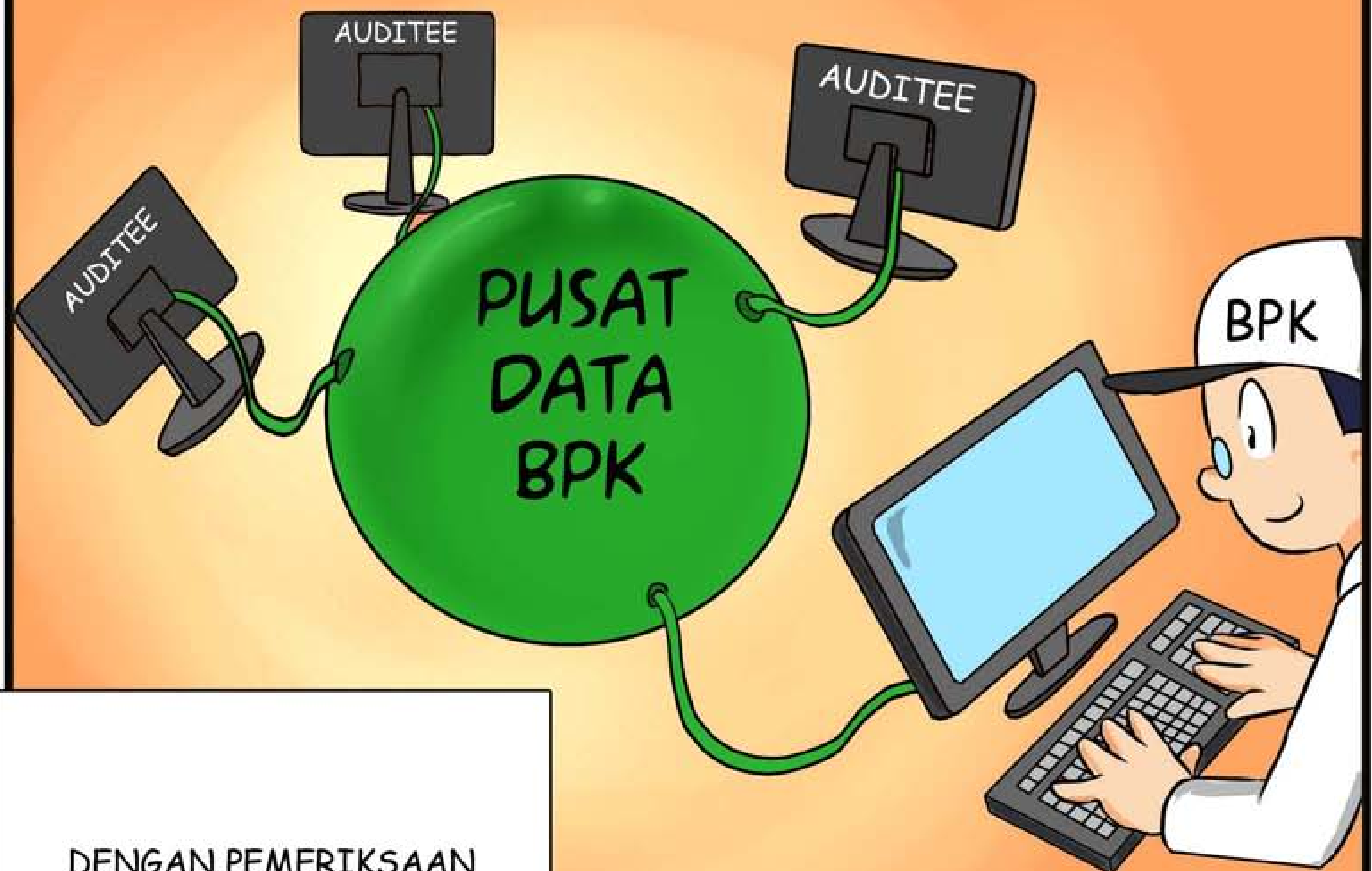
PENGIRIMAN DATA
DILAKUKAN SECARA ONLINE
MELALUI INTERFACE



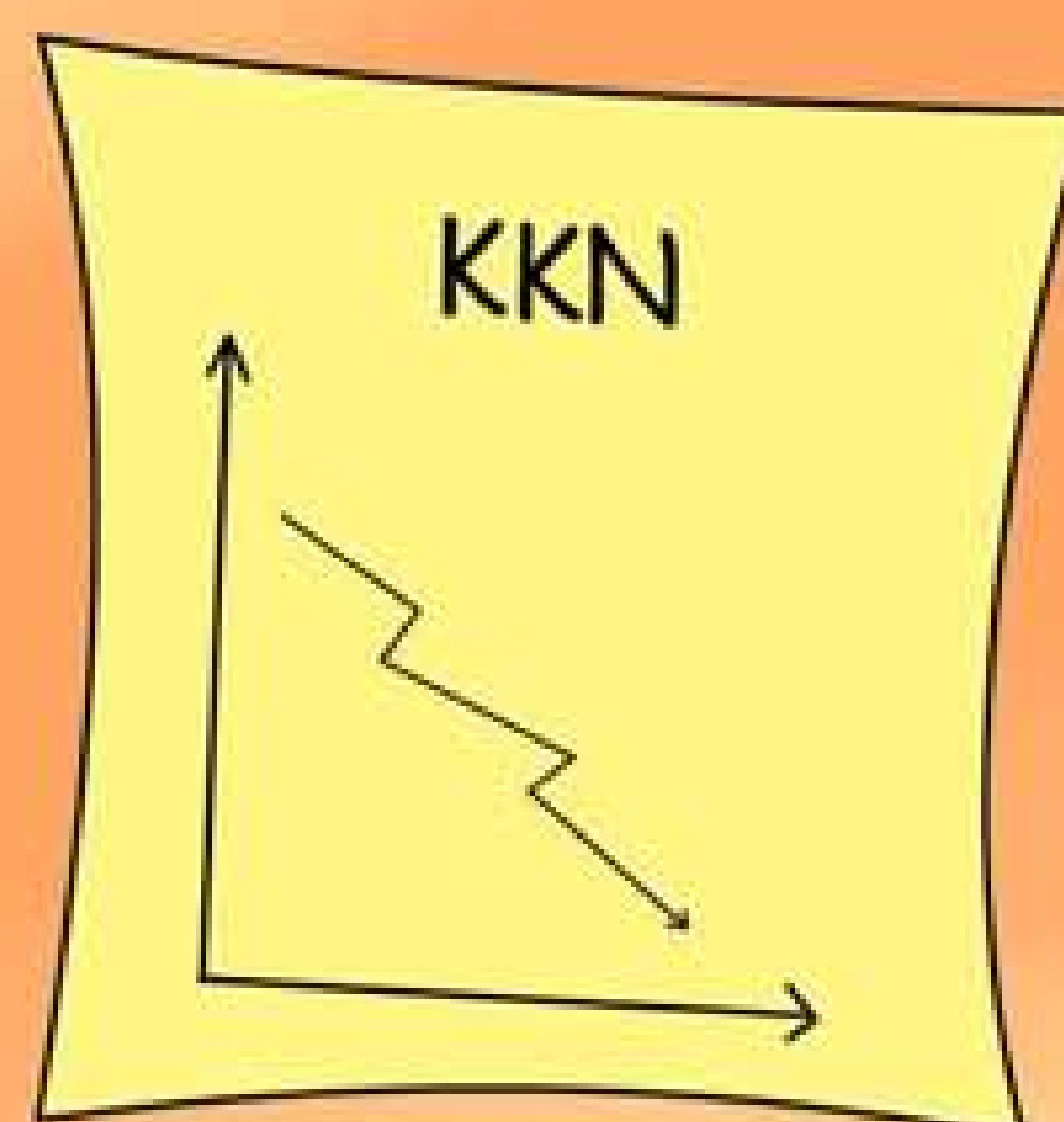


DENGAN DITERAPKAN E-AUDIT, MAKA TERBENTUK
SUATU PUSAT DATA BPK

MONITORING JUGA MENJADI LEBIH MUDAH
DAN TERCIPTA TRANSPARANSI DATA

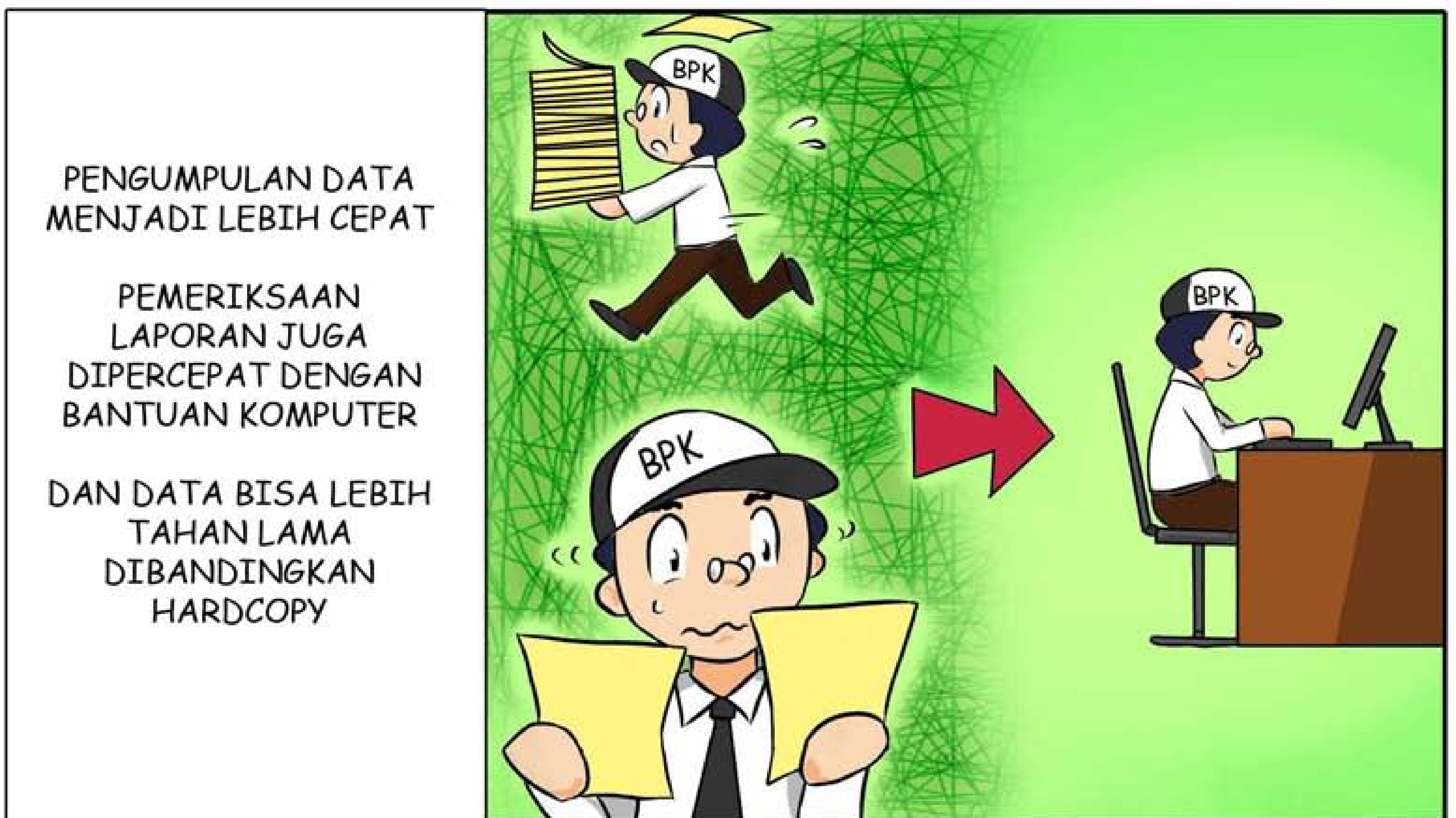
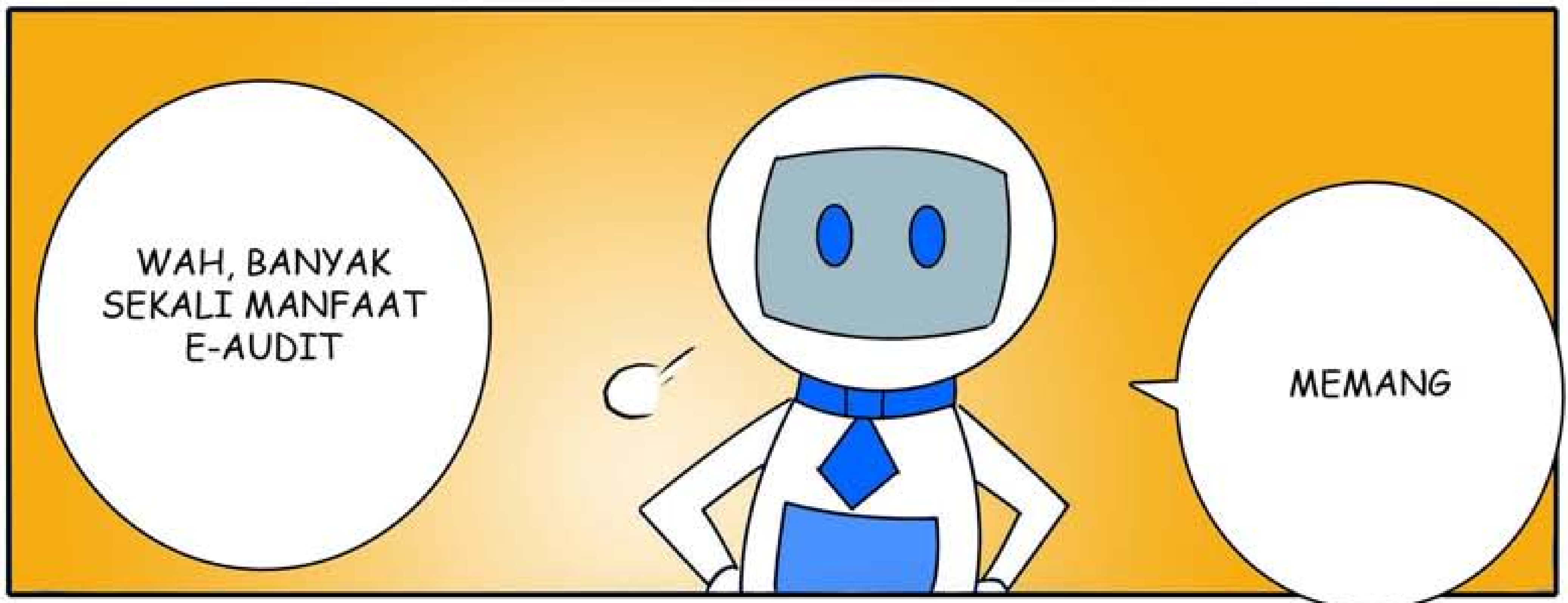


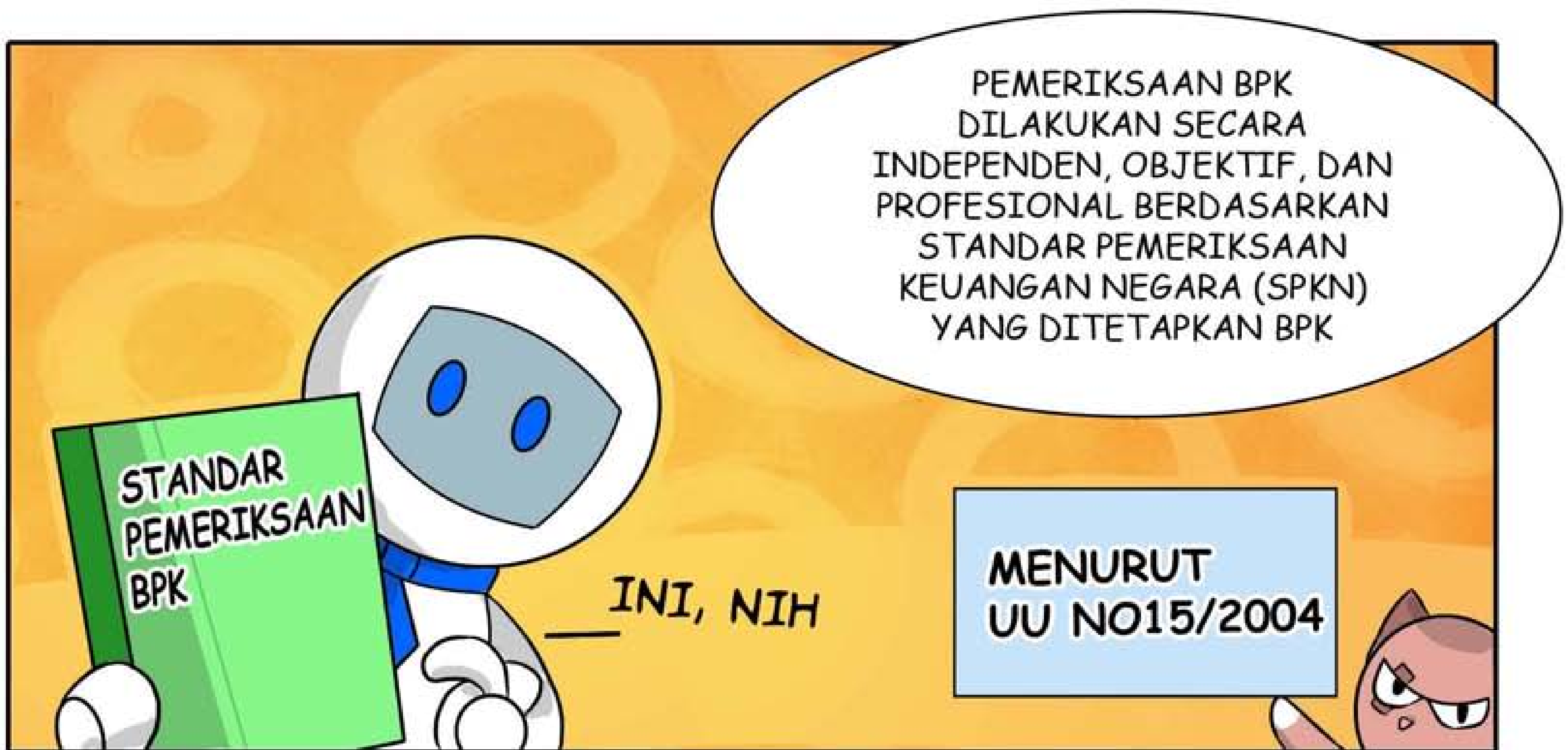
DENGAN PEMERIKSAAN
YANG LEBIH EFEKTIF MAKA
KKN AKAN BERKURANG
SECARA SISTEMIK,
PENERIMAAN NEGARA
BISA LEBIH OPTIMAL,
DAN PENGELUARAN
NEGARA DAPAT DIOLAH
DENGAN EFEKTIF



SEMUA ITU BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG
AKAN MENDUKUNG TERCIPTA-
NYA KEMAKMURAN RAKYAT





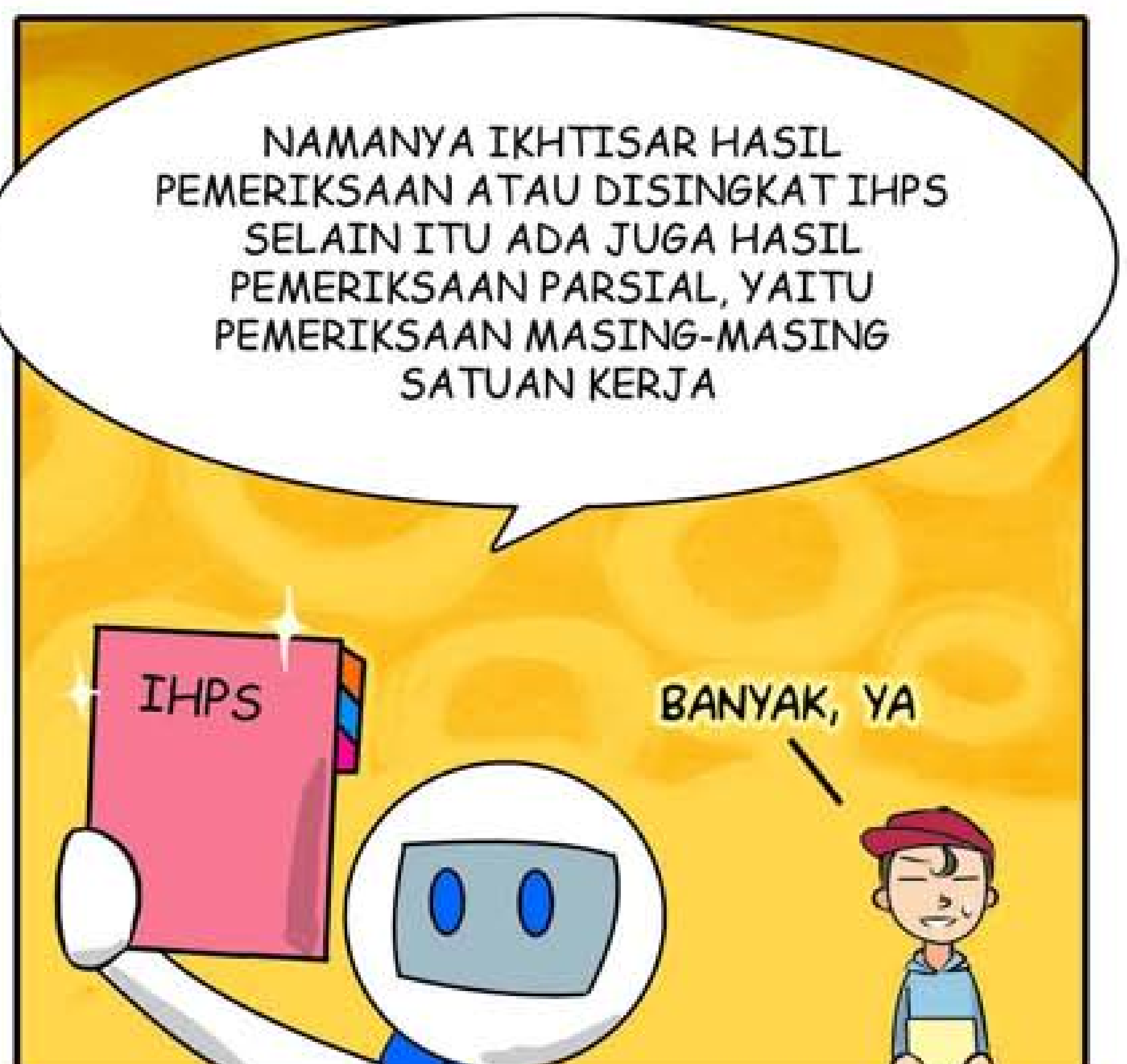


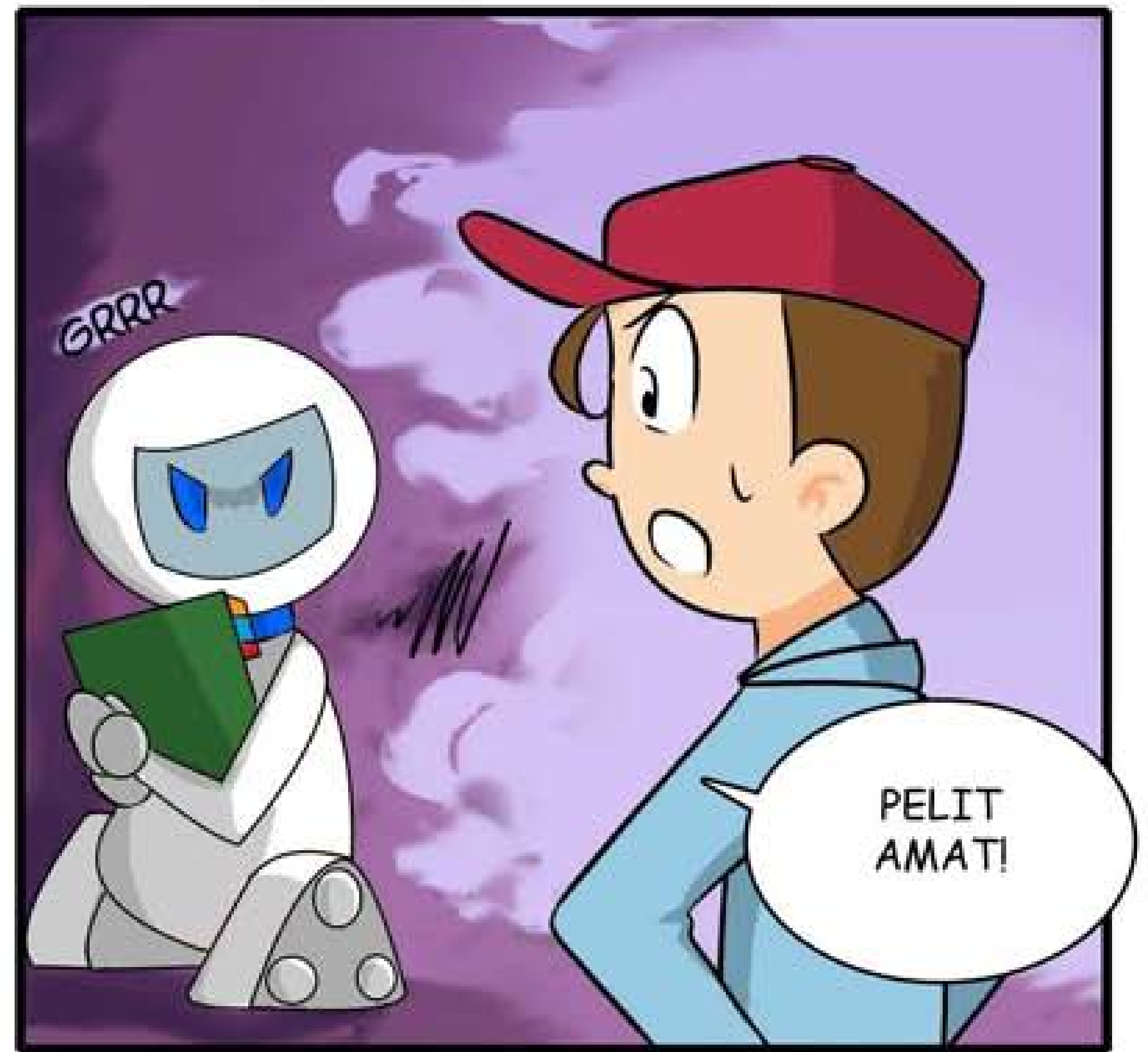
DENGAN ADANYA KETETAPAN TERSEBUT, SIAPA PUN YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS KEUANGAN NEGARA HARUS BERPEDOMAN PADA SPKN

INI PERLU DITEGASKAN KARENA KEUANGAN NEGARA DAPAT SAJA DIPERIKSA OLEH PIHAK LAIN ATAS NAMA BPK SERTA AKUNTAN PUBLIK YANG DITUNJUK OLEH RUPS

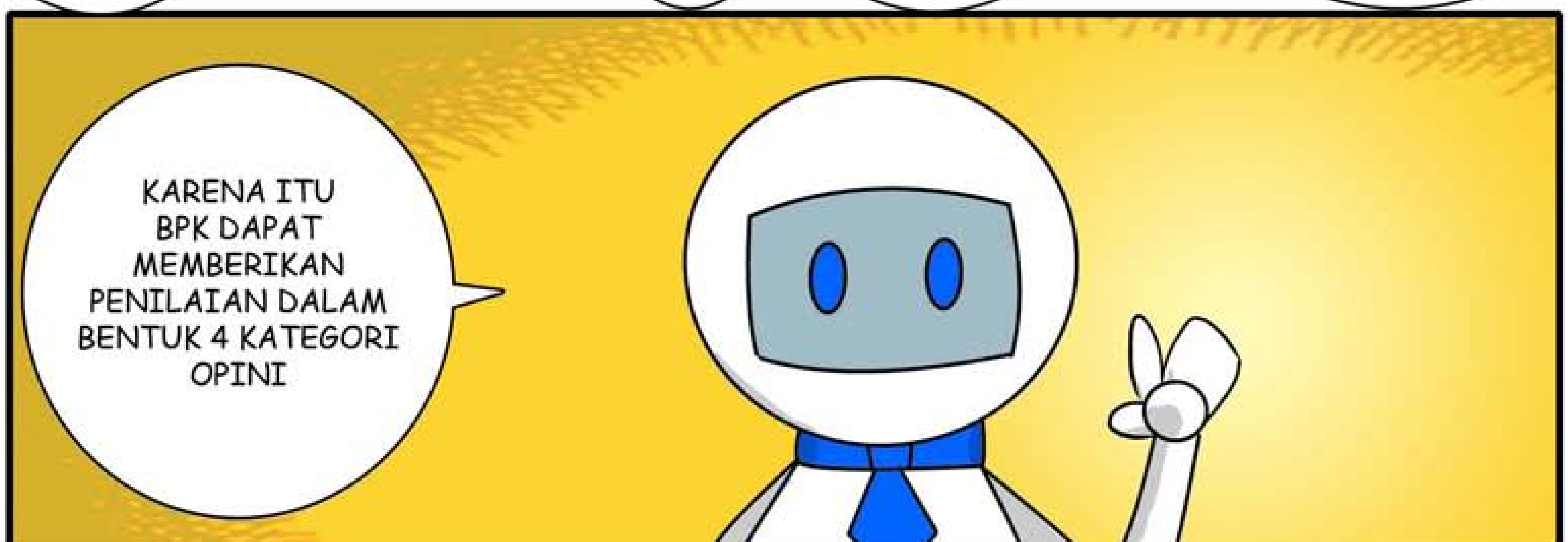








UNTUK KEPERLUAN TINDAK LANJUT, BPK MENYERAHKAN PULA HASIL PEMERIKSAAN SECARA TERTULIS KEPADA PRESIDEN, GUBERNUR, BUPATI ATAU WALIKOTA SESUAI KEWENANGAN



WTP ATAU
UNQUALIFIED OPINION

OPINI WAJAR TANPA
PENGECUALIAN, JIKA LAPORAN
KEUANGAN PIHAK YANG
DIPERIKSA TELAH DISAJIKAN
DENGAN WAJAR DALAM SELURUH
ASPEK YANG MATERIAL SESUAI
STANDAR AKUNTANSI

WDP ATAU
QUALIFIED OPINION

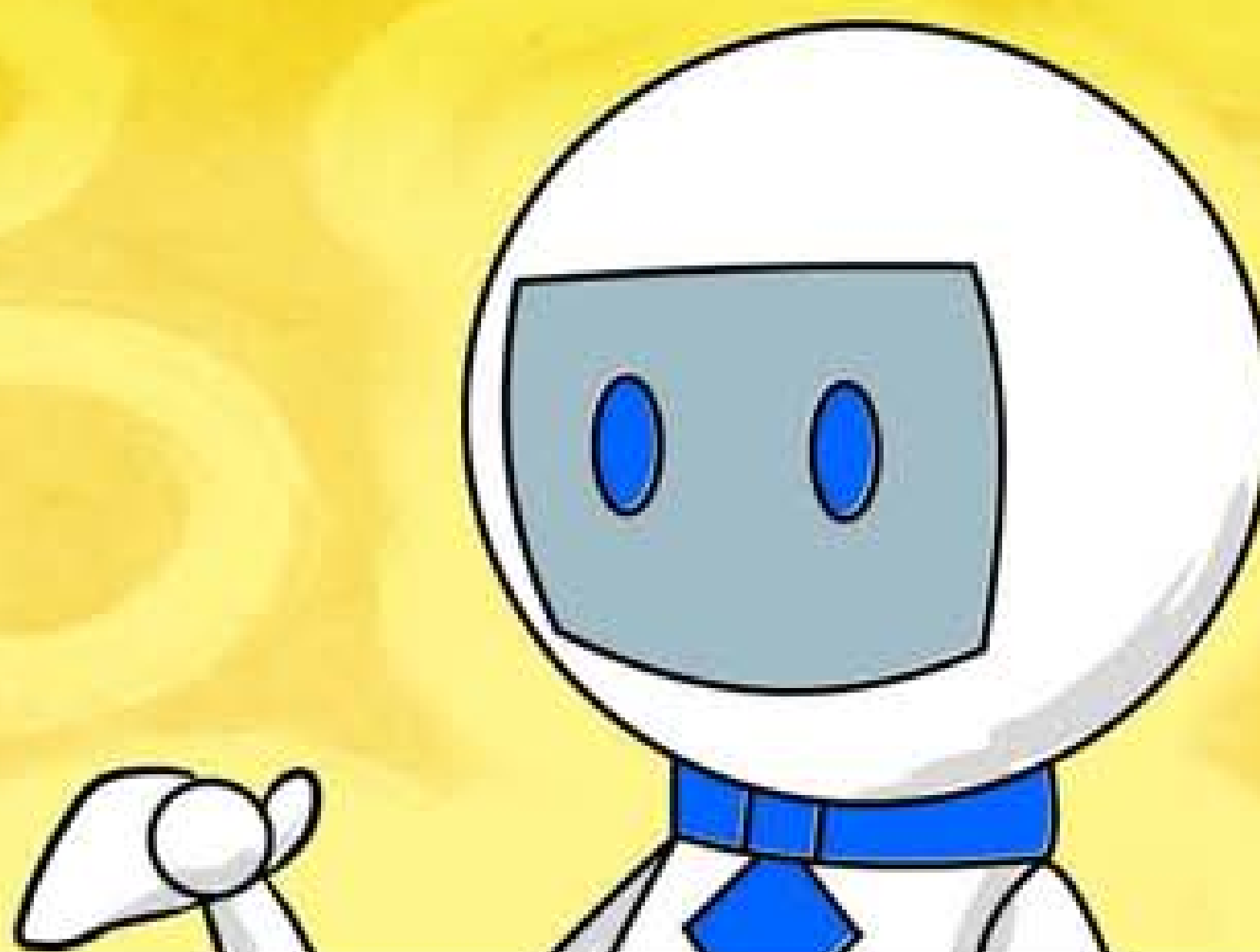
OPINI WAJAR DENGAN
PENGECUALIAN, JIKA PADA
UMUMNYA LAPORAN TELAH
DISAJIKAN DENGAN WAJAR
TAPI ADABEBERAPA BAGIAN
YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
AKUNTANSI

TW ATAU
ADVERSE OPINION

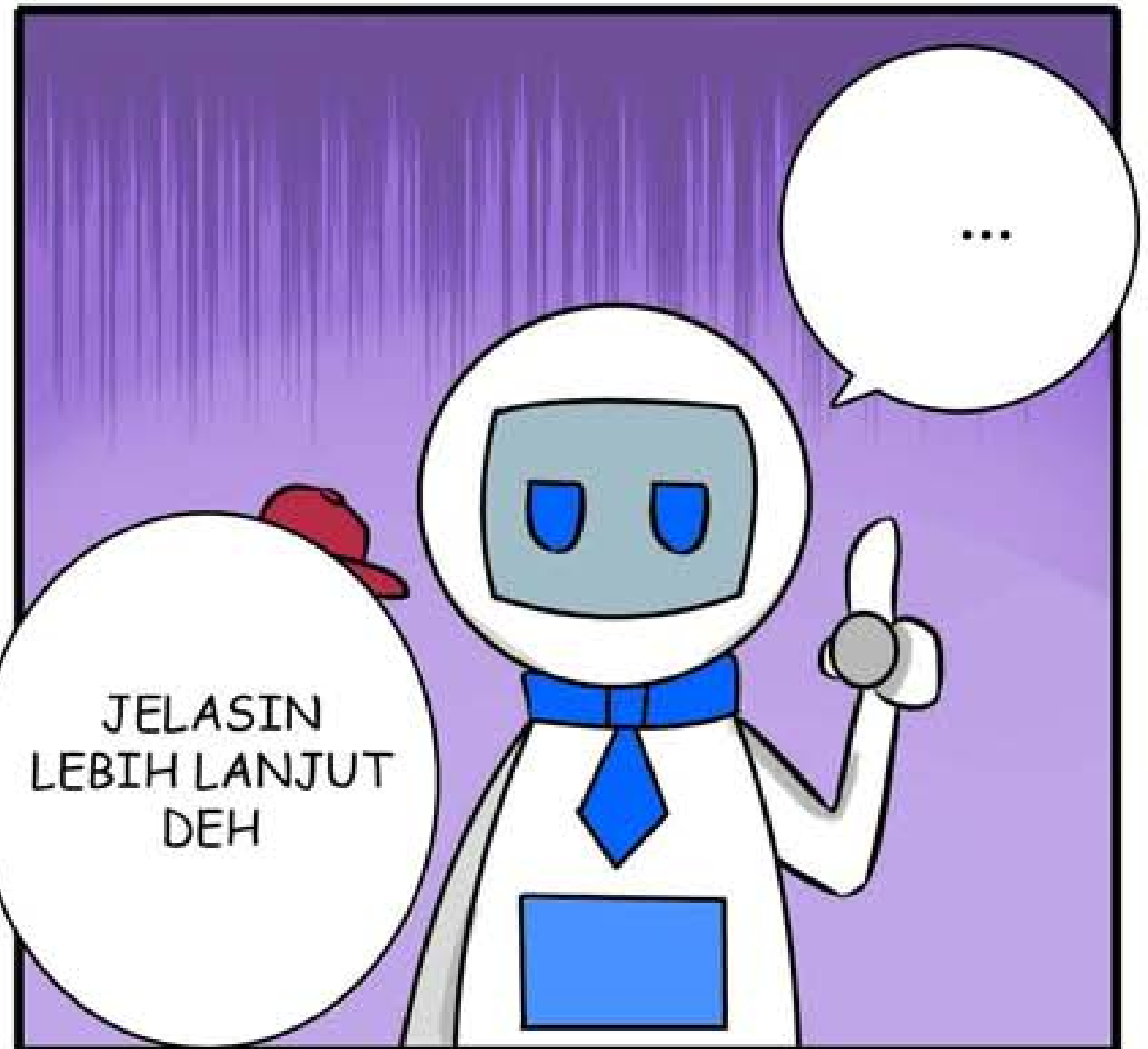
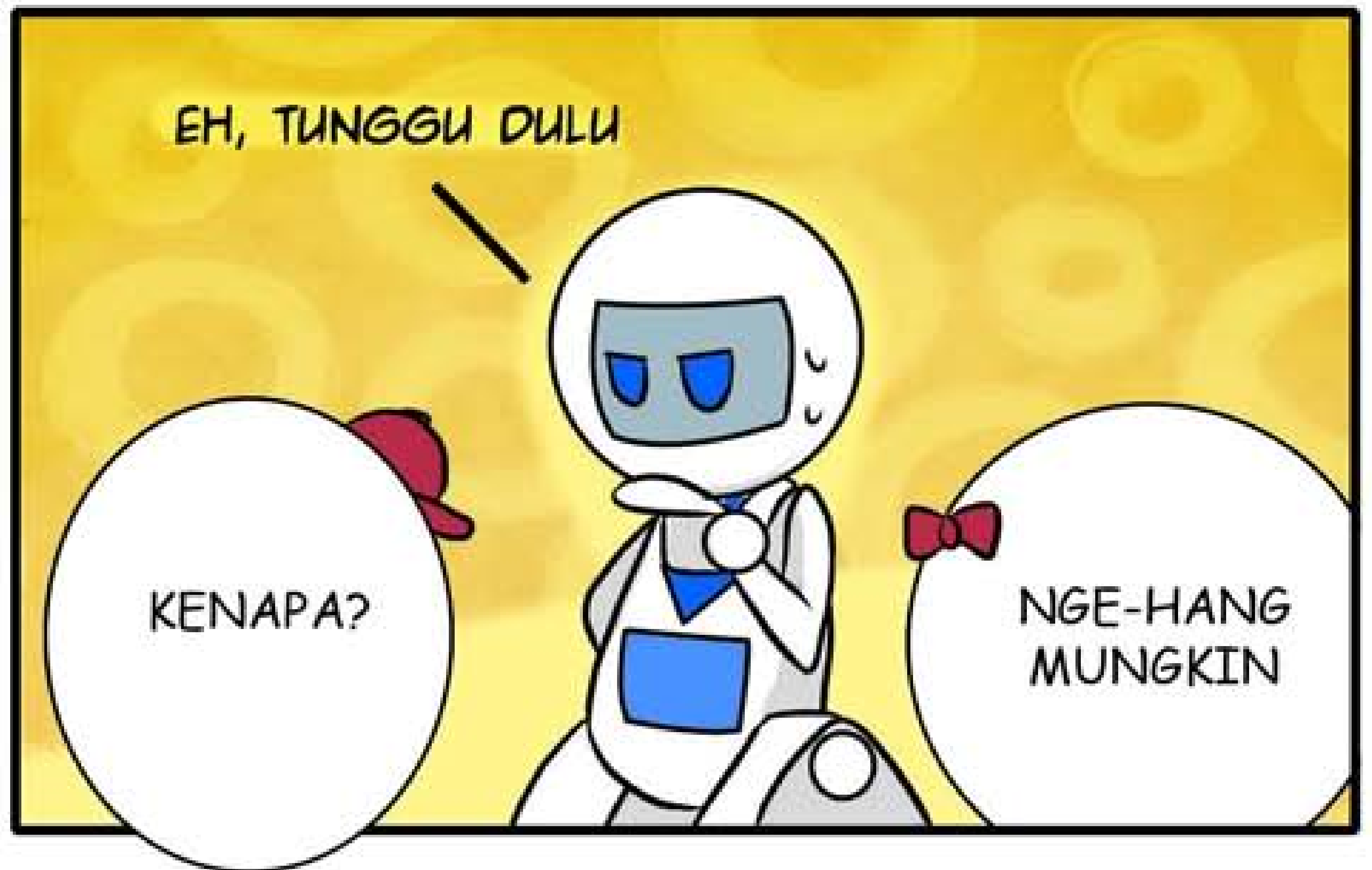
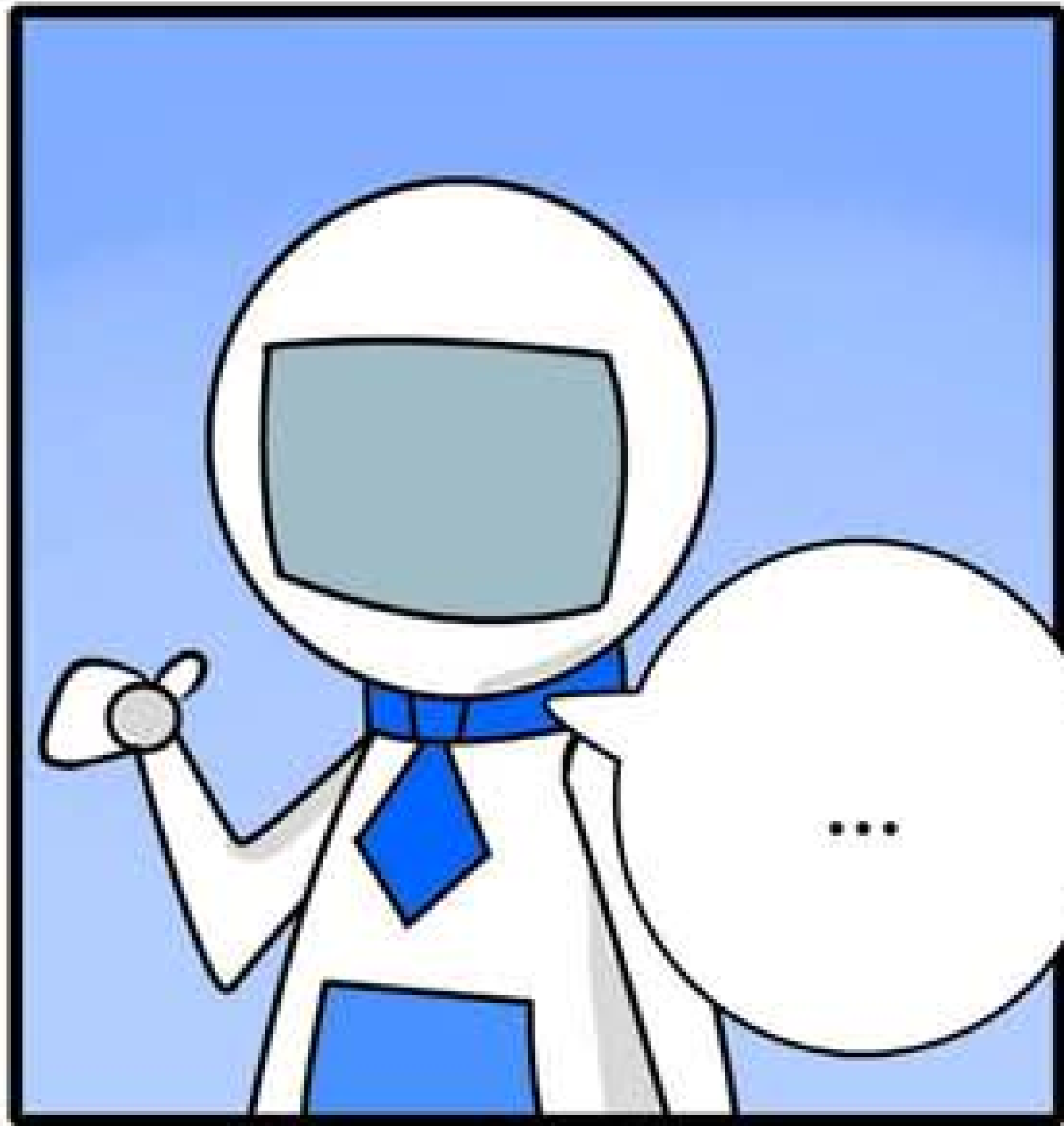
OPINI TIDAK WAJAR, JIKA
LAPORAN KEUANGAN YANG
DISUSUN TIDAK SESUAI
STANDAR AKUNTANSI

DISCLAIMER OPINION

MENOLAK MEMBERIKAN
PENDAPAT, JIKA AUDITOR TIDAK
DAPAT MEMBERIKAN KESIMPULAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TERSEBUT



SEMENTARA
DALAM MEMERIKSA
LAPORANNYA, BPK
MEMPUNYAI
BEBERAPA
KEWENANGAN



DALAM PROSES PEMERIKSAAN, BPK BERWENANG MEMINTA KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIBERIKAN JENIS DOKUMEN, DATA, SERTA INFORMASI TERSEBUT DITENTUKAN OLEH BPK

BPK JUGA BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN LANGSUNG DI LAPANGAN



DI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA



DI TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUKUAN DAN TATA USAHA KEUANGAN NEGARA

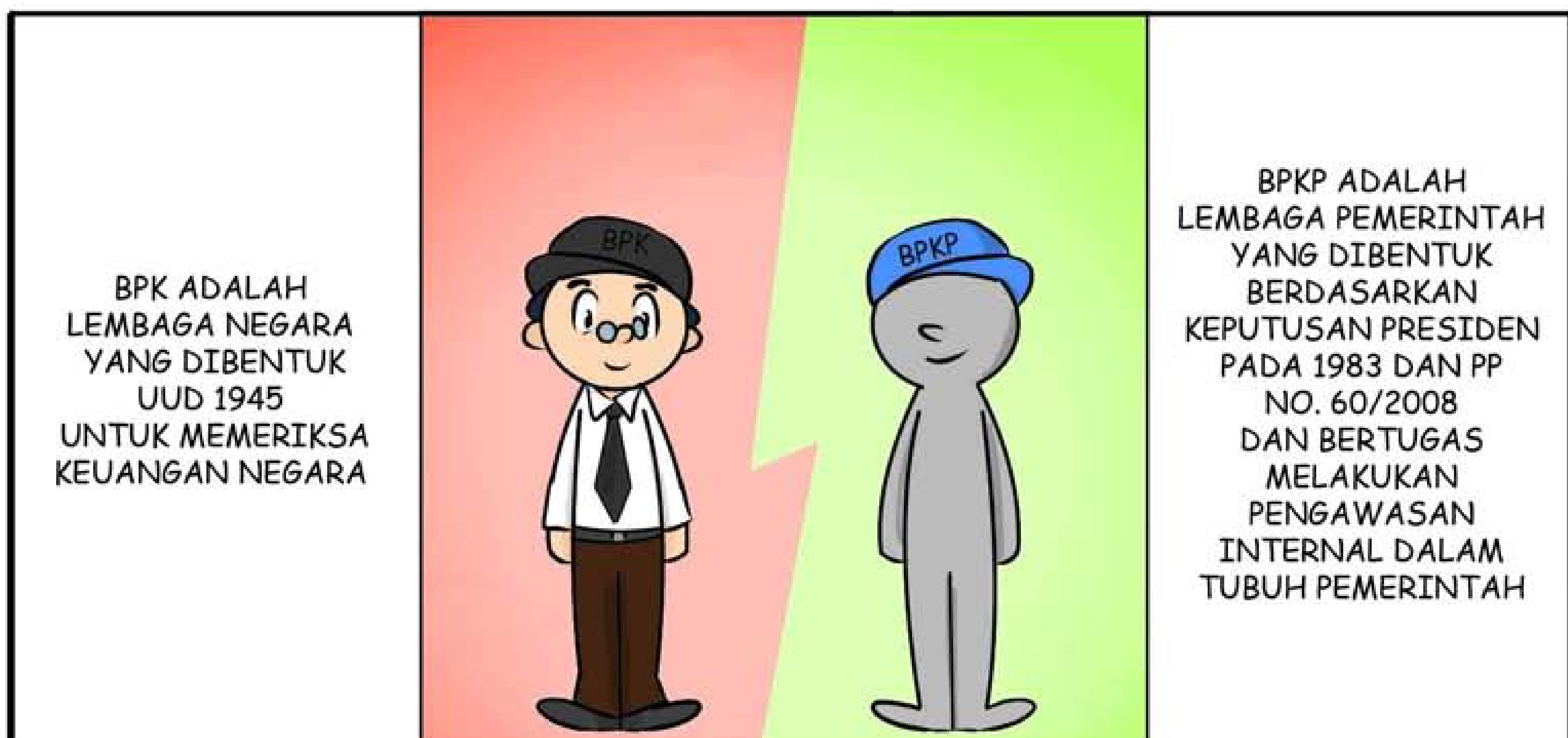
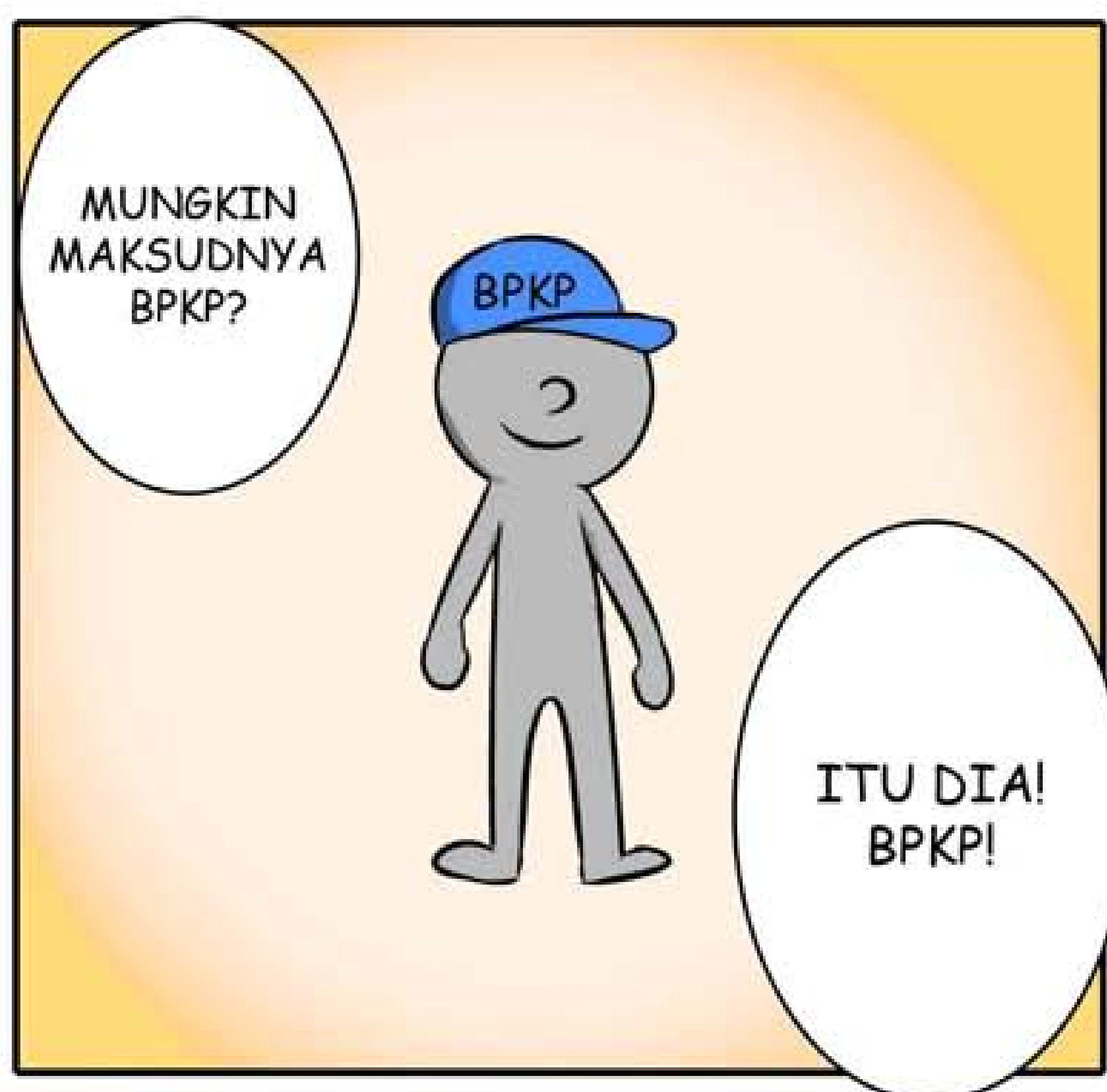
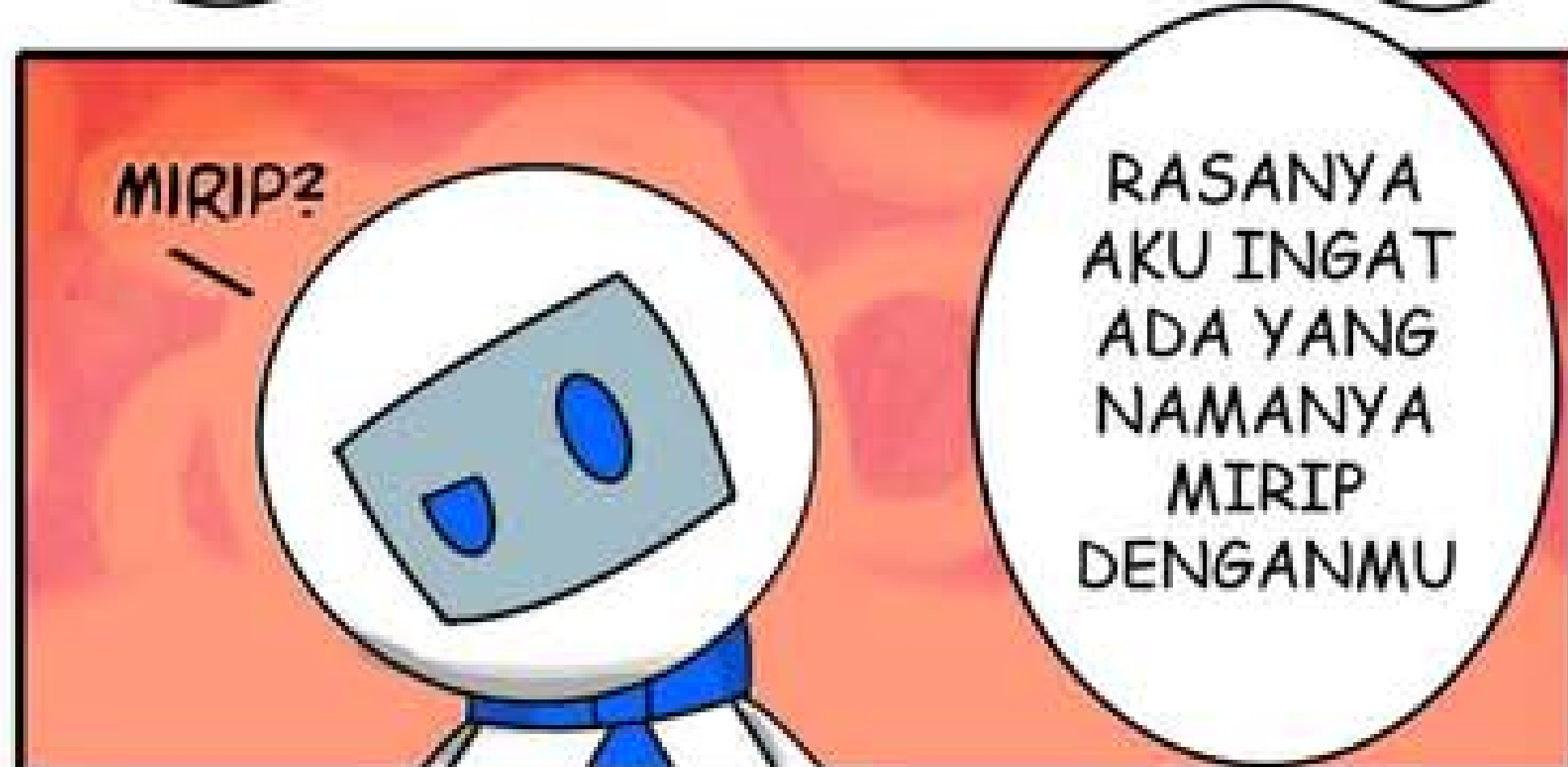
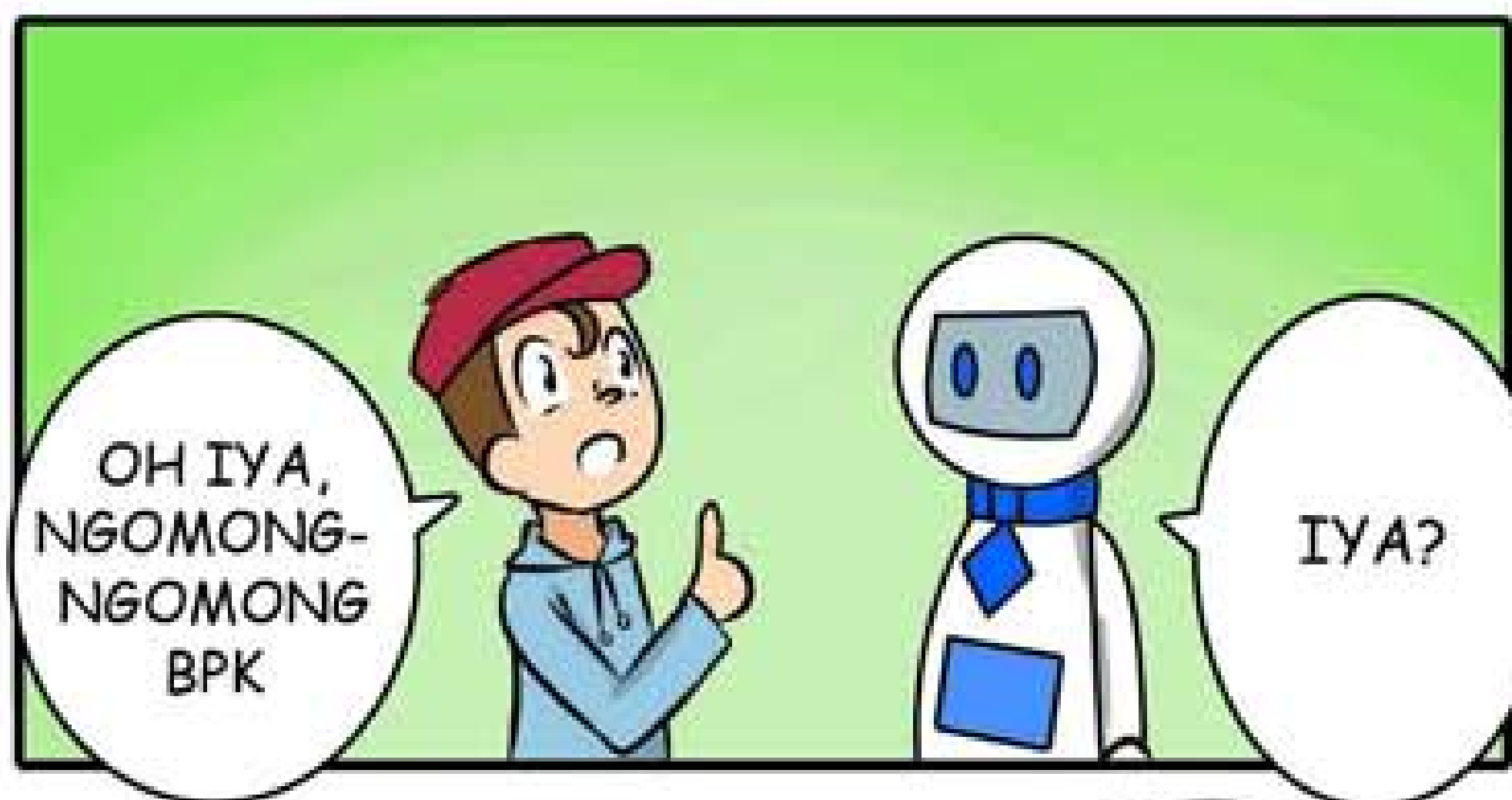


SERTA PEMERIKSAAN TERHADAP DAFTAR-DAFTAR YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN UANG NEGARA



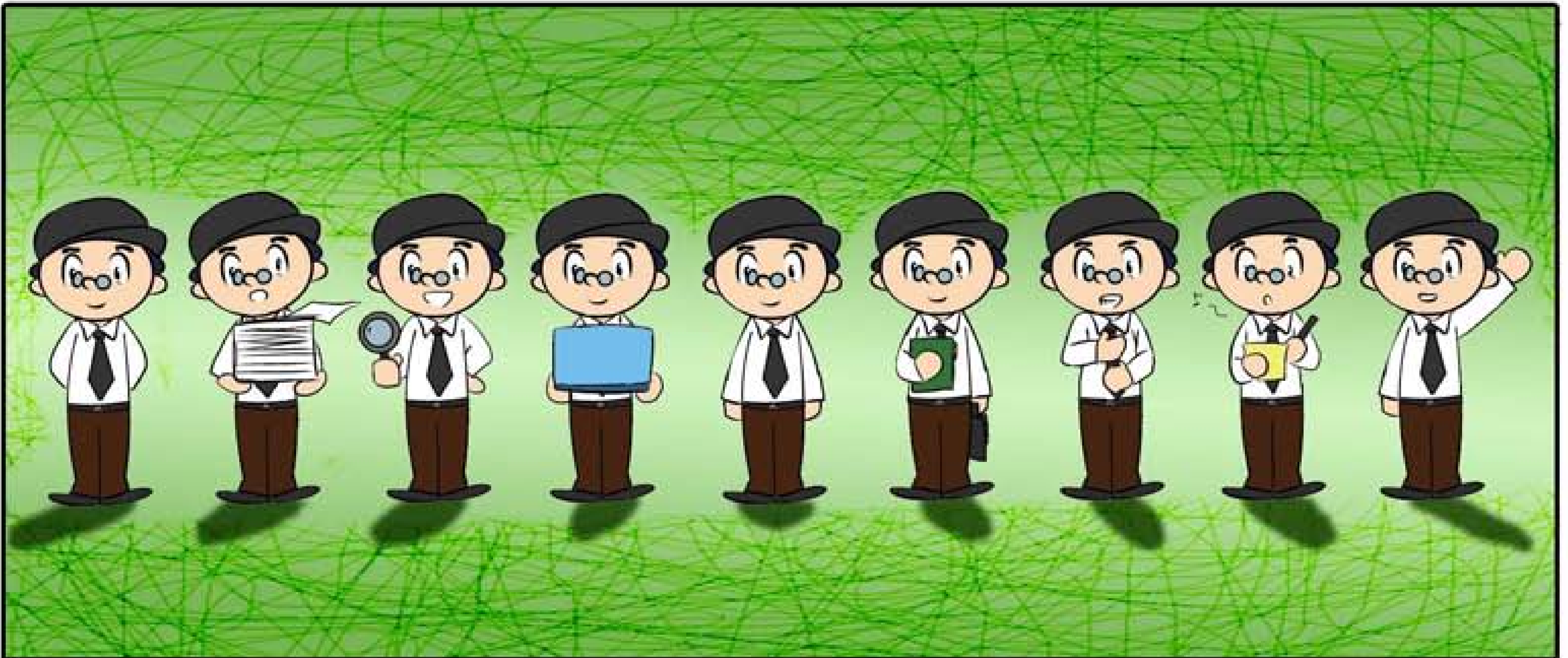
UNTUK KASUS TERTENTU, BPK DAPAT MENGGUNAKAN TENAGA AHLI DAN/ATAU TENAGA PEMERIKSA DI LUAR BPK YANG BEKERJA UNTUK DAN ATAS NAMA BPK







ANGGOTA BPK
MEMEGANG JABATAN
SELAMA 5 TAHUN DAN
SESUDAHNYA DAPAT
DIPILIH KEMBALI
UNTUK 1 KALI MASA
JABATAN



HUBUNGAN ANTAR SESAMA ANGGOTA BERSIFAT KOLEKTIF KOLEGIAL
ARTINYA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DILAKUKAN BERSAMA-SAMA



JADI KEPUTUSAN AKHIR
TIDAK DITENTUKAN
OLEH KETUA DAN
WAKIL KETUA,
MELAINKAN SECARA
KOLEKTIF, BISA
DALAM BENTUK
MUSYAWARAH ATAU
MELALUI VOTING

ANGGOTA BPK DIPILIH
OLEH DPR



KAMU SEKARANG
ANGGOTA BPK

DAN DIRESMIKAN OLEH
PRESIDEN



SELAMAT BEKERJA
SEBAGAI ANGGOTA BPK

UNTUK
KEANGGOTAANNYA,
BPK TERBUKA UNTUK
SELURUH ANGGOTA
MASYARAKAT DENGAN
SYARAT TERTENTU



SYARAT KEANGGOTAAN BPK:

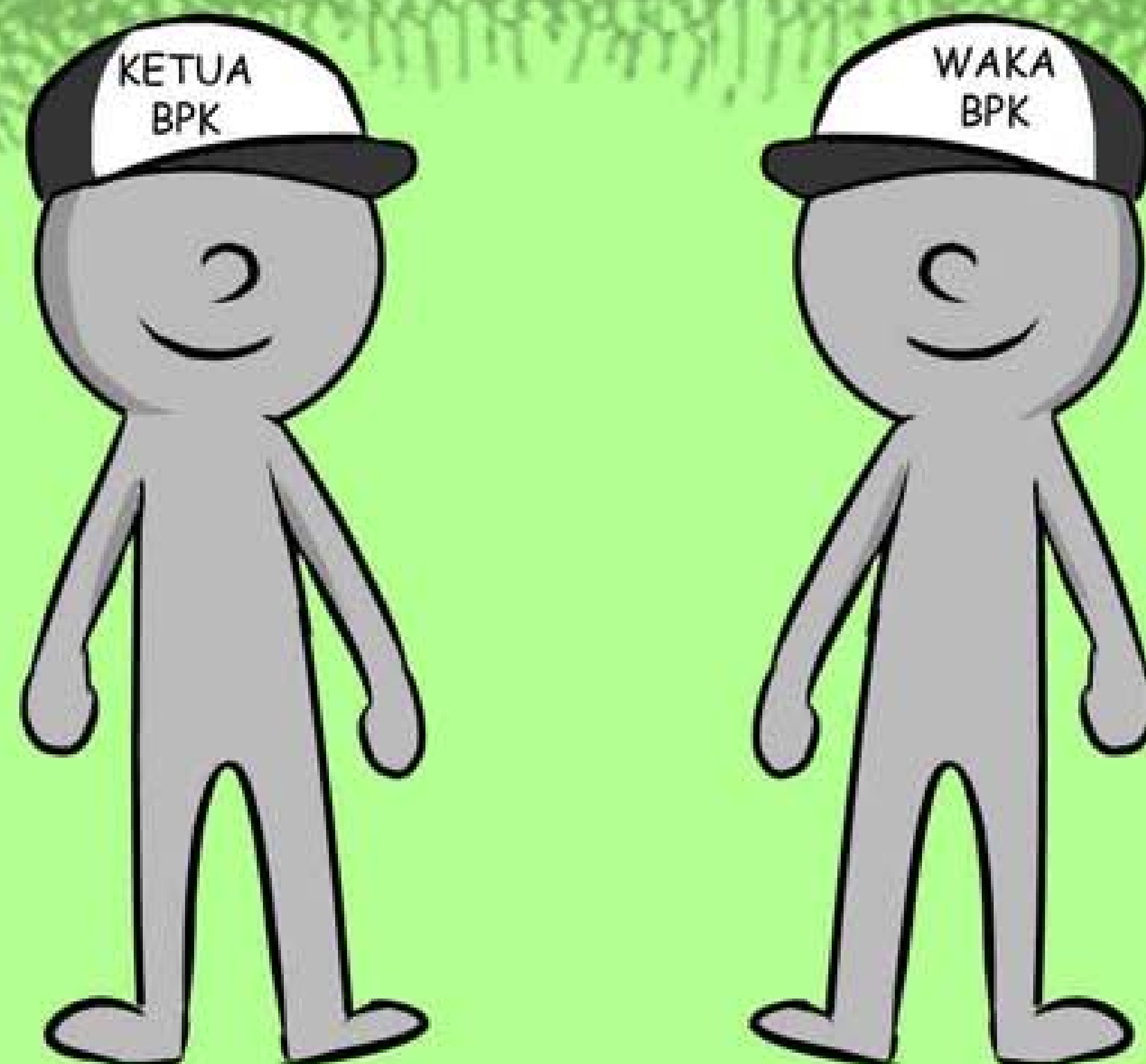
- > WARGA NEGARA INDONESIA**
- > BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**
- > BERDOMISILI DI INDONESIA**
- > MEMILIKI INTEGRITAS MORAL DAN KEJUJURAN**
- > SETIA TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945**
- > BERPENDIDIKAN PALING RENDAH S1 ATAU SETARA**
- > TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA DENGAN HUKUMAN 5 TAHUN ATAU LEBIH**

LANJUT KE
HALAMAN
SELANJUTNYA

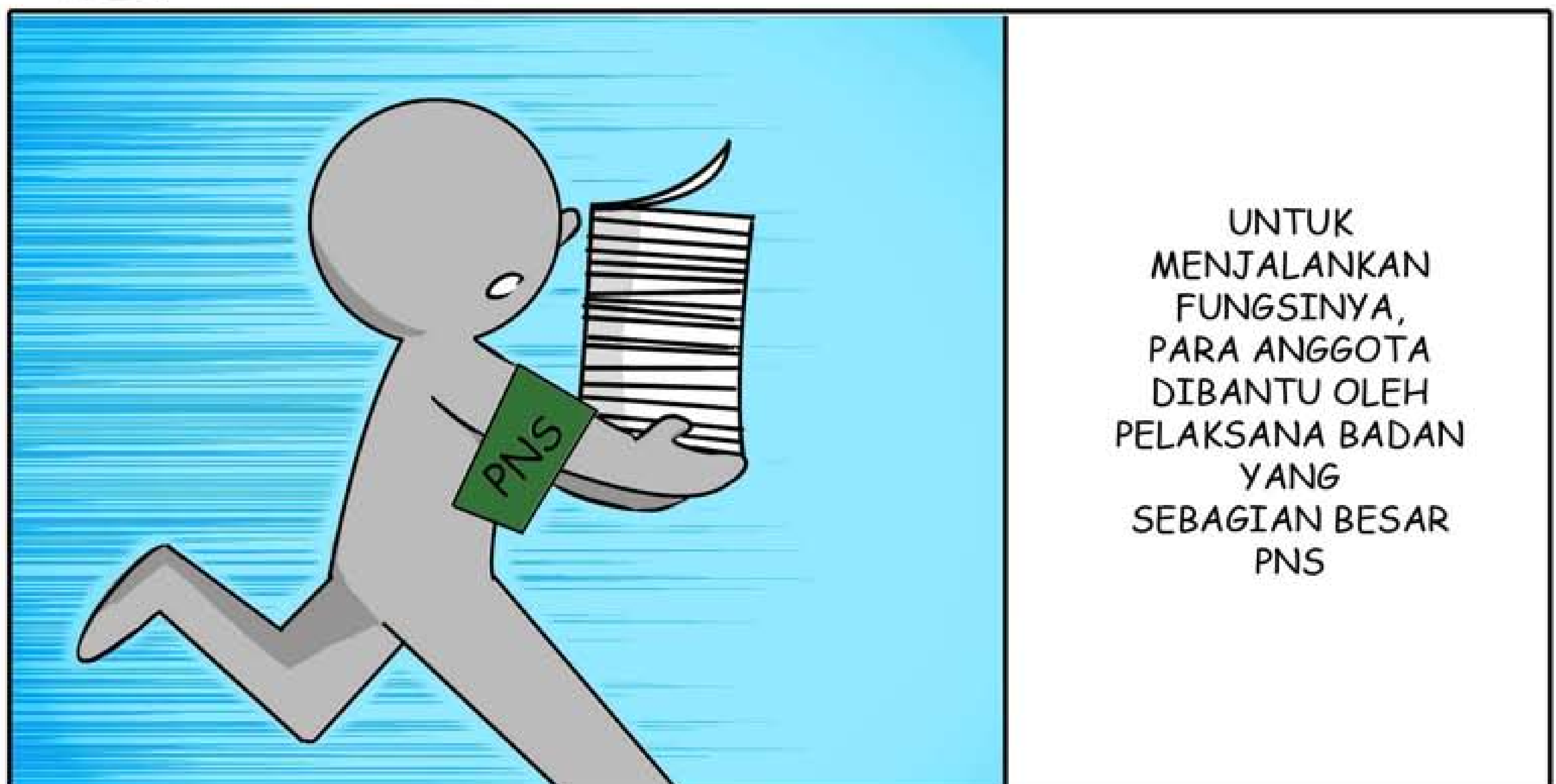
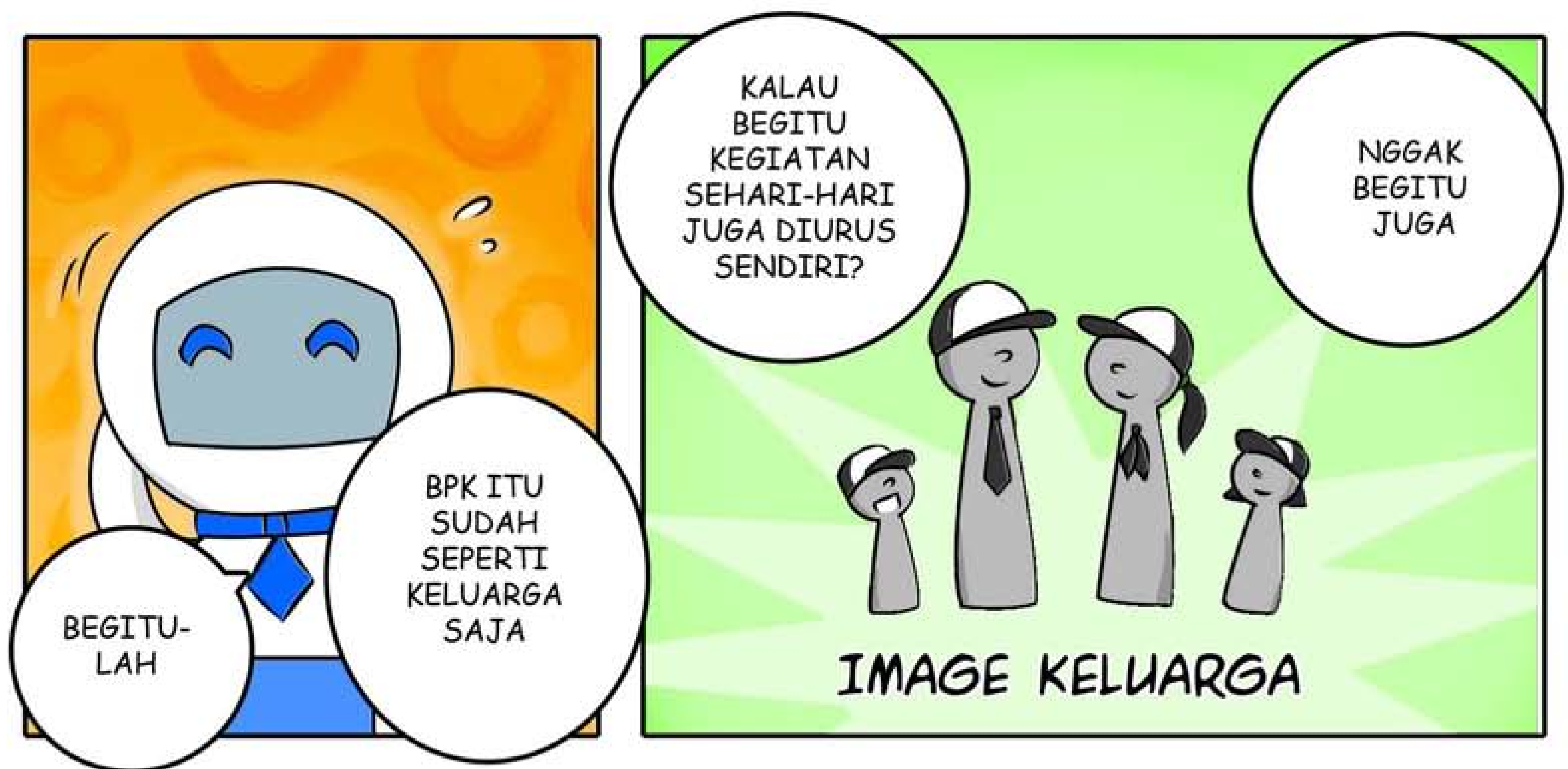


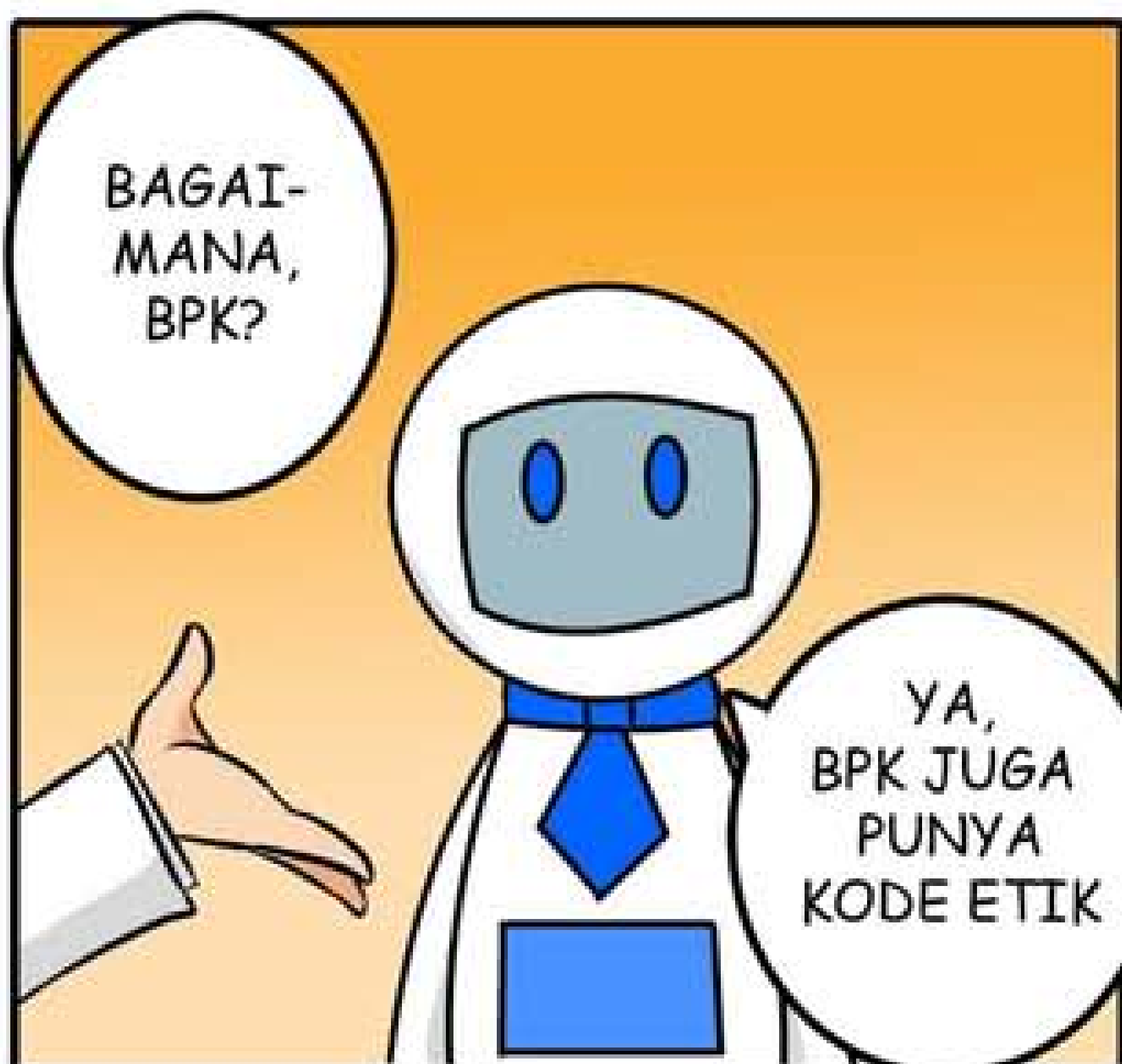
LANJUTAN SYARAT
KEANGGOTAAN BPK

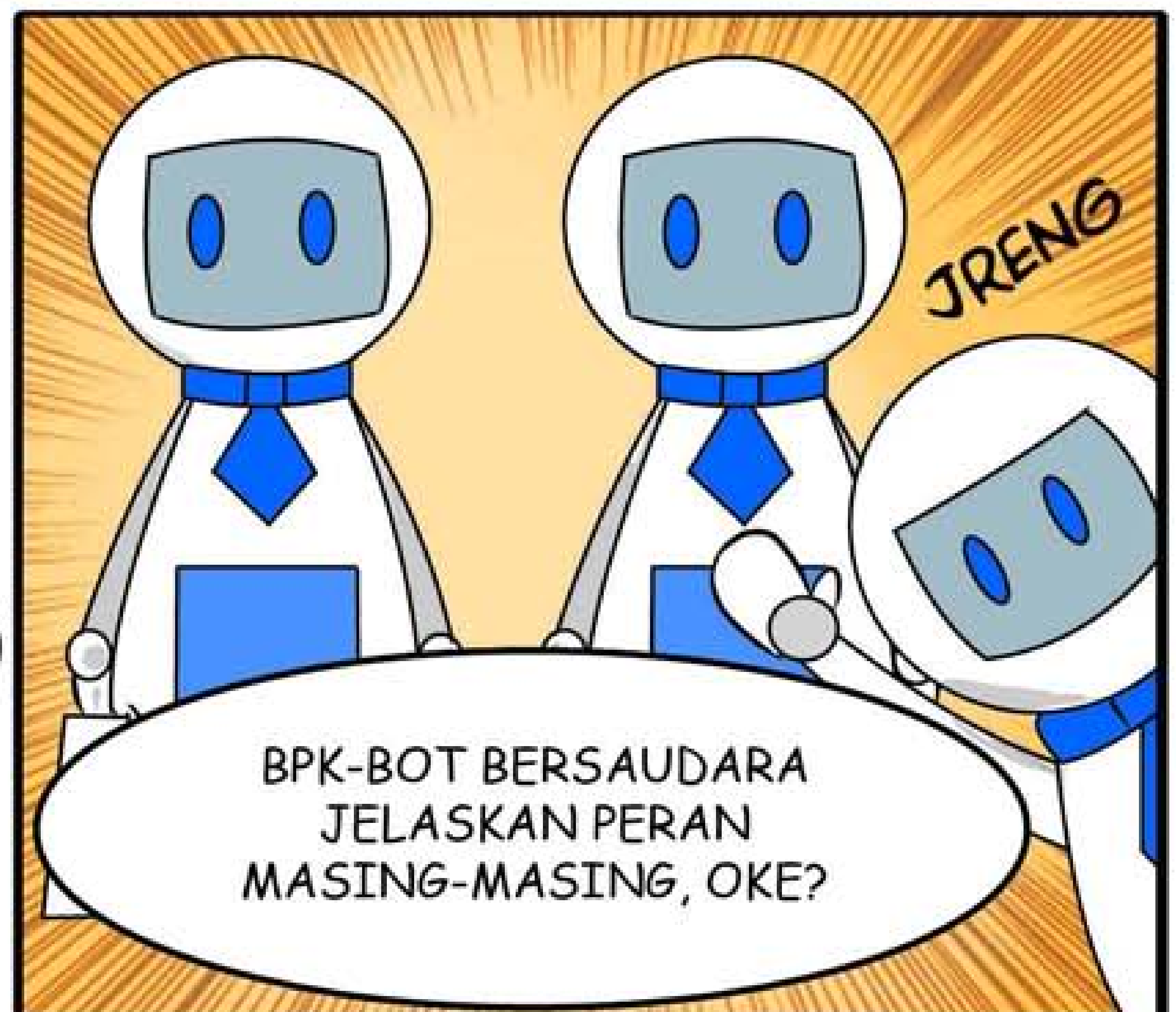
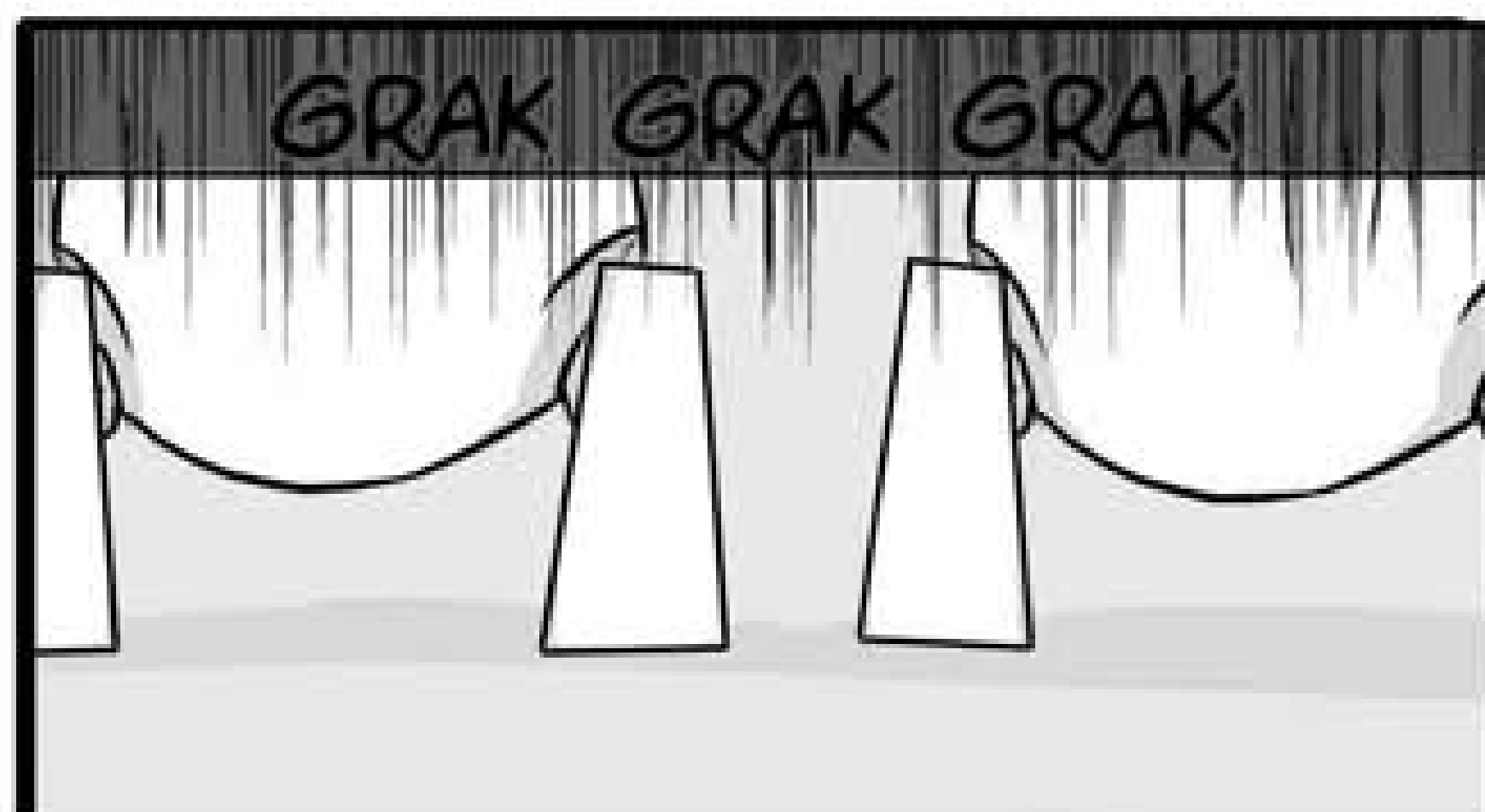
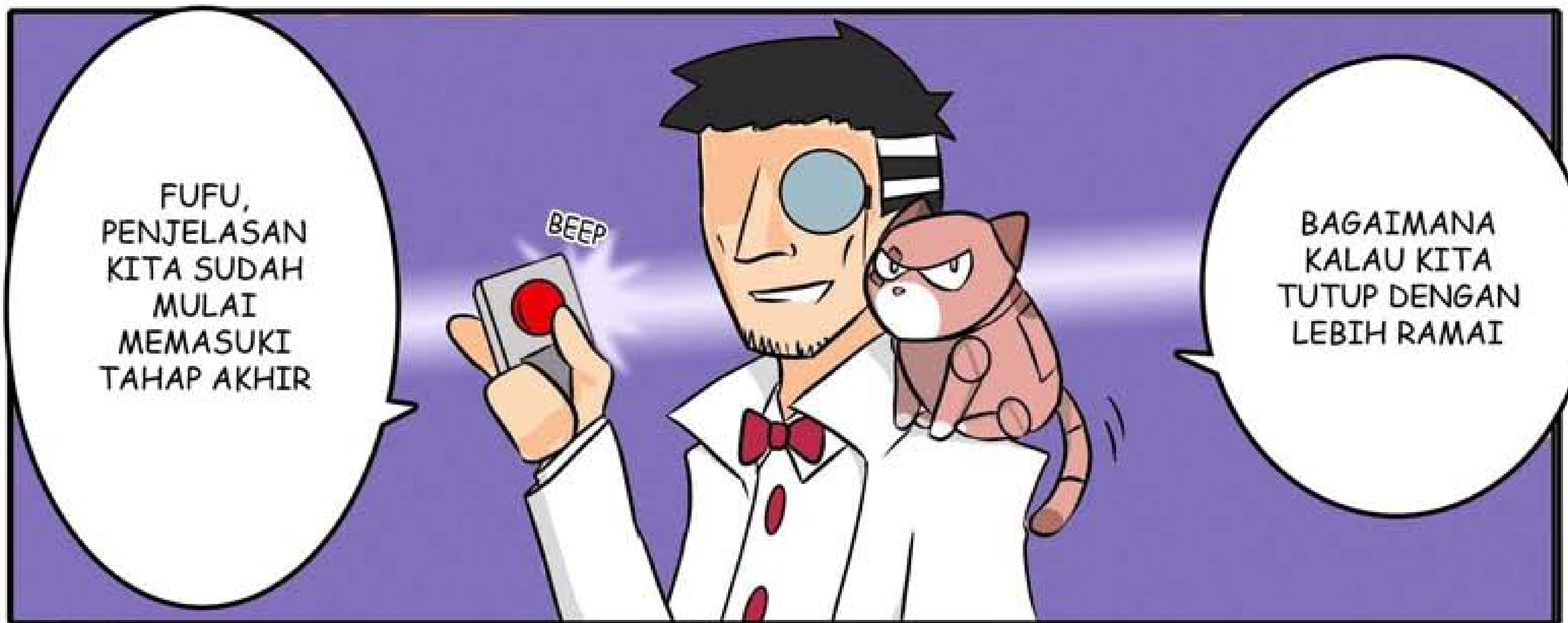
- > SEHAT JASMANI DAN ROHANI
- > PALING RENDAH BERUSIA 35 TAHUN
- > PALING SINGKAT TELAH 2 TAHUN MENINGGALKAN JABATAN SEBAGAI PEJABAT DI LINGKUNGAN PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
- > TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP



BPK JUGA MEMPUYAI PIMPINAN, YANG TERDIRI DARI
SEORANG KETUA DAN WAKIL KETUA
MEREKA DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA BPK
DALAM SIDANG ANGGOTA BPK







TUGAS KETUA:

- KELEMBAGAAN BPK
- PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA SECARA UMUM
- HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

TUGAS WAKIL KETUA:

- PELAKSANAAN TUGAS PENUNJANG DAN SEKRETARIS JENDERAL
- PENANGANAN KERUGIAN NEGARA.



Kantor Perwakilan BPK RI
WILAYAH 1 (BARAT)

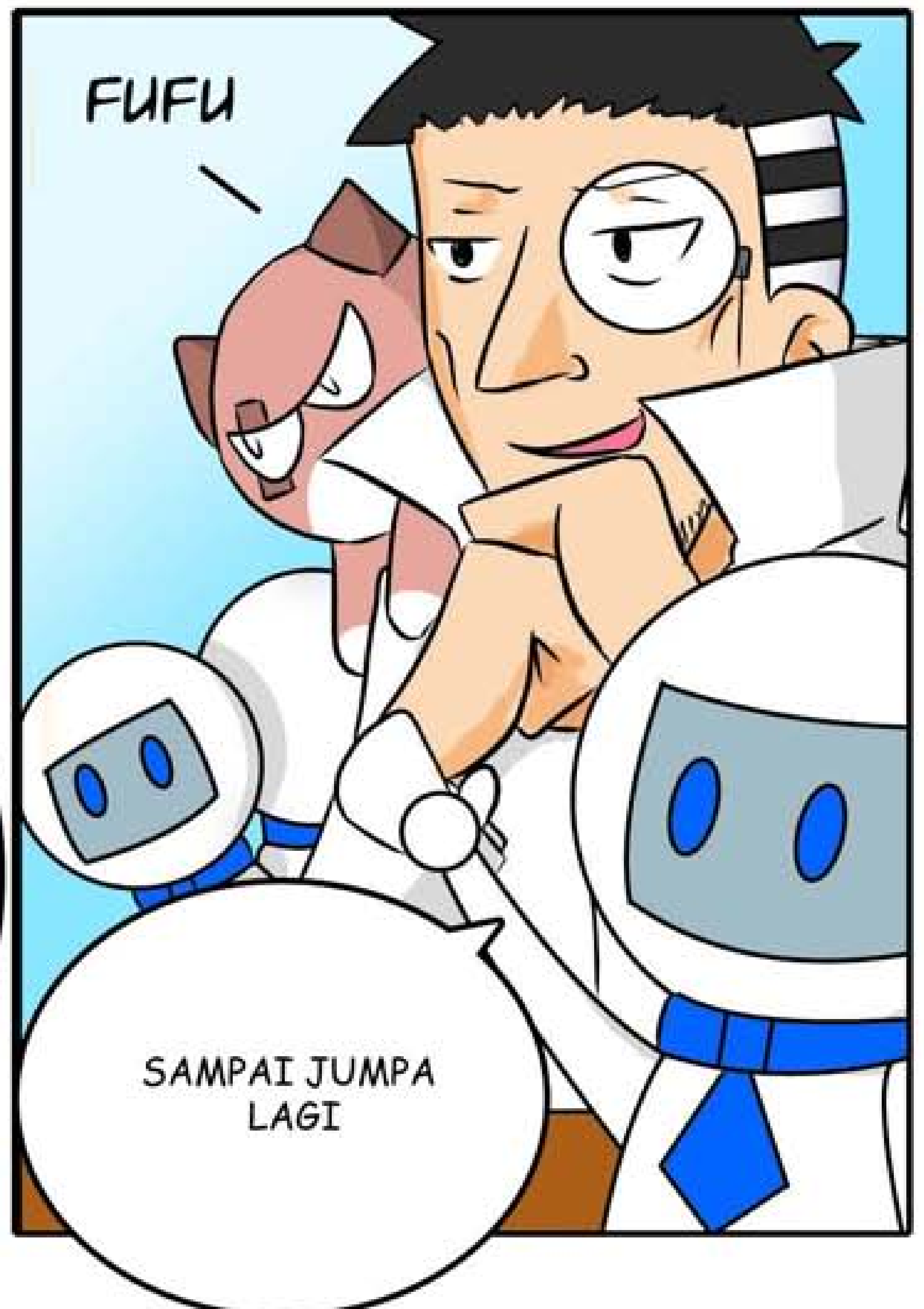
BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Utara
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK RI Perwakilan Provinsi DKI
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten
BPK RI Perwakilan Provinsi DIY
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kantor Perwakilan BPK RI
WILAYAH 2 (TIMUR)

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
BPK RI Perwakilan Provinsi Bali
BPK RI Perwakilan Provinsi NTB
BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo
BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara
BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku
BPK RI Perwakilan Provinsi Papua
BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat





PINTU
KELUARNYA
DIMANA?

TAMAT

www.bpk.go.id